

# LAPORAN

## ANALISIS POLA KONSUMSI PANGAN BERDASARKAN POLA PANGAN HARAPAN (PPH) KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

Jln. Soekarno-Hatta No. 172 Jombang Telpn (0321) 8493268

# LAPORAN

## ANALISIS POLA KONSUMSI PANGAN BERDASARKAN POLA PANGAN HARAPAN (PPH) KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

Jln. Soekarno-Hatta No. 172 Jombang Telpn (0321) 8493268

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Analisis Konsumsi Pangan Berdasarkan Pola Pangan Harapan Kabupaten Jombang Tahun 2023 ini dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama, cita rasa.

Penyusunan Laporan ini didasarkan pada data primer yang didapat dari survey terhadap 630 rumah tangga yang dilakukan oleh petugas survey dari warga di 63 desa lokasi survey pada 21 Kecamatan terpilih di Kabupaten Jombang. Analisis dilakukan dengan membandingkan data hasil survey tahun 2023 di masing-masing kecamatan.

Laporan ini berisi tentang: keadaan umum wilayah Kabupaten Jombang, data karakteristik sosial ekonomi keluarga responden, analisis tingkat konsumsi dan keragaman pangan masyarakat, serta strategi dan langkah implementasi

Melalui kesempatan yang sangat baik ini, kami Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang beserta jajarannya dan narasumber yang telah membantu memberikan arahan, pemikiran, dan berbagai informasi, termasuk memfasilitasi kelancaran kegiatan kajian ini.

Tim Analisis berharap hasil kajian ini dapat menjadi salah satu acuan atau masukan dalam perumusan kebijakan pangan baik untuk aspek persediaan, distribusi maupun konsumsi. Kami juga berharap, hasil analisis ini dapat menjadi referensi untuk kajian selanjutnya yang berkaitan dengan kebijakan pangan. Kami menyadari bahwa hasil analisis ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti dalam hal ruang lingkup, metode analisis,

maupun kualitas data. Oleh sebab itu, masukan dan kritik konstruktif untuk penyempurnaan kajian ini, sangat kami harapkan.

Jombang, November 2023

Tim Analisis

Dr. Laili Rahmawati, STP., MMA.

Ahmad Riadi, AMd.Gz

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 TUJUAN DAN MANFAAT .....	4
1.2.1 Tujuan Umum .....	4
1.2.2 Tujuan Khusus .....	5
1.2.3 Manfaat Kajian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Ketahanan Pangan dan Pola Pangan Harapan .....	6
2.2 Analisis Situasi Pangan dan Gizi .....	10
2.2.1 Akses Pangan .....	11
2.2.2 Mutu dan Keamanan Pangan .....	13
2.2.3 Kelembagaan Pangan dan Gizi .....	16
2.2.4 Kerangka Pemikiran dan Ruang Lingkup Analisa Konsumsi Pangan Wilayah .....	17
2.2.5 Pengembangan Pola Konsumsi .....	18
BAB III KERANGKA KONSEP .....	23
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN.....	26
4.1 Desain penelitian .....	26
4.2 Tempat dan Waktu .....	26
4.3 Populasi dan Sampel .....	26
4.4 Variabel dan Definisi Operasional .....	27
4.5 Tahapan Pelaksanaan Survey Konsumsi Pangan Wilayah .....	29
4.6 Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data Survey Konsumsi Pangan .....	30
4.7 Pengolahan Dan Analisis Data Survey Konsumsi Pangan Wilayah .....	31
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....	34
5.1 Keadaan Umum Wilayah Kabupaten Jombang .....	34
5.1.1. Situasi Geografis dan Iklim .....	34
5.1.2. Pemerintahan Kabupaten Jombang .....	35
5.1.3. Kependudukan dan Ketenagakerjaan .....	35
5.1.4. Kualitas Sumber Daya Manusia .....	36
5.1.5. Harga Kebutuhan Pokok dan Pengeluaran Penduduk .....	38
5.2 Analisis Data Karakteristik Sosial Ekonomi Keluarga Responden .....	39

5.3 Analisis Tingkat Konsumsi dan Keragaman Pangan Masyarakat .....	55
5.3.1. Gambaran Konsumsi Energi, Protein dan PPH .....	55
5.3.2. Analisis Pola Konsumsi Berdasarkan Karakteristik Responden .....	67
5.4 Analisis Capaian Konsumsi Pangan .....	79
5.5 Analisis Kecamatan Kudu .....	85
VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	94
6.1 Kesimpulan .....	94
6.2 Rekomendasi .....	95
DAFTAR PUSTAKA .....	98
Lampiran .....	101

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman ( Undang-Undang Pangan, 2012).

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Kualitas konsumsi pangan masyarakat Indonesia dipantau dengan menggunakan ukuran melalui Pola Pangan Harapan (PPH). Hasil dari beberapa survey menunjukkan bahwa skor Pola Pangan Harapan Masyarakat Indonesia masih cukup rendah. Hal ini disebabkan masih rendahnya konsumsi pangan hewani serta sayur dan buah. Bahkan konsumsi kelompok padi-padian masih sangat besar dengan proporsi di atas 50 % (lima puluh persen). Situasi seperti ini terjadi karena pola konsumsi pangan masyarakat yang kurang beragam, bergizi seimbang serta diikuti dengan semakin meningkatnya konsumsi terhadap produk impor, antara lain gandum dan terigu. Sementara itu, konsumsi bahan pangan lainnya dinilai masih belum memenuhi komposisi ideal yang dianjurkan, seperti pada kelompok umbi, pangan hewani, sayuran dan aneka buah.

Sumber daya manusia berkualitas yang ditandai dengan hidup sehat, aktif dan produktif berkelanjutan, dapat diperoleh dengan cara memenuhi kebutuhan zat gizi yang diperlukan oleh tubuhnya. Dari sisi norma gizi terdapat standar minimum jumlah makanan yang dibutuhkan seorang individu agar dapat hidup sehat dan aktif beraktivitas. Dalam ukuran energi dan protein dibutuhkan 2100 kkal/kap/hari dan 57 gram/kapita/hari (WNPG 2018). Kekurangan konsumsi bagi seseorang dari standar minimum tersebut akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan, aktivitas dan produktivitas kerja. Dalam jangka panjang kekurangan konsumsi pangan dalam jumlah dan kualitas (terutama pada anak balita) akan berpengaruh terhadap kualitas sumberdaya manusia.

Asupan zat gizi tersebut diperoleh dengan mengonsumsi aneka ragam pangan dari berbagai jenis kelompok pangan dalam jumlah yang cukup dan seimbang. Konsumsi pangan beragam memberikan asupan zat gizi yang seimbang dan dapat saling melengkapi kekurangan zat gizi diantara jenis makanan yang dikonsumsi (Hardinsyah *et al.* 2002). Keberagaman konsumsi pangan penduduk dapat ditunjukkan melalui skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH adalah jenis dan jumlah kelompok pangan utama yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi. PPH tidak hanya memenuhi kecukupan gizi, akan tetapi sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas, dan kemampuan daya beli (Hardinsyah *et al.* 2001).

Pola Pangan Harapan mencerminkan susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Berdasarkan skor pangan dari sembilan bahan pangan. Ketersediaan pangan sepanjang waktu dalam jumlah yang cukup dan harga terjangkau sangat menentukan tingkat konsumsi pangan di tingkat rumah tangga. Selanjutnya pola konsumsi pangan rumah tangga akan berpengaruh pada konsumsi pangan ( Depkes RI, 2005).

Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga komposisi pangan masyarakat sesuai dengan anjuran hidup sehat dan produktif. Sehingga dengan mengupayakan Pola Pangan Harapan yang baik diharapkan dapat terwujud ketahanan pangan di Indonesia.

Dalam aplikasinya Pola Pangan Harapan (PPH) dikenal dengan pola konsumsi

pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman atau dikenal dengan istilah menu B2SA. Dengan terpenuhinya kebutuhan energi dari berbagai kelompok pangan sesuai dengan PPH maka secara implisit kebutuhan zat gizi lainnya juga terpenuhi. Oleh karena itu skor PPH mencerminkan mutu gizi konsumsi pangan dan tingkat keragaman konsumsi pangan.

Keanekaragaman pangan merupakan salah satu prasyarat pokok konsumsi pangan yang cukup mutu dan gizinya. Dalam hal ini, keanekaragaman pangan menjadi salah satu pilar utama dalam ketahanan pangan, sehingga bila ketahanan pangan meningkat, maka skor PPH juga akan meningkat (Bayu Krisnamurthi, 2003). Menurut Hardinsyah (2007), ada lima faktor yang diduga merupakan determinan penting keragaman konsumsi pangan yaitu, daya beli, pengetahuan gizi, waktu yang tersedia untuk pengelolaan pangan, kesukaan pangan dan ketersediaan pangan. Hasil analisis Asmar (2009), faktor yang mempengaruhi tingkat diversifikasi pangan berdasarkan PPH secara signifikan adalah pendidikan ibu rumah tangga dan jumlah anggota rumah tangga. Ada dua variabel yang juga memberikan pengaruh dominan terhadap skor PPH yaitu pendidikan kepala rumah tangga dan pendapatan (Cahyani 2008). Menurut Widyanto (2007) jumlah anggota keluarga dan pendapatan keluarga mempengaruhi pengeluaran konsumsi rumah tangga. Faktor yang berpengaruh terhadap Tingkat Kecukupan Energi (TKE) adalah jumlah anggota rumah tangga dan pengeluaran perkapita (Tanzihah *et al.* 2010). Salah satu faktor yang mempengaruhi pola konsumsi pangan rumah tangga baik kuantitas dan kualitasnya adalah pendidikan ibu rumah tangga.

Berbagai kajian di bidang gizi dan kesehatan menunjukkan bahwa untuk dapat hidup sehat dan produktif, manusia memerlukan sekitar 45 zat gizi yang harus diperoleh dari makanan yang dikonsumsi, dan tidak ada satu jenis panganpun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan gizi bagi manusia. Dengan mengonsumsi makanan yang beranekaragam setiap hari, kekurangan zat gizi pada jenis makanan yang satu akan dilengkapi oleh keunggulan susunan zat gizi jenis makanan lain, sehingga diperoleh masukan zat gizi yang seimbang. Selama ini penilaian konsumsi pangan individu dilakukan dengan menghitung kecukupan gizi setiap zat gizi. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk baik jumlah maupun

komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Skor ini merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan (Kementerian Pertanian, 2010).

Permasalahan gizi dan Kesehatan berkaitan erat dengan konsumsi pangan. Data SSGI 2022, balita stunting (TB/U) di Jawa Timur 19,2%, wasting (BB/TB) 7,2 %, underweight (BB/U) sebanyak 17,6% dan ada yang overweight 3,6%. Data Riskesdas tahun 2018 Capaian ASI Eksklusif baru mencapai 74,5 %, konsumsi makanan yang beraneka ragam pada anak usia 6 – 23 bulan baru mencapai 46,5%, Konsumsi sayuran dan buah-buahan pada anak > 10 tahun baru mencapai 63,3%, makanan yang dipilih mayoritas kaya lemak jenuh, gula dan garam (fast food) dan baru 33,5% yang melakukan aktifitas fysi < 30 menit/hari. Kasus-kasus ini sangat terkait dengan kebiasaan makan dan ketersediaan makanan di rumah tangga. Ketersediaan pangan harus diikuti dengan edukasi tentang pola makan yang baik.

Berdasarkan laporan Economist Impact, skor tersebut mengalami peningkatan 1,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 59,2 poin. Skor indeks tersebut menjadikan ketahanan pangan Indonesia pada 2022 dalam kategori moderat (skor 55-69,9 poin). Indonesia berada di peringkat ke-63 dari 113 negara. Indeks ketahanan pangan GFSI 2022 diukur berdasarkan empat indikator, yakni keterjangkauan harga pangan (*affordability*), ketersediaan pasokan (*availability*), kualitas nutrisi (*quality and safety*), serta keberlanjutan dan adaptasi (*sustainability and adaptation*).

## **1.2 TUJUAN dan MANFAAT**

### **1.2.1 Tujuan Umum**

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui konsumsi pangan dan faktor yang mempengaruhinya serta Pola Pangan Harapan Kabupaten Jombang Tahun 2023.

### **1.2.2 Tujuan Khusus**

1. Mengumpulkan data karakteristik masyarakat yang meliputi usia, tingkat Pendidikan, pendapatan, jumlah keluarga, pekerjaan dan sosial ekonomi di Kabupaten Jombang.
2. Memberikan gambaran Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP) di Kabupaten Jombang
3. Untuk memberikan gambaran situasi pola konsumsi dari setiap komoditas pangan dan untuk mengetahui tingkat keragaman konsumsi pangan dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH).
4. Menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat Kabupaten Jombang.

### **1.2.3 Manfaat Kajian**

Manfaat dari kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Pola konsumsi masyarakat dan PPH Kabupaten Jombang sehingga dapat meningkatkan pola konsumsi yang beragam, dan mendapatkan pola pangan harapan ideal serta dapat meningkatkan kesadaran terhadap kebiasaan makan yang baik di masyarakat dengan harapan menumbuhkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas di masa mendatang.
2. Manfaat ilmiah diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian pendidikan pengembangan sumber daya manusia bidang pangan dan gizi
3. Sebagai bahan masukan dalam menyusun suatu kebijakan program pengembangan dan peningkatan konsumsi makanan, khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Jombang, tentang kebijakan penganekaragaman konsumsi makanan berbasis PPH.
4. Diharapkan dapat memberikan informasi untuk kajian tentang faktor yang berpengaruh terhadap konsumsi makanan dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan konsumsi makanan masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Ketahanan Pangan dan Pola Pangan Harapan**

Ketahanan Pangan pada tataran Nasional memiliki arti sebagai kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman, dan halal, yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan yang berbasis pada keragaman sumber daya domestik. Indikator untuk mengukur ketahanan pangan salah satunya adalah ketergantungan ketersediaan pangan nasional terhadap impor (Badan Penelitian, Departemen Pertanian 2005). Dalam hal ini, ketahanan pangan memiliki beberapa definisi seperti berikut:

1. Pada Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan menyebutkan bahwa "Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik secara jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau yang tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, serta budaya masyarakat".
2. Hasil Lokakarya Ketahanan Pangan Nasional (Departemen Pertanian, 1996) mendefinisikan ketahanan pangan adalah "kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan anggota rumah tangga pada jumlah, mutu dan ragam sesuai dengan budaya setempat dari waktu ke waktu agar tetap hidup sehat".
3. Dalam International Conference in Nutrition, (FAO/WHO, 1992) mendefinisikan "Ketahanan pangan sebagai akses setiap rumah tangga atau individu untuk memperoleh pangan pada setiap waktu untuk keperluan hidup sehat". Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi/susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak maupun relatif, yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Pola Pangan harapan (PPH) adalah suatu komposisi pangan yang seimbang untuk dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk. PPH dapat dinyatakan (1) dalam bentuk komposisi energi (kalori) anekaragam pangan dan/atau (2) dalam bentuk komposisi berat (gram atau kg) anekaragam pangan yang memenuhi kebutuhan gizi penduduk. Pola pangan harapan mencerminkan susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif dan produktif.

PPH (Desirable Dietary Pattern), diperkenalkan pertama kali oleh FAO-RAPA dalam pertemuan konsultasi FAO-RAPA di Bangkok pada tahun 1989. PPH disarankan untuk digunakan bagi setiap negara dikawasan Asia Pasifik yang dalam penerapannya perlu diadaptasi sesuai pola konsumsi pangan dan kebutuhan gizi setempat.

PPH berguna (1) sebagai alat atau instrumen perencanaan konsumsi pangan, ketersediaan pangan dan produksi pangan; (2) sebagai instrument evaluasi tingkat pencapaian konsumsi pangan, penyediaan pangan dan produksi pangan, baik penyediaan dan konsumsi pangan; (3) dapat digunakan sebagai basis pengukuran diversifikasi dan ketahanan pangan; (4) sebagai pedoman dalam merumuskan pesan-pesan gizi.

Untuk menjadikan PPH sebagai instrumen dan pendekatan dalam perencanaan pangan di suatu wilayah atau daerah diperlukan kesepakatan tentang pola konsumsi energi dan konsumsi pangan anjuran dengan mempertimbangkan (1) pola konsumsi pangan penduduk saat ini; (2) kebutuhan gizi yang dicerminkan oleh pola kebutuhan energi (asumsi: dengan makan aneka ragam pangan, kebutuhan akan zat gizi lain akan terpenuhi); (3) mutu gizi makanan yang dicerminkan oleh kombinasi makanan yang mengandung protein hewani, sayur dan buah; (4) pertimbangan masalah gizi dan penyakit yang berhubungan dengan gizi; (5) kecenderungan permintaan (daya beli); (6) kemampuan penyediaan dalam konteks ekonomi dan wilayah.

Patut dipahami bersama bahwa PPH merupakan komposisi atau pola pangan dalam bentuk persentase konsumsi energi yang dianjurkan (harapan) untuk hidup sehat, tanpa memandang apakah pangan tersebut

berasal dari produksi lokal atau didatangkan dari negara/daerah lain (impor). Oleh karena itu angka yang disajikan baru sebatas kebutuhan untuk konsumsi manusia atau penduduk. Untuk perencanaan pangan perlu dipertimbangkan faktor koreksi atau jumlah yang digunakan untuk ekspor (dibawa ke daerah lain), pakan ternak, kebutuhan industri, benih atau bibit, cadangan dan kehilangan.

Pada masa lalu pertimbangan perencanaan pangan lebih mengacu pada upaya meningkatkan kemampuan produksi dan permintaan pangan (daya beli dan preferensi konsumen). Pada masa mendatang, selain memperhatikan kedua hal itu, acuan yang juga penting untuk dipergunakan adalah bahwa pangan yang disediakan dan dikonsumsi harus memenuhi kebutuhan gizi penduduk. Dengan demikian paradigma yang digunakan dalam perencanaan penyediaan pangan adalah dengan memperhatikan keaneraka-ragaman pangan dan keseimbangan gizi yang sesuai dengan daya beli, preferensi konsumen dan potensi sumberdaya lokal. Salah satu acuan yang dapat digunakan untuk itu adalah Pola Pangan Harapan (PPH). Pendekatan ini pertama kali dilontarkan oleh FAO Kantor Wilayah Asia-Pasifik (FAO-RAPA) pada tahun 1988.

PPH dapat diimplementasikan dalam perencanaan kebutuhan konsumsi dan penyediaan pangan untuk dikonsumsi. Berkaitan dengan kegunaan ini maka PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. Dengan pendekatan PPH, maka perencanaan produksi dan penyediaan pangan dapat didasarkan pada patokan imbang komoditas seperti yang telah dirumuskan dalam PPH untuk mencapai sasaran kecukupan pangan dan gizi penduduk. PPH yang disajikan dalam bentuk kelompok pangan memberi keleluasaan untuk menentukan pilihan jenis pangan yang diinginkan di antara kelompoknya disesuaikan dengan kondisi sosial-budaya-ekonomi dan potensi setempat. Dalam pendekatan PPH apabila

sumbangan energi dari 9 kelompok pangan terpenuhi, maka protein, vitamin, mineral akan terpenuhi artinya sejumlah pangan yang tersusun secara seimbang akan mampu memenuhi zat gizi.

Dalam perhitungan PPH dikelompokkan menjadi 9 kelompok pangan dari 11 kelompok Bahan Makanan dalam Neraca Bahan Makanan (NBM). Pengelompokan tersebut adalah seperti pada Tabel 2.1. berikut ini.

**Tabel 2.1. Kelompok Bahan Makanan**

No	Kelompok Pangan	Jenis Komoditas (Kelompok PPH)
1	Padi-padian	Beras & olahannya, jagung & olahannya, gandum & olahannya
2	Umbi-umbian	Ubi kayu & olahannya, ubi jalar, kentang, talas, sagu (termasuk makanan berpati)
3	Pangan hewani	Daging & olahannya, ikan & olahannya, telur, susu & olahannya
4	Minyak & lemak	Minyak kelapa, minyak sawit, margarin, lemak hewani
5	Buah/biji berminyak	Kelapa, kemiri, kenari, cokelat
6	Kacang-kacangan	Kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah, kacang polong, kacang mete, kacang tunggak, kacang lain, tahu, tempe, tauco, oncom, sari kedelai, kecap
7	Gula	Gula pasir, gula merah, sirup, minuman jadi dalam botol/kaleng
8	Sayur & buah	Sayur segar & olahannya, buah segar & olahannya, termasuk emping
9	Lain-lain	Aneka bumbu & bahan minuman spt terasi, cengkeh, ketumbar, merica, pala, asam, bumbu masak, teh, kopi

Susunan PPH berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 2018 yang menggunakan bobot (rating) FAO RAPA (1989) yang terus disempurnakan menjadi PPH tahun 2020 disepakati bahwa skor mutu pangan yang ideal untuk hidup sehat bagi penduduk Indonesia adalah 100, dengan rincian seperti pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2. Susunan Pola Pangan Harapan Nasional Ideal**

No	Kelompok Pangan / JenisPangan	Berat (gr/Kap/Hr)	Energi (Kkal/Kap/Hr)	% AKE	Bobot	Skor PPH
1.	Padi-padian	289	1050	50,0	0,5	25,0
2.	Umbi-umbian	105	126	6,0	0,5	2,5
3.	Pangan hewani	157	252	12,0	2,0	24,0
4.	Minyak dan lemak	21	210	10,0	0,5	5,0
5.	Buah/biji berminyak	11	63	3,0	0,5	1,0
6.	Kacang-kacangan	37	105	5,0	2,0	10,0
7.	Gula	31	105	5,0	0,5	2,5
8.	Sayur dan buah	262	126	6,0	5,0	30,0
9.	Lain-lain	-	63	3,0	0,0	0,0
	Jumlah	-	2.100	100	-	100

Dalam penghitungan, Pola Pangan Harapan (PPH) ini dapat digunakan untuk menilai ketersediaan dan konsumsi pangan (jumlah dan komposisi/keragaman). Penilaian ketersediaan dilakukan dengan membandingkan skor PPH ketersediaan pangan aktual dengan skor yang diharapkan dan membandingkan kontribusi ketersediaan energi (% AKG) aktual dengan komposisi energi harapan. Dalam perencanaan ketersediaan serta konsumsi pangan juga membutuhkan skor PPH terlebih dahulu.

## 2.2 Analisis Situasi Pangan dan Gizi

Banyak faktor penyebab timbulnya masalah gizi. Terdapat dua faktor langsung yang mempengaruhi status gizi individu, yaitu faktor makanan dan penyakit infeksi dan keduanya saling mendorong (berpengaruh). Sebagai contoh, bayi dan anak yang tidak mendapat air susu ibu (ASI) dan makanan pendamping ASI yang tepat memiliki daya tahan yang rendah sehingga mudah terserang infeksi. Sebaliknya penyakit infeksi seperti diare dan infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) mengakibatkan asupan zat gizi tidak dapat diserap tubuh dengan baik.

Faktor penyebab langsung pertama adalah konsumsi makanan yang tidak memenuhi jumlah dan komposisi zat gizi yang memenuhi syarat makanan beragam, bergizi seimbang, dan aman. Pada tingkat makro, konsumsi makanan individu dan keluarga dipengaruhi oleh ketersediaan pangan yang ditunjukkan oleh tingkat

produksi dan distribusi pangan. Ketersediaan pangan beragam dalam jumlah yang cukup dan harga terjangkau sangat menentukan ketahanan pangan tingkat rumah tangga dan tingkat konsumsi makanan keluarga.

Faktor penyebab langsung kedua adalah penyakit infeksi yang berkaitan dengan tingginya kejadian penyakit menular dan buruknya kesehatan lingkungan. Untuk itu, cakupan universal untuk imunisasi lengkap pada anak sangat mempengaruhi kejadian kesakitan yang perlu ditunjang dengan tersedianya air minum bersih dan higienis sanitasi yang merupakan salah satu faktor penyebab tidak langsung.

Faktor penyebab tidak langsung, selain sanitasi dan penyediaan air bersih, kebiasaan cuci tangan dengan sabun, buang air besar di jamban, tidak merokok, sirkulasi udara dalam rumah yang baik, ruangan dalam rumah terkena sinar matahari dan lingkungan rumah yang bersih. Faktor lain yang juga berpengaruh yaitu ketersediaan pangan. Selanjutnya, pola asuh bayi dan anak serta jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Pola asuh, sanitasi lingkungan dan pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, akses informasi dan tingkat pendapatan keluarga.

Ketidakstabilan ekonomi, politik, dan sosial dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat, yang tercermin dari rendahnya konsumsi pangan dan status gizi masyarakat. Oleh karena itu, mengatasi masalah gizi masyarakat merupakan salah satu tumpuan penting dalam pembangunan ekonomi, politik, dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Dibawah ini diuraikan analisis pangan dan gizi berdasarkan pendekatan 5 pilar yaitu sebagai berikut:

### **2.2.1 Akses Pangan**

Rata-rata konsumsi pangan masyarakat Indonesia telah mencapai tingkat asupan kalori minimum sebesar 2.100 kalori/kapita/hari dan sumber utama dari konsumsi makanan di Indonesia adalah dari padi-padian terutama beras, sementara asupan dari sumber pangan lainnya seperti daging dan sayur-sayuran masih rendah atau belum seimbangan pola konsumsi pangan penduduk.

Tingginya proporsi sumber karbohidrat dalam pola konsumsi pangan penduduk menunjukkan kemiskinan sebagai faktor utama yang menyebabkan kekurangan gizi. Meskipun kontribusi padi-padian dalam konsumsi pangan masih cukup tinggi, namun data Susenas menunjukkan terjadinya penurunan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi yang membaik dan berkurangnya ketergantungan kepada padi-padian sebagai sumber energi. Berdasarkan ulasan tersebut, tantangan dalam perbaikan gizi masyarakat adalah perbaikan pola konsumsi pangan sesuai kaidah asupan gizi seimbang dengan meningkatkan aksesibilitas terhadap pangan dan mendorong percepatan diversifikasi konsumsi.

Akses pangan (rumah tangga) adalah kondisi penguasaan sumberdaya (sosial, teknologi, finansial/keuangan, alam, manusia) yang cukup untuk memperoleh dan/atau ditukarkan untuk memenuhi kecukupan pangan, termasuk di rumah tangga. Ketersediaan pangan di suatu daerah mungkin mencukupi, akan tetapi tidak semua rumah tangga mampu dan memiliki akses yang memadai baik secara kuantitas maupun keragaman pangan melalui mekanisme tersebut di atas. Masalah akses terhadap pangan untuk penduduk miskin merupakan gabungan dari masalah kemiskinan, kurangnya pekerjaan tetap, pendapatan tunai yang rendah dan tidak tetap, serta terbatasnya daya beli.

Aksesibilitas pangan atau keterjangkauan pangan oleh masyarakat dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain: harga pangan, tingkat pendapatan atau daya beli, kestabilan keamanan sosial, anomali iklim, bencana alam, lokasi dan topografi, keberadaan sarana dan prasarana transportasi, kondisi jalan, dan lainnya. Permasalahan akses pangan secara fisik masih disebabkan oleh kurang memadainya fasilitas prasarana jalan, pelabuhan, dan sarana transportasi yang menyebabkan biaya distribusi pangan menjadi mahal.

Sarana distribusi pangan seperti fasilitas pasar umum, sarana penyimpanan dan pengolahan hasil pertanian, masih terbatas jumlahnya. Terbatasnya sarana tersebut menyulitkan masyarakat untuk melakukan penyimpanan dan pengolahan, sehingga tidak dapat diperoleh mutu pangan dan nilai tambah yang tinggi. Peraturan perundangan belum mendukung kelancaran distribusi pangan, berbagai pungutan dan retribusi mengakibatkan meningkatnya biaya distribusi pangan.

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan umumnya bersifat kronis yang meliputi aspek fisik, ekonomi, dan sosial. Aspek fisik berupa infrastruktur jalan dan pasar, dan aspek ekonomi berupa daya beli yang masih rendah karena kemiskinan dan pengangguran, serta aspek sosial berupa tingkat pendidikan yang rendah.

Masalah dan tantangan ekonomi karena masih rendahnya pendapatan masyarakat berakibat pada daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan menjadi menurun. Rendahnya daya beli masyarakat tidak hanya terjadi di wilayah pedesaan, tetapi juga terjadi di wilayah perkotaan. Masalah ini juga disebabkan oleh persoalan pengangguran serta kondisi ekonomi wilayah yang masih belum baik.

Rendahnya daya beli ini menyebabkan tingkat konsumsi pangan masyarakat masih di bawah yang direkomendasikan untuk mendukung kehidupan yang sehat dan aktif. Tantangan lainnya yang menjadi hambatan dalam peningkatan aksesibilitas pangan adalah rendahnya sumberdaya yang tersedia di wilayah untuk mendorong terciptanya dampak pengganda ekonomi yang dapat menciptakan sumber pendapatan dan mata pencaharian.

Masalah dan tantangan sosial yang masih menjadi penghambat aksesibilitas terhadap pangan terutama adalah faktor pendidikan masyarakat yang masih rendah. Secara umum tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah akan berdampak pada masih rendahnya kapasitas individu sehingga membatasi ruang gerak dalam memperoleh sumber pendapatan. Kelompok masyarakat yang berpendidikan rendah umumnya menggantungkan hidupnya dari pemanfaatan sumberdaya alam secara primer, sehingga tidak dapat memperoleh nilai tambah ekonomi. Rendahnya pendidikan masyarakat juga menyebabkan hambatan proses adopsi teknologi yang sebenarnya dapat mendorong produktivitas usaha. Permasalahan lain yang menyangkut konsumsi pangan adalah masih adanya budaya dalam masyarakat yang terkait dengan pantangan makanan dan kepercayaan yang bertentangan dengan gizi dan kesehatan.

### **2.2.2 Mutu dan Keamanan Pangan**

Kondisi keamanan pangan sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat

tanpa mengenal batas usia dan golongan ekonomi. Kondisi keamanan pangan sangat ditentukan oleh lingkungan dan perilaku personil yang menangani pangan dari sejak dipanen sampai di meja makan. Oleh karena itu, peningkatan keamanan pangan harus melibatkan berbagai instansi termasuk pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Keamanan Pangan dalam PP 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Desember 2019 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan diundangkan di Jakarta oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 26 Desember 2019.

Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Ketentuan Keamanan Pangan terkait dengan agama dan keyakinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2019, sekitar 600 juta orang atau 1 dari 10 orang di dunia menderita sakit setelah mengonsumsi pangan yang terkontaminasi. Sebanyak 420 ribu orang meninggal setiap tahun karena makanan tersebut.

Contoh kegiatan Pengawasan keamanan pangan antara lain pemeriksaan Residu Pestisida pada buah-buahan impor dilakukan pada minggu kedua November 2020 di beberapa provinsi tempat pemasukan, yaitu: 1) Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara; 2) Pelabuhan Tanjung Priok, DKI Jakarta; 3) Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya; 4) Pelabuhan Soekarno Hatta, Makassar; dan Kota Batam, Kepri.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan ekspor produk hasil pertanian, volume ekspor produk hasil pertanian Indonesia terus meningkat. Namun demikian, Indonesia masih mendapatkan notifikasi penolakan ekspor, karena kandungan cemaran yang melebihi standar yang dipersyaratkan negara tujuan ekspor.

Penyalahgunaan bahan berbahaya formalin telah dapat diturunkan kasusnya dari tahun ke tahun, demikian pula penggunaan BTP pemanis yang berlebihan. Sementara produk TMS terkait dengan cemaran mikroba masih cukup dominan. Hal ini dapat merupakan indikasi kondisi higienis dan sanitasi lingkungan yang masih memprihatinkan.

Pengawasan keamanan pangan jajanan anak sekolah merupakan salah satu kegiatan strategis mengingat anak sekolah adalah cikal bakal generasi bangsa yang akan datang. Jenis produk yang diambil sampelnya difokuskan pada pengawasan terhadap penyalahgunaan bahan berbahaya seperti pewarna rhodamin B dan methanil yellow, boraks dan formalin. Selain itu, dilakukan monitoring penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi batas yang ditetapkan khususnya pengawet dan cemaran mikroba. Kegiatan pengawasan keamanan pangan dilakukan secara periodik setiap tahun

Pada tahun 2020 ,Perhitungan sampel pangan MS dan TMS sampel purposive (targeted sampling). Proporsi sampel pangan dari 6.265 sampel yang dapat dihitung, diketahui bahwa sampel pangan MS (Memenuhi Sarat) sebesar 76% (4.734 sampel) sedangkan sampel pangan TMS sebesar 24% (1.531 sampel).

Selain dalam hal pengawasan, targeted sampling juga mengakomodir pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian dalam rangka pembinaan seperti pendampingan UMKM. Hal ini sebagai bentuk dukungan sesuai dengan Misi Badan POM yaitu mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha khususnya UMKM. Pada kegiatan sampling dan pengujian produk pangan dalam rangka pembinaan UMKM, Balai Besar/Balai/Loka POM dapat melakukan pengambilan dan pengujian sampel pangan UMKM yang di bawah binaannya yang mana selanjutnya hasil pengujian tersebut dapat digunakan sebagai data dukung proses pendaftaran pangan di Direktorat Registrasi Pangan Olahan Badan POM.

### **2.2.3 Kelembagaan Pangan dan Gizi**

Diawali pada tahun 1974 dengan diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 14 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat telah terbentuk Kelompok Kerja Fungsional antar Kementerian yang mengkoordinasikan kegiatan perbaikan pangan dan gizi masyarakat. Kemudian diikuti dengan Instruksi Presiden Nomor 20 Tahun 1979 sehingga di tingkat provinsi dan kabupaten dan kota dibentuk Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD) yang mengkoordinasikan kegiatan Usaha Perbaikan Gizi. Keluarga oleh sektor Kesehatan, Keluarga Berencana, Pertanian dan Agama. Selama 3 dekade, Indonesia mencapai keberhasilan dalam perbaikan gizi masyarakat melalui kegiatan pemantauan tumbuh kembang dan konseling gizi, pemeriksaan ibu hamil, pelayanan kontrasepsi, imunisasi dan penanggulangan diare yang dilaksanakan di hampir 240.000 pos pelayanan terpadu (posyandu) oleh lebih dari satu juta kader desa.

Dewan Ketahanan Pangan dipimpin langsung oleh Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006, dengan tugas utama mengevaluasi ketahanan pangan dan memformulasikan kebijakan peningkatan ketahanan pangan ditinjau dari sisi ekonomi, politik, geografis, dan gizi. Sektor pertanian bertanggung jawab dalam produksi pangan dan berkoordinasi dengan Badan Ketahanan Pangan Daerah yang dipimpin gubernur. Standar industri makanan dan penegakan hukum dilaksanakan oleh sektor Industri, sementara mutu dan keamanan pangan yang layak dikonsumsi masyarakat dipantau oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pelayanan gizi dan promosi gizi dilaksanakan oleh sektor kesehatan.

Para pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang pangan dan gizi termasuk sektor swasta, perguruan tinggi dan organisasi non pemerintah dalam dan luar negeri terlibat dalam perbaikan gizi, termasuk saat krisis gizi buruk di tahun 1998 dan saat terjadinya bencana alam nasional. Badan PBB dan mitra pembangunan berkontribusi memberikan hibah dan bantuan teknis untuk perbaikan pangan, kesehatan, dan gizi. Walaupun demikian, koordinasi lintas program dan lintas sektor maupun antar Badan PBB dan mitra pembangunan masih harus terus ditingkatkan. Koordinasi perlu dibangun untuk mengkoordinasikan secara efektif kebijakan antar sektor, memfasilitasi kolaborasi di tingkat operasional dan

mengintegrasikan kegiatan program terkait dengan penurunan prevalensi kekurangan gizi dan peningkatan asupan kalori pada semua anggota keluarga yang mengalami rawan pangan (Kemenkes, 2010).

#### **2.2.4 Kerangka Pemikiran dan Ruang Lingkup Analisa Konsumsi Pangan Wilayah**

Secara operasional, perencanaan kebutuhan pangan dapat didasarkan pada pendekatan pemenuhan gizi seimbang yang didasarkan atas AKG (Angka Kecukupan Gizi) dan PPH. Pendekatan lain dalam perencanaan pangan adalah berdasarkan kebutuhan aktual. Artinya perencanaan kebutuhan pangan ditujukan untuk menjamin ketersediaan pangan sesuai dengan permintaan aktual masyarakat sebagai cerminan pendapatan, harga pangan, preferensi pangan, nilai sosial pangan, dan budaya/pola konsumsi pangan.

Perencanaan kebutuhan pangan untuk mendapatkan pola konsumsi pangan yang ideal menurut PPH dilakukan sesuai dengan kondisi wilayah. Masing-masing wilayah yang terdiri dari propinsi dan kabupaten/kota dapat mempunyai distribusi konsumsi pangan yang juga berbeda. Perencanaan konsumsi pangan disesuaikan dengan distribusi konsumsi pangan yang ideal. Perencanaan konsumsi pangan juga harus diimbangi dengan perencanaan ketersediaan pangan. Masing-masing wilayah mempunyai potensi komoditas dan ketersediaan pangan yang berbeda, sehingga perencanaan ketersediaan pangan juga akan berbeda sesuai dengan kondisi wilayah.

Permintaan atau perencanaan konsumsi pangan dirancang sehingga mendekati pola konsumsi pangan yang ideal yang dicerminkan oleh skor PPH yang tinggi atau meningkat. Perencanaan ini harus disertai dengan aspek sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat akan keragaman konsumsi pangan merupakan dasar ketahanan pangan tingkat individu. Peningkatan ketahanan pangan tingkat individu akan meningkatkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga, wilayah dan pada akhirnya ketahanan pangan nasional.

Pola konsumsi pangan yang diperoleh dari hasil survei dengan mengacu pada PPH akan mencerminkan kondisi aktual pola konsumsi masyarakat. Pola konsumsi

ini perlu dianalisis dan dievaluasi untuk dijabarkan dalam program. Dari hasil analisis akan diketahui kelompok bahan pangan yang masih kurang dikonsumsi, kelompok bahan pangan yang dikonsumsi berlebih, serta jumlah konsumsi beras. Hasil analisis dilanjutkan dengan identifikasi permasalahan untuk mengetahui penyebab distribusi konsumsi bahan pangan yang tidak ideal.

Dalam analisis terhadap pola konsumsi perlu dipertimbangkan karakteristik rumah tangga, tingkat sosial ekonomi, tingkat pendidikan dan lokasi geografis. Perlu diperhatikan pula potensi komoditas wilayah untuk dipertimbangkan digunakan dalam mencapai kesetimbangan distribusi konsumsi kelompok bahan pangan berdasarkan PPH. Dari hasil analisis tersebut dibuat perencanaan konsumsi pangan. Misal, jika konsumsi padi-padian mempunyai skor yang lebih besar dari skor PPH artinya harus ada upaya pengurangan konsumsi padi-padian dengan dialihkan pada konsumsi sumber karbohidrat yang lain. Apabila kelebihan konsumsi padi-padian disertai dengan skor konsumsi umbi-umbian, maka harus ada program untuk peningkatan konsumsi umbi-umbian. Demikian selanjutnya untuk kelompok bahan pangan yang lain.

Berdasarkan hasil analisis PPH aktual, selanjutnya dilakukan analisis terhadap ketersediaan pangan wilayah yang dikukur dengan ketersediaan pangan per kapita. Analisis dilakukan dengan memperhatikan komoditas di wilayah yang surplus dan yang kekurangan. Perencanaan penyediaan pangan ditujukan untuk mengimbangi perencanaan pola konsumsi. Misalnya, jika berdasarkan PPH aktual konsumsi umbi-umbian masih rendah, maka perlu dicari komoditas yang ada di wilayah yang berupa umbi-umbian yang berpotensi untuk digunakan dalam peningkatan konsumsi umbi-umbian yang disertai dengan peningkatan keterampilan pengolahan umbi-umbian atau peningkatan kontribusi usaha pengolahan pangan berbasis umbi-umbian.

### **2.2.5 Pengembangan Pola Konsumsi**

Hak atas kecukupan pangan tidak dapat dilepaskan dari masalah hak azasi manusia. Tujuan mengonsumsi pangan adalah memperoleh sejumlah zat gizi yang diperlukan tubuh, sehingga bila hak atas pangan terpenuhi maka kualitas hidup

yang baik mencakup status gizi dan kesehatan akan tercapai (Khomsan, 2002). Hardinsyah dan Martianto (1989) juga mengungkapkan bahwa agar hidup sehat secara berkelanjutan, manusia memerlukan sejumlah zat gizi. Zat gizi dapat diperoleh dari konsumsi pangan yang mencukupi kebutuhan tubuh untuk melakukan kegiatan pemeliharaan dan pertumbuhan tubuh.

Kekurangan zat gizi terutama energi dan protein pada tahap awal akan menimbulkan rasa lapar. Jika berlangsung cukup lama akan berakibat pada penurunan berat badan disertai dengan penurunan produktivitas kerja. Jika kekurangan berlanjut terus akan menyebabkan gizi buruk. Penanganan yang terlambat mengakibatkan mudah terkena infeksi yang berakhir dengan kematian.

Hardinsyah dan Martianto (1989) mendefinisikan kebutuhan gizi sebagai kebutuhan minimal zat gizi agar dapat hidup sehat sedangkan kecukupan gizi adalah jumlah masing-masing zat gizi yang sebaiknya dipenuhi seseorang agar hampir semua orang (minimal 97,5% populasi) hidup sehat. Angka kecukupan energi dan protein berguna untuk mengukur tingkat dan perencanaan konsumsi. Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (2018), Angka Kecukupan Energi (AKE) rata-rata orang Indonesia adalah sebesar 2100 kkal/kapita/hari sedangkan Angka Kecukupan Protein (AKP) adalah sebesar 57 gr/kapita/hari. Jumlah konsumsi pangan dikelompokkan menurut kriteria yang diadaptasi dari Departemen Kesehatan tahun 1996 adalah sebagai berikut:

- a) Kurang dari 70% : Kurang
- b) 70-100%: Sedang
- c) 100-130%: Normal
- d) 130% ke atas : berlebih

Konsumsi pangan tidak hanya diukur dari segi jumlah yang dicerminkan oleh terpenuhinya AKE, tetapi juga dari segi kualitas yang dicerminkan oleh keanekaragaman konsumsi pangan. Konsumsi yang beranekaragam sangat penting karena tidak ada satupun jenis pangan yang memiliki kandungan zat gizi lengkap. Oleh karena itu, konsumsi pangan menyangkut upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mempunyai pemahaman atas pangan, gizi dan kesehatan yang baik, sehingga dapat mengelola pangan secara optimal. Kinerja

konsumsi pangan wilayah tercermin dalam pola konsumsi masyarakat di tingkat rumah tangga. Kondisi konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kondisi ekonomi, sosial, dan budaya setempat. Ukuran rumah tangga, tingkat pendidikan, dan pendapatan merupakan faktor yang mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga (Baliwati, 2007).

Penilaian kualitas konsumsi pangan berdasarkan keragaman dan keseimbangan komposisi energi dapat dilakukan dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH). PPH merupakan kumpulan beragam jenis dan jumlah kelompok pangan utama yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi pada komposisi yang seimbang (Hardinsyah et al, 2001). Selanjutnya dijelaskan bahwa dengan terpenuhinya kebutuhan energi dari berbagai kelompok pangan sesuai PPH, secara implisit kebutuhan zat gizi juga terpenuhi kecuali untuk zat gizi yang sangat defisit dalam suatu kelompok pangan.

Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Jika skor konsumsi pangan mencapai 100, maka wilayah tersebut dikatakan tahan pangan.

Tabel 2.3. Target Skor PPH Nasional tahun 2020-2024

Skor PPH/Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	90,4	91,6	92,8	94	95,2

Pola Konsumsi merupakan susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata perorang perhari, yang umum dikonsumsi penduduk dalam jangka waktu tertentu, pengembangan Pola Konsumsi Pangan dapat diterapkan baik untuk tingkat Nasional, Regional (propinsi, kabupaten/kota) dan tingkat keluarga tergantung keperluannya. Pola konsumsi pangan sangat ditentukan oleh faktor sosial ekonomi rumah tangga seperti tingkat pendapatan, harga pangan, selera dan kebiasaan makan. Faktor sosial budaya didekati dengan menganalisa data golongan pendapatan rumah tangga. Sedangkan letak geografis didekati dengan lokasi desa-kota dari rumah tangga yang bersangkutan. Pola konsumsi pangan juga dipengaruhi oleh karakteristik rumah tangga yaitu jumlah

anggota rumah tangga, struktur umur jenis kelamin, pendidikan dan lapangan pekerjaan.

Penilaian pola konsumsi pangan dapat dilakukan melalui 2 (dua) sisi yaitu: sisi kuantitas dan sisi kualitas. Sisi kualitas, kualitas pangan dalam hal ini dapat mencakup aspek fisik pangan, kualitas kimiawi dan mikrobiologi/aspek keamanan pangan, aspek organoleptik dan aspek gizi. Pangan dari sisi ini lebih ditujukan kepada aspek gizi yang didasarkan kepada keanekaragaman pangannya, bukan hanya makanan pokok saja, tetapi juga bahan pangan lainnya. Semakin beragam dan seimbang komposisi pangan yang dikonsumsi akan semakin baik kualitas gizinya, karena pada hakekatnya tidak ada satupun jenis pangan yang mempunyai kandungan gizi yang lengkap dan cukup dalam jumlah jenisnya. Untuk menilai keanekaragaman pangan digunakan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH). Semakin tinggi skor mutu pangan (PPH) menunjukkan konsumsi pangan semakin beragam dan komposisinya semakin baik.

Sisi kuantitas, pada sisi ini ditinjau dari volume pangan yang dikonsumsi dan konsumsi zat gizi yang dikandung bahan pangan. Kedua hal tersebut digunakan untuk melihat apakah konsumsi pangan sudah dapat memenuhi kebutuhan yang layak untuk hidup sehat yang dikenal sebagai Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang direkomendasikan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi. Untuk menilai kuantitas konsumsi pangan masyarakat digunakan Parameter Tingkat Konsumsi Energi (TKE) dan Tingkat Konsumsi Protein (TKP). Beberapa kajian menunjukkan bahwa bila konsumsi energi dan protein terpenuhi sesuai dengan norma atau AKG dan konsumsi pangan beragam, maka zat lain juga akan terpenuhi dari konsumsi pangan. Untuk menilai situasi pangan dalam rangka perumusan kebijakan di bidang pangan dan gizi, dilakukan melalui kombinasi kedua sisi diatas, dimana kedua penilaian tersebut dipakai untuk menggambarkan pola konsumsi penduduk disuatu wilayah.

Memperhatikan kondisi dan peluang pengembangan penganeka- ragaman konsumsi pangan, maka pola konsumsi pangan penduduk perlu diubah dengan mempertimbangkan ketersediaan pangan, pengetahuan dan daya beli masyarakat. Pengembangan konsumsi pangan ini diprioritaskan pada pengembangan pola

konsumsi pangan, pengembangan manfaat pekarangan, pengembangan pangan lokal dan pengembangan makanan tradisional. Keempat pengembangan tersebut dalam operasionalnya, dapat disesuaikan dengan kondisi daerah serta dikombinasikan dengan program konsumsi pangan setempat.

Penganekaragaman konsumsi pangan kedepan akan memberi dorongan dan insentif pada penyediaan produk pangan yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi, termasuk produk pangan yang berbasis sumber daya lokal. Hal ini akan meningkatkan sisi permintaan terhadap bahan pangan lokal dan aneka olahannya. Untuk itu perlu diimbangi dengan pemantapan ketersediaan bahan pangan lokal. Mengingat keterbatasan daya simpan pangan lokal secara umum, maka perlu dikembangkan bisnis pangan lokal melalui tepung–tepungan.

PPH merupakan instrumen untuk menganalisis pola konsumsi pangan dan pengembangan pangan wilayah. Dari analisis PPH akan diketahui keberagaman pangan yang dikonsumsi dan kelompok bahan pangan yang kurang atau lebih dikonsumsi. Analisis digunakan untuk perencanaan konsumsi, ketersediaan dan produksi pangan. Pengembangan pangan wilayah ditujukan untuk peningkatan skor PPH disertai peningkatan ketersediaan dan produksi pangan. Tujuan akhir peningkatan skor PPH sebagai instrumen yang menunjukkan keberagaman jenis pangan dan mutu konsumsi pangan

## **BAB III**

### **KERANGKA KONSEP**

Konsumsi pangan rumah tangga merupakan salah satu faktor penentu tingkat kesehatan dan produktivitas rumah tangga. Dari sisi norma gizi terdapat standar minimum jumlah makanan yang dibutuhkan seorang individu agar dapat hidup sehat dan aktif beraktivitas. Dalam ukuran energi dan protein masing-masing dibutuhkan 2100 kkal/kap/hari dan 57 gr/kap/hari (AKG 2019). Kekurangan konsumsi bagi seseorang dari standar minimum tersebut akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan, aktivitas dan produktivitas kerja. Dalam jangka panjang kekurangan konsumsi pangan dalam jumlah dan kualitas (terutama pada anak balita) akan berpengaruh terhadap kualitas sumberdaya manusia.

Salah satu ukuran kuantitas konsumsi pangan adalah jumlah konsumsi energi atau konsumsi protein. Di Indonesia metode yang digunakan dalam menilai intake untuk kelompok orang/populasi adalah membandingkan intake zat gizi dari kelompok orang/populasi dengan intake zat gizi yang dianjurkan atau dikenal dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG). AKG merupakan kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi hampir semua orang menurut golongan semua umur, jenis kelamin, ukuran tubuh dan aktivitas untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Bila jumlah energi dan zat gizi yang dikonsumsi dibandingkan dengan AKG, akan menghasilkan suatu nilai yang disebut tingkat konsumsi pangan dan dinyatakan dalam persen. WKPG X tahun 2019 menganjurkan angka kecukupan konsumsi rata-rata penduduk Indonesia adalah 2100 kkal/orang/hari untuk energi dan 57 g untuk protein.

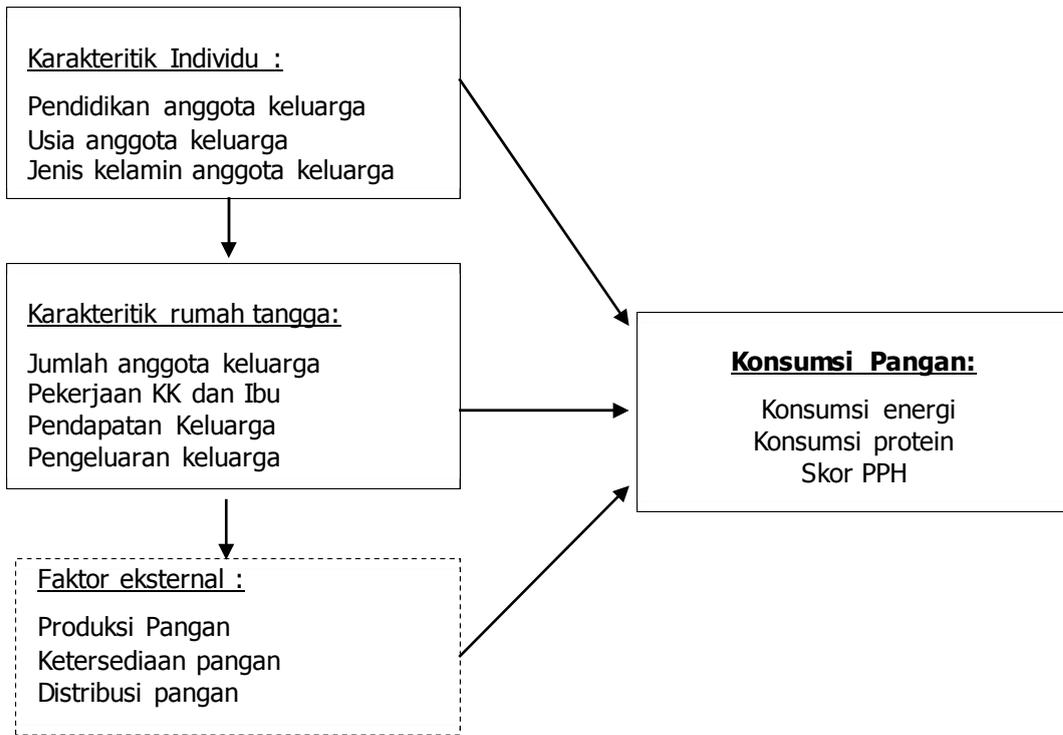
Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai indikator keanekaragaman konsumsi pangan secara kuantitas dan kualitas keberagaman (diversifikasi) konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah dapat ditunjukkan melalui skor PPH. PPH adalah jenis dan jumlah kelompok pangan utama yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan

zat gizi. PPH tidak hanya memenuhi kecukupan gizi, akan tetapi sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas, dan kemampuan daya beli. Pendekatan PPH dapat digunakan untuk menilai mutu pangan penduduk berdasarkan skor pangannya (dietary score). Situasi pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya ditunjukkan dengan semakin tingginya skor mutu pangan (Hardinsyah et al. 2001). Skor Pola Pangan Harapan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain faktor internal (individual) seperti pendapatan, preferensi, budaya dan religi serta pengetahuan gizi, maupun faktor eksternal seperti agro-ekologi, produksi, ketersediaan dan distribusi (Suryana 2008).

Menurut Widyanto (2007), bahwa jumlah anggota keluarga mempengaruhi pengeluaran konsumsi rumah tangga. Faktor yang berpengaruh terhadap Tingkat Kecukupan Energi (TKE) adalah jumlah anggota rumah tangga (Tanzihah et al. 2010). Jumlah anggota rumah tangga merupakan faktor yang mempengaruhi pola diversifikasi konsumsi pangan rumah tangga (Suyastri 2008). Jumlah anggota rumah tangga berkorelasi negatif dengan skor PPH yang memiliki makna semakin banyak jumlah anggota keluarga maka semakin rendah skor PPH. Hasil analisis Widyanto (2007) menyatakan pengeluaran konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pendapatan keluarga. Faktor yang berpengaruh terhadap Tingkat Kecukupan Energi (TKE) adalah pengeluaran perkapita (Tanzihah et al. 2010). Salah satu faktor yang mempengaruhi pola diversifikasi konsumsi pangan rumah tangga adalah pendapatan rumah tangga (Suyastri 2008). Menurut Cahyani (2008) pendapatan rumah tangga merupakan salah satu variabel yang memberikan pengaruh dominan terhadap skor PPH.

Menurut Hamid et al (2013) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pola konsumsi pangan rumah tangga baik kuantitas dan kualitasnya adalah pendidikan ibu rumah tangga. Hasil analisis Cahyani

(2008) pendidikan kepala rumah tangga merupakan salah satu variabel yang memberikan pengaruh dominan terhadap skor PPH. Menurut Asmara et al (2009) pendidikan ibu rumah tangga berpengaruh positif terhadap skor PPH. Bagan kerangka pemikiran analisis konsumsi pangan di Kabupaten Jombang Tahun 2022 ditampilkan dalam Gambar 3. 1.



Gambar 3.1. Kerangka Pemikiran Analisis Konsumsi Pangan di Kabupaten Jombang Tahun 2023

## **BAB IV**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **4.1 Desain penelitian**

Penelitian ini merupakan survei berskala wilayah, dengan disain potong lintang (cross-sectional), dilakukan dengan wawancara dan observasi, dan dianalisis secara deskriptif analitik.

#### **4.2 Tempat dan Waktu**

Penelitian konsumsi pangan berbasis PPH berlokasi di 63 desa terpilih dari 21 kecamatan di Kabupaten Jombang dengan rincian setiap kecamatan dipilih 3 desa yang dipilih secara acak, dengan mempertimbangkan belum pernah dilakukan survey serupa pada tiga tahun terakhir. Adapun data desa sampel penelitian dapat dilihat pada lampiran. Kecuali Kecamatan Kudu 1 desa diambil 4 dusun untuk memotret desa demapan Desa Made yaitu Dusun Waru, Ngembak, Tawang dan Kedungwatu. Pengumpulan Data dilakukan pada bulan September s/d November 2023.

#### **4.3 Populasi dan Sampel**

Populasi dalam survey konsumsi berbasis PPH ini adalah seluruh rumah tangga di Desa yang terpilih sebagai sampel. Besar sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 responden untuk setiap Desa ( ada 60 desa yang diambil 10 KK, ada 1 desa di Kecamatan Kudu 40 KK (untuk memotret desa Demapan) dan ada 2 desa disampling 5 KK, sehingga diperoleh sebanyak 630 sampel rumah tangga

Sampel adalah semua rumah tangga yang sudah dipilih dan semua anggota rumah tangga yang ada pada saat pengumpulan data survey konsumsi berbasis PPH berlangsung. Kriteria eksklusi adalah rumah tangga tidak diambil datanya bila tidak memungkinkan untuk dikunjungi karena berbagai kendala; dan rumah tangga serta anggota rumah tangga yang

menolak berpartisipasi dalam survey konsumsi pangan berbasis PPH Kabupaten Jombang. Pemilihan sampel dilakukan secara purposif dengan ketentuan setiap desa/kelurahan diambil sampel dipilih keluarga dengan kriteria dan jumlah sebagai berikut:

Keluarga dengan sosial ekonomi kategori kaya : 3 keluarga  
 Keluarga dengan sosial ekonomi kategori sedang : 4 keluarga  
Keluarga dengan sosial ekonomi kategori miskin : 3 keluarga  
 Jumlah total sampel setiap desa/kelurahan : 10 keluarga

#### 4.4 Variabel dan Definisi Operasional

Jenis data yang dikumpulkan secara lengkap dapat dilihat pada kuesioner, yaitu terdiri dari blok pertanyaan sebagai berikut:

Blok I : Keterangan wawancara  
 Blok II : Identitas keluarga dan sosial ekonomi  
 Blok IV : Konsumsi Makanan Keluarga Recall 2 x 24 Jam  
 Blok V : Rekapitulasi Konsumsi Makanan Keluarga selama 2 hari

Tabel 4.1 Definisi Operasional

No	Variabel	Penjelasan tentang variabel	Metoda pengukuran	Skala ukur	Pengkategorian
1	Zat Gizi	Diperoleh dari DKBM berdasarkan berat bahan makanan yang dikonsumsi	Analisis DKBM	Rasio	Rerata
2	Konsumsi Sereal	Berat bahan makanan kelompok sereal yang dikonsumsi keluarga	Wawancara	Rasio	Rerata
3	Konsumsi umbi-umbian	Berat bahan makanan kelompok umbi-umbian yang dikonsumsi	Wawancara	Rasio	Rerata
4	Konsumsi kacang-kacangan, biji	Berat bahan makanan kelompok kacang-kacangan yang dikonsumsi	Wawancara	Rasio	Rerata
5	Konsumsi sayuran/buah	Berat bahan makanan kelompok sayuran dan buah yang dikonsumsi	Wawancara	Rasio	Rerata
6	Konsumsi lauk hewani	Berat bahan makanan kelompok lauk hewani yang dikonsumsi	Wawancara	Rasio	Rerata

7	Konsumsi minyak, lemak	Berat bahan makanan kelompok minyak, lemak yang dikonsumsi	Wawancara	Rasio	Rerata
8	Konsumsi gula, sirup, konfeksionari	Berat bahan makanan kelompok gula, sirup, konfeksionari yang dikonsumsi	Wawancara	Rasio	Rerata
9	Asupan energi	Jumlah energi yang dikonsumsi	Perhitungan dengan DKBM	Rasio	Rerata, dan proporsi
10	Asupan protein	Jumlah protein yang dikonsumsi	Perhitungan dengan DKBM	Rasio	Rerata, dan proporsi
11	Tingkat Kecukupan Asupan Energi	Persentase asupan energi per orang per hari terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan. AKE yang digunakan adalah didasarkan Permenkes No 28 Tahun 2019	Perhitungan dengan AKG	Rasio	Rerata
12	Tingkat Kecukupan Asupan Protein	Persentase asupan protein per orang per hari terhadap Angka Kecukupan Protein (AKP) yang dianjurkan untuk setiap kelompok umur dan jenis kelamin. AKP yang digunakan adalah didasarkan Permenkes No 28 Tahun 2019	Perhitungan dengan AKG	Rasio	Rerata
13	Pendidikan	Jenis pendidikan formal tertinggi yang pernah di tempuh oleh suami dan istri sampai dengan saat dilakukan wawancara	Wawancara	Ordinal	1. TS 2. SD, 3. SLTP, 4. SLTA, PT.
14	Pekerjaan	Keterangan jenis pekerjaan utama berdasarkan alokasi waktu terbanyak untuk masing-masing anggota keluarga	Wawancara	Nominal	1. buruh, 2. petani, 3. pedagang/wiraswasta 4. PNS/TNI/Polri/Pamong 5. Swasta 6. IRT/Tdk Bekerja Lainnya
15	Umur	Umur adalah lamanya hidup responden yang diukur berdasarkan atau selisih antara tanggal lahir dengan tanggal survey	Wawancara	Interval	1. $\leq 30$ thn 2. 31 – 40 thn 3. 41 – 50 thn 4. 51 - 60 thn 5. $> 60$ thn
16	Jumlah anggota rumah tangga	banyaknya anggota klg yang masih menjadi tanggung- jawab responden dalam pemenuhan kebutuhan hidup.	Wawancara	Rasio	
17	Pendapatan keluarga	Penerimaan uang seluruh anggota keluarga yang dilihat dari besarnya pendapatan seluruh anggota keluarga	Wawancara	Nominal	1. $< 1$ jt 2. 1 s/d 2 jt 3. $>2$ s/d 3 jt 4. $> 3$ s/d 4 jt 5. $>4$ s/d 5 jt 6. $>5$ s/d 6 jt 7. $> 6$ jt
18	Proporsi Pengeluaran	Prosentase perbandingan pengeluaran untuk makan dibandingkan dengan total pengeluaran keluarga	Wawancara	Interval	1. $< 25\%$ 2. 25 – 50% 3. $>50 - 75\%$ 8. 4. $>75\%$

No	Variabel	Penjelasan tentang variabel	Metoda pengukuran	Skala ukur	Pengkategorian
19	Pola Pangan Harapan (PPH)	komposisi/susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak maupun relatif , yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya,	Perhitungan hasil Recall	Rasio	Rerata

#### 4.5 Tahapan Pelaksanaan Survey Konsumsi Pangan Wilayah.

Kegiatan survey konsumsi pangan, dibagi dalam tiga tahapan pokok, yaitu tahap persiapan, pengumpulan data, analisis dan pelaporan.

##### 4.5.1 Tahapan persiapan

4.5.1.1 Koordinasi dan pelatihan petugas survey (enumerator), dilaksanakan 1 kali, yang terbagi dalam 2 kelas dan 1 hari narasumber dari UPT. Laboratorium Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

4.5.1.2 Penetapan wilayah survey dilakukan di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Jombang, yaitu sebanyak 21 kecamatan. Tiap kecamatan diambil sebanyak 3 desa dan tiap desa diambil 10 KK untuk sampel, sehingga terkumpul sebanyak 630 sampel rumah tangga (pengecualian Kecamatan Kudu, Jombang dan Tembelang)

4.5.2 Pendistribusian instrument pengumpulan data, yaitu membagikan seluruh alat yang diperlukan dalam proses pengumpulan data di lapangan kepada para petugas data (enumerator). Beberapa instrument yang diperlukan dalam kegiatan pengumpulan data di lapangan adalah : Formulir Isian (terlampir) yang diperlukan untuk mencatat seluruh data-data yang harus dikumpulkan.

##### 4.5.3 Tahap Pengumpulan Data

- 4.5.3.1 Pengumpulan data tingkat wilayah
- 4.5.3.2 Pengumpulan data keluarga
- 4.5.4 Tahap Pengolahan Data
  - 4.5.4.1 Rekapitulasi dan Editing Data.
  - 4.5.4.2 Entri dan Cleaning Data
- 4.5.5 Tahap Pelaporan
  - 4.5.5.1 Analisis Data
  - 4.5.5.2 Penyusunan Laporan

## **4.6 Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data Survey Konsumsi Pangan**

Berdasarkan sumbernya data survey konsumsi dibagi menjadi 2 yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen atau sumber resmi instansi pemerintah, dengan cara inventaris buku, laporan atau publikasi lainnya yang tersedia di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dan atau observasi langsung.

1. Pengumpulan data tingkat wilayah, adalah data sekunder dan atau primer yang merupakan hasil agregat, summary atau representative di tingkat wilayah pada tiap level yang mencakup : profil wilayah, konversi URT dan harga pangan berlaku. Data profil wilayah kabupaten yang dikumpulkan mencakup data : nama wilayah, jumlah dan pertumbuhan penduduk, jumlah total KK dan %KK miskin, jumlah total penduduk dan % penduduk miskin di tingkat wilayah, total jumlah kecamatan/desa dan sebaran jumlah kecamatan/desa. Data tersebut diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai sumber informasi statistik resmi dan terbaru yang dikeluarkan oleh dinas/instansi terkait di masing tingkat wilayah. Data konversi berat URT dan harga pangan yang perlu dikumpulkan mencakup data: jenis pangan, satuan URT dan berat gram.

2. Pengumpulan data keluarga, adalah data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dan atau observasi langsung terhadap keluarga sampel, yang mencakup: identitas keluarga, karakteristik anggota, karakteristik ekonomi dan konsumsi pangan keluarga sampel.

## **4.7 Pengolahan Dan Analisis Data Survey Konsumsi Pangan Wilayah.**

### **4.7.1 Rekapitulasi dan Editing Data.**

Pengolahan data adalah rangkaian kegiatan pengolahan data yang dilakukan secara sistematis dan metodologis dalam rangka mempersiapkan data agar dapat dianalisis dan digunakan sesuai tujuan yang ingin dicapai melalui analisis data. Tahapan pertama yang harus dilakukan setelah semua data terkumpul dan semua instrument terisi dengan baik adalah rekapitulasi. Editing data merupakan suatu proses pengolahan data dalam rangka mempersiapkan data sebelum data dientri dan dianalisis lebih lanjut, yang meliputi: pengecekan ulang formulir dan kuesioner serta penyesuaian dan penyeragaman nilai terhadap semua sumber data. Editing bertujuan untuk menghindari adanya kekeliruan data diakibatkan oleh kesalahan pencatatan, perbedaan unit atau satuan data, kesalahan konversi dan berbagai kesalahan teknis pengumpulan dan pencatatan data oleh petugas.

### **4.7.2 Entri dan Cleaning Data**

Agar pengolahan dan analisis data dapat dilakukan secara akurat dan komprehensif diperlukan alat bantu yang sistematis dan praktis. Dalam rangka mendukung hal tersebut, saat ini telah dikembangkan suatu aplikasi komputer analisis situasi dan kebutuhan konsumsi pangan wilayah-kabupaten untuk membantu

dalam mengelola data hasil survey konsumsi pangan wilayah, baik pada tahap penyiapan data, manipulasi variable maupun tahap manipulasi tabel dengan Software Microsoft office excel 2013.

Agar menghasilkan data yang akurat dilakukan cleaning terhadap data hasil entri. Cleaning data adalah suatu proses check and recheck terhadap nilai-nilai data pada data hasil entri data sebelumnya. Proses cleaning data sangat berguna agar dapat memenuhi asumsi dan persyaratan dasar suatu analisis statistik yang akan digunakan dengan tujuan meningkatkan keakuratan dan kekuatan analisis maupun taraf signifikansi hasil analisis statistik tersebut. Cleaning data difokuskan pada manipulasi terhadap nilai-nilai oleh ketidakrelevanan variabel.

#### 4.7.3 Analisis Data

Analisis data hasil survey konsumsi, menggunakan Software Aplikasi Computer yang telah dikembangkan, sehingga dapat menganalisis data dan menyajikan informasi pola konsumsi, proyeksi kebutuhan dan target penyediaan pangan wilayah dengan pendekatan pola pangan harapan. Data konsumsi pangan hasil survey dikelompokkan bahan makanan menjadi 9 kelompok, yaitu:

Tabel Pengelompokan Bahan Pangan pada Analisis Pola Pangan Harapan di Kabupaten Jombang Tahun 2023

No	Kelompok Pangan	Contoh Bahan Pangan
1	Padi-padian	Beras, jagung, terigu
2	Umbi-umbian	Ubi Kayu, Ubi Jalar, kentang, talas, sagu dan umbi lainnya.
3	Pangan Hewani	Daging, telur, susu, ikan
4	Minyak dan Lemak	Minyak kelapa, minyak lainnya (minyak goreng, minyak jagung, margarin)
5	Buah/Biji berminyak	Kelapa, kenari, kemiri, jambu mete dan coklat

6	Kacang-kacangan	Kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah dan kacang lainnya.
7	Gula	Gula pasir, gula merah
8	Sayur dan Buah	Semua jenis sayuran dan buah-buahan
9	Lain-lain	Bumbu-bumbuan, makanan dan minuman yang mengandung alkohol, teh, kopi, sirup, dll.

Data yang telah dikelompokkan tersebut selanjutnya akan dibandingkan antara skor konsumsi pangan aktual dengan skor sasaran pola konsumsi pangan tahun 2023 dan sasaran PPH Nasional apakah sudah sesuai atau belum dengan susunan pola konsumsi pangan yang diharapkan, dan selanjutnya dilakukan analisa secara deskriptif.

#### 4.7.4 Penyusunan Laporan

Akurasi hasil analisis data yang terutama ditentukan oleh factor reliabilitas dan validitas dan selama proses pengumpulan dan pengelolaan data sangat menentukan kualitas hasil analisis data. Selain dipengaruhi oleh factor akurasi analisis data, kualitas informasi yang dihasilkan sangat ditentukan pula oleh relevansi hasil analisis data. Oleh karena itu manfaat dan kegunaan hasil analisis data pada akhirnya sangat ditentukan oleh kemampuan petugas dalam menyajikan dan menginterpretasikan seluruh hasil analisis data yang relevan dengan tujuan pelaksanaan survey.

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Keadaan Umum Wilayah Kabupaten Jombang**

##### **5.1.1. Situasi Geografis dan Iklim**

Kabupaten Jombang di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Jombang, sebelah Selatan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang, sebelah Barat dengan Kabupaten Nganjuk, dan sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Kabupaten Jombang memiliki posisi yang sangat strategis, karena berada di persimpangan jalur lintas utara, dan selatan Pulau Jawa (Surabaya-Madiun-Solo-Yogyakarta), jalur Surabaya-Tulungagung, serta jalur Malang-Tuban.

Luas wilayah seluruhnya mencapai 1.159,50 km<sup>2</sup> dimana secara geografis Kabupaten Jombang berada pada sebelah Selatan garis khatulistiwa, tepatnya pada 112° 03' 45" sampai 112° 27' 21" Bujur Timur dan 07° 20' 37" sampai dengan 07° 46' 45" Lintang Selatan. Ibu kota kabupaten yakni Kecamatan Jombang, terletak pada ketinggian 44 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan pantauan dari Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang. Rata-rata hari curah hujan tertinggi terjadi di bulan yaitu 17,08 hari hujan dan 390,68 mm intensitas hujan, dan yang terendah pada bulan Juli yaitu 0,88 hari hujan dan 8,08 mm intensitas hujan.

Sebagian besar kondisi permukaan tanah di Kabupaten Jombang, tepatnya 67,71 persen dari total luas keseluruhan, terletak pada permukaan yang datar dengan kemiringan antara 0° sampai 2°. Permukaan yang relatif datar mempermudah terjadinya berbagai aktivitas. Untuk kemiringan tanah yang paling curam, yakni di atas 40° hanya sebesar 6,97 persen.

### **5.1.2. Pemerintahan Kabupaten Jombang**

Secara teritorial Kabupaten Jombang dibagi menjadi 21 kecamatan. Kecamatan termuda di Jombang adalah Kecamatan Ngusikan yang merupakan pecahan dari Kecamatan Kudu yang memisahkan diri pada tahun 2001. Di bawah level kecamatan masih terbagi lagi menjadi 306 wilayah yang lebih kecil, yakni 302 desa dan 4 kelurahan. Keempat kelurahan tersebut hanya terdapat di Kecamatan Jombang.

Pemerintahan ditinjau dari sisi legislatif, yakni keanggotaan dalam DPRD, terdiri dari sepuluh partai. Partai PDI-P memiliki wakil terbanyak di kursi legislatif Kabupaten Jombang yaitu sebanyak 10 orang. Kemudian disusul PKB dengan 8 orang perwakilan. Secara keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Jombang adalah sebanyak 50 orang yang terdiri dari 12 orang wanita dan 38 pria.

Pada tahun 2022, jumlah PNS sebanyak 7.989 orang. Menurut golongan kepangkatan 29,23 persen golongan IV, 52,41 persen golongan III, 17,57 persen golongan II, dan hanya 0,79 persen golongan I. Berdasarkan tingkat Pendidikan sebagian besar PNS di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Jombang merupakan lulusan Perguruan Tinggi (S1,S2,S3) yaitu 64,80%, Lulusan Diploma I/II/III 18,30 %, Lulusan SLTA 15,13 % , Lulusan SLTP ke bawah 1,76 %. Hal ini tentu saja menimbulkan harapan bahwa kinerja pemerintahan akan mengalami peningkatan sejalan dengan makin banyaknya PNS yang berpendidikan tinggi.

### **5.1.3. Kependudukan dan Ketenagakerjaan**

Berdasarkan bentuk piramida penduduk, piramida penduduk Kabupaten Jombang membentuk piramida penduduk muda namun telah mengarah ke bentuk piramida penduduk stasioner. Hal ini menandakan

adanya perlambatan dalam pertumbuhan penduduk. Perlambatan penduduk merupakan salah satu goal pemerintah dalam menekan pertumbuhan penduduk.

Pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Jombang berdasarkan proyeksi SP2020 adalah 1.325.914 jiwa. Kepadatan penduduk 1.144 jiwa/km<sup>2</sup>, Kecamatan Jombang merupakan kecamatan terpadat dengan angka kepadatan penduduk 3.837 jiwa/km<sup>2</sup>. Berdasarkan kelompok usia jumlah penduduk dengan usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 69.88% atau 926.672 jiwa, usia (0-14 tahun) sebanyak 22,37 % atau 296.633 jiwa dan >65 tahun sebanyak 7,74% atau 102.609 jiwa. Masih sama seperti tahun lalu, para peserta KB di Kabupaten Jombang lebih memilih menggunakan non metode kontrasepsi jangka panjang. (MKEJ). Tercatat sejumlah 159.696 peserta menggunakan non MKEJ, dengan metode suntik yang paling banyak diminati. Biaya KB dengan suntik memang relatif terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, suntik KB memiliki waktu efektif satu bulan sampai tiga bulan. Kelebihan ini yang membuat masyarakat pada umumnya lebih memilih menggunakan suntik KB.

Angkatan kerja yang bekerja di Kabupaten Jombang pada tahun 2022 sebagian besar adalah buruh/ karyawan atau pegawai mencapai 39,10 %, yang kedua berusaha sendiri/wiraswasta sebesar 20,36 % dan yang ketiga buruh tidak tetap sebesar 13,56%. Dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50% penduduk yang telah memasuki usia kerja telah aktif dalam kegiatan ekonomi.

#### **5.1.4. Kualitas Sumber Daya Manusia**

Metode penghitungan angka IPM kini telah disempurnakan. Penghitungan ini dibangun melalui tiga dimensi, yaitu kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup layak. Untuk mengetahui dimensi

kesehatan digunakan ukuran angka harapan hidup ( $e^0$ ). Dimensi pengetahuan dihitung dari angka harapan lama sekolah /expected years of schooling (EYS) dan rata-rata lama sekolah/mean years of schooling (MYS). Kemudian untuk standar hidup layak, digunakan ukuran pengeluaran perkapita yang disesuaikan. IPM Kabupaten Jombang tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1. IPM Kabupaten Jombang Tahun 2018 - 2022

Tahun	IPM Kab. Jombang	IPM Jawa Timur
2018	71,86	70,71
2019	72,85	71,5
2020	72,93	71,71
2021	73,45	72,14
2022	74,05	72,75

Dari data tersebut menunjukkan IPM Kab. Jombang tertinggi pada tahun 2022, dan masih lebih tinggi dari IPM rata-rata Jawa Timur.

Sedangkan angka harapan Hidup Masyarakat Kabupaten Jombang dibanding rata-rata Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2. Angka Harapan Hidup Kab Jombang tahun 2018 - 2022

Tahun	Kab. Jombang	Jawa Timur
2018	72,04	70,97
2019	72,27	71,18

2020	72,40	71,38
2021	72,49	71,38
2022	72,86	69,81 (laki-laki) 73,71 (Wanita)

Dari tabel tersebut menunjukkan Angka Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Jombang dari tahun ke tahun ada peningkatan dan lebih tinggi dari angka harapan hidup rata-rata Jawa Timur.

#### **5.1.5. Harga Kebutuhan Pokok dan Pengeluaran Penduduk**

Jika dilihat dari komposisi pengeluaran perkapita sebulan, dapat dilihat bahwa penduduk Jombang menghabiskan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan makanan. Dari rata-rata pengeluaran penduduk Jombang yang mencapai nilai 1.044.858 rupiah, lebih dari setengahnya atau sekitar 52.66 persen adalah untuk belanja kebutuhan makanan, dan 47.34% belanja non makanan. Namun demikian proporsi Antara pengeluaran makanan dan non makanan tidak terlalu terpaut jauh.

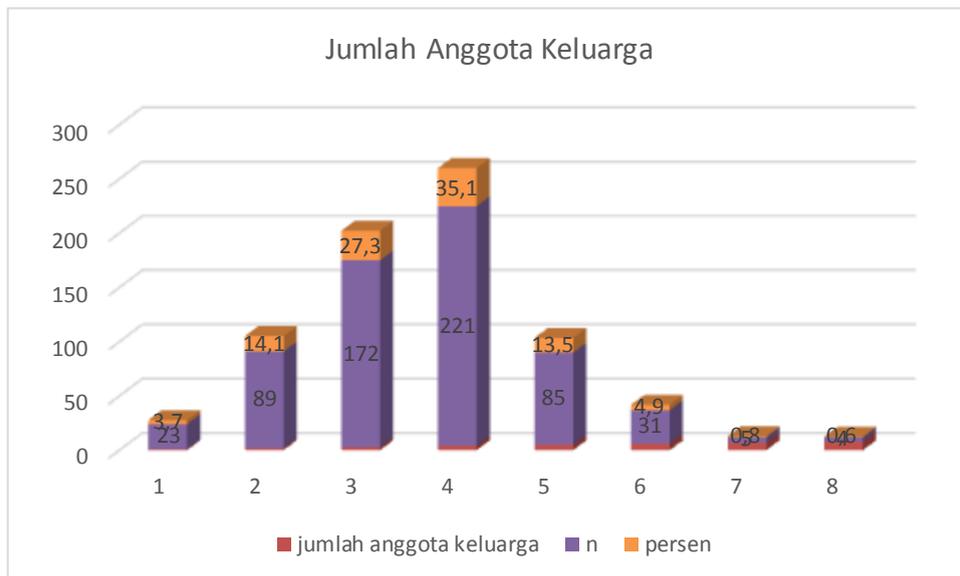
Jika diteliti lebih lanjut khususnya pada jenis pengeluaran untuk makanan, dapat dilihat bahwa konsumsi terbesar masyarakat Jombang adalah untuk membeli makanan dan minuman jadi. Konsumsi makanan jadi menghabiskan 33,46 persen dari biaya konsumsi makanan. Hal ini berarti masyarakat memiliki dana yang cukup berlebih menikmati menu- menu sajian di penyedia makanan minuman yang notabene lebih praktis daripada jika membuat sendiri di rumah. Fenomena ini juga bisa berarti bahwa gaya hidup modern yang praktis lebih diminati.

Konsumsi rokok dan tembakau mempunyai porsi terbesar kedua dalam pengeluaran masyarakat Jombang setelah makanan dan minuman jadi yaitu 11,82 persen. Kemudian di tempat ketiga adalah konsumsi padi-padian yang mencapai 10,99 persen dari total pengeluaran makanan.

Rata-rata konsumsi Kalori per Kapita menurut kelompok Komoditas makanan berdasarkan susenas adalah 2100 kkal.kapita /hari. Protein 58,6 g/kapita /hari dan PPH 95,2.

## 5.2 Analisis Data Karakteristik Sosial Ekonomi Keluarga Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data tentang karakteristik keluarga dapat dijelaskan bahwa jumlah keluarga paling banyak mencapai 8 orang dan paling sedikit 1 orang . Sedangkan berdasarkan kategorinya dapat dijelaskan pada grafik berikut ini

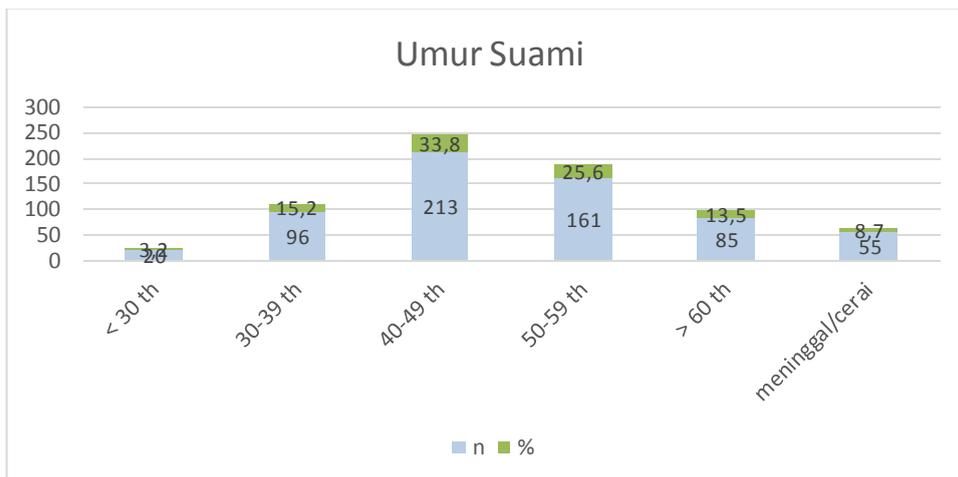


Grafik 5.1.  
Jumlah Anggota Keluarga Responden, Kegiatan Survey Konsumsi Pangan Wilayah Kab. Jombang Tahun 2023.

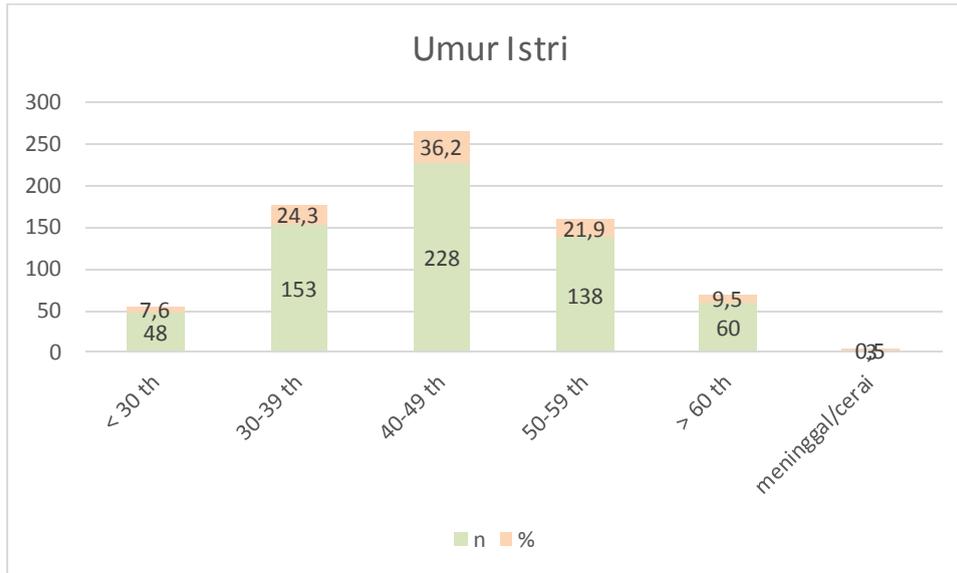
Grafik 5.1 tersebut menjelaskan bahwa sebanyak 35,1% responden yang diteliti pada survey konsumsi pangan berbasis PPH Tahun 2023 di Kabupaten Jombang mempunyai jumlah keluarga 4 orang dan sebanyak 27,3% jumlah anggota keluarga 3 orang dan bahkan ditemukan beberapa keluarga yang disurvei mempunyai anggota keluarga 7 orang sebesar 0,8 % dan jumlah anggota 8 orang sebanyak 0.6%.

Jumlah anggota keluarga mempengaruhi tingkat pendapatan suatu keluarga karena dapat menambah ataupun mengurangi pendapatan suatu keluarga. Jumlah anggota keluarga kemungkinan dapat meningkatkan pendapatan karena kian besar jumlah anggota keluarga makin besar pula jumlah anggota keluarga yang ikut bekerja untuk menghasilkan pendapatan tetap. Kemungkinan juga terjadi bahwa jumlah anggota keluarga yang besar tidak menambah pendapatan karena makin besar jumlah anggota keluarga mengakibatkan bertambahnya kesibukan orang tua untuk mengurus anaknya

Jumlah anggota keluarga yang semakin besar tanpa diimbangi dengan meningkatnya pendapatan akan menyebabkan pendistribusian konsumsi pangan akan semakin tidak merata. Pangan yang tersedia untuk suatu keluarga besar mungkin hanya cukup untuk keluarga yang besarnya setengah dari keluarga tersebut. Keadaan yang demikian tidak cukup untuk mencegah timbulnya gangguan gizi pada keluarga besar. Menurut Berg (1986) bahwa anak yang mengalami gizi kurang pada keluarga beranggota banyak, lima kali lebih besar dibandingkan dengan keluarga beranggota sedikit.



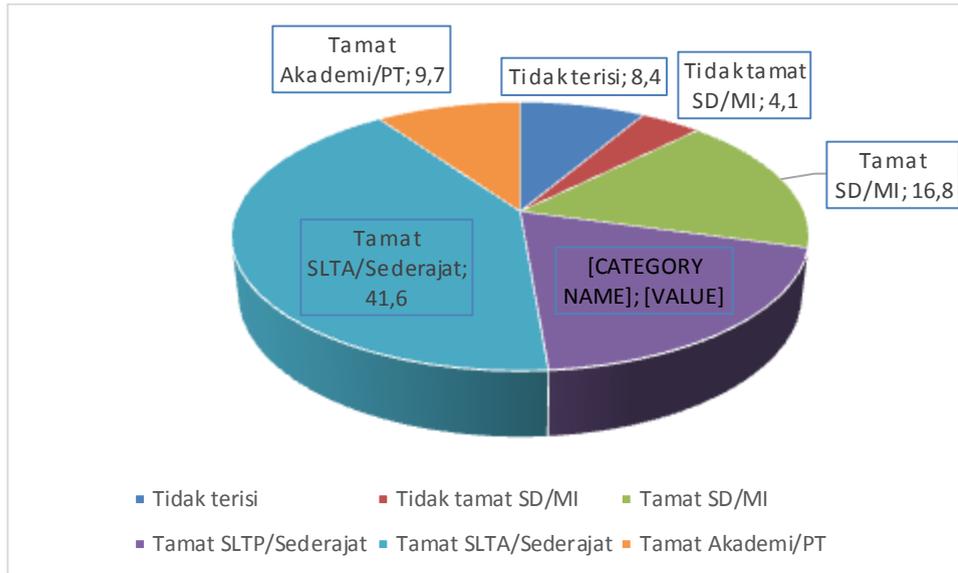
Graik 5.2.a  
Distribusi Kelompok Umur Kepala Keluarga pada Survey Konsumsi Pangan Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2023.



**Grafik 5.2.b**  
 Distribusi Kelompok Umur Istri pada Survey Konsumsi Pangan Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2023.

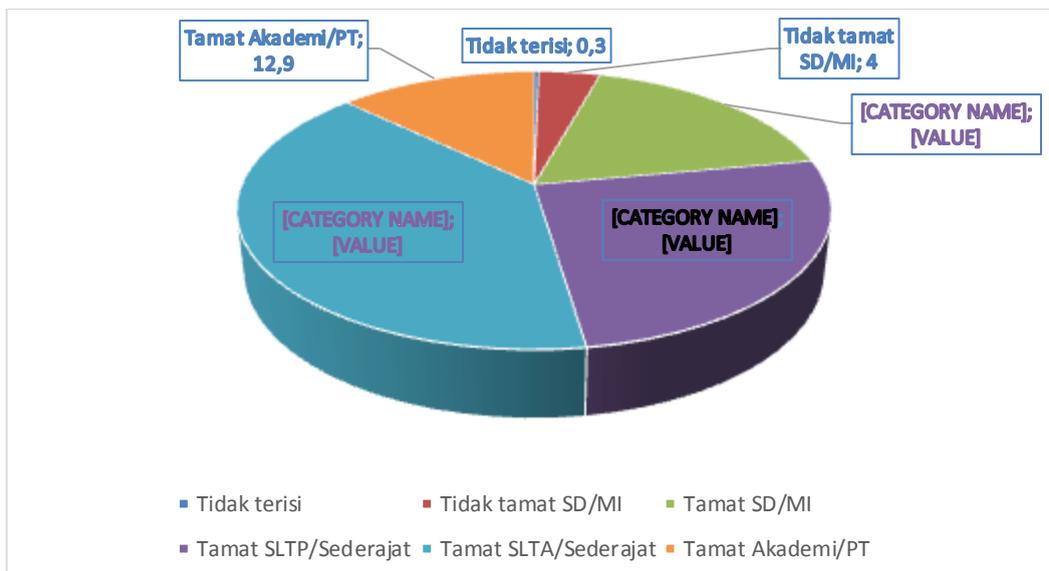
Grafik tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kepala keluarga yang menjadi sampel dalam survey konsumsi pangan wilayah berbasis PPH berusia antara 40–49 yaitu 33,8 % dan suami yang berusia 50-59 tahun sebanyak 25,6%, sedangkan sebagian besar juga berusia antara 40 – 49 tahun dan 30 – 39 tahun, yaitu masing-masing sebanyak 34,8 % dan 24,3.

Gambaran tingkat pendidikan kepala keluarga dan ibu rumah tangga yang menjadi sampel dalam survey konsumsi pangan wilayah berbasis PPH di Kabupaten Jombang pada Tahun 2023 dapat digambarkan pada grafik berikut ini :



Grafik 5.3a. Distribusi Tingkat Pendidikan KK Responden pada Survey Konsumsi Pangan Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2023

Grafik tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar pendidikan Kepala Keluarga di Kabupaten Jombang sudah cukup baik, yaitu tamat SMA dan SMP Sederajat. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dari 630 orang keluarga yang diteliti, didapatkan sebanyak 41,6% kepala keluarga sudah lulus SMA atau sederajat dan 19,4 % lulus SMP / sederajat dan ada 9,7 % lulus Perguruan Tinggi. Sedangkan pendidikan istri responden sebagai berikut :



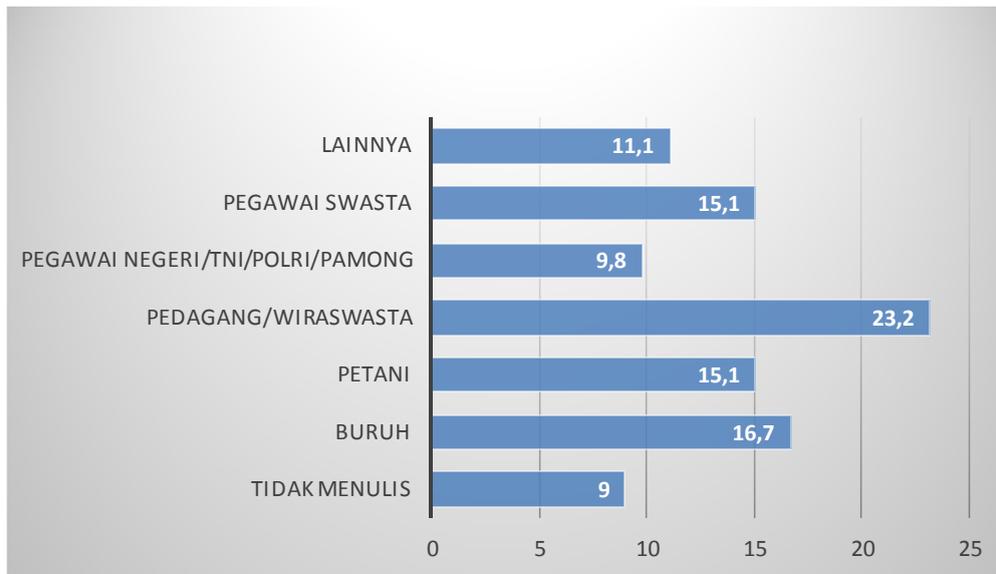
Grafik 5.3b. Distribusi Tingkat Pendidikan Istri Responden pada Survey Konsumsi Pangan Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2023

Pada tabel 5.3b menunjukkan bahwa Sebagian besar istri/ibu mempunyai tingkat Pendidikan SMA yaitu sebesar 39,5 %, dan 25,6 % lulus SMP, dan ada 12,9 % yang lulus Perguruan Tinggi.

Keadaan tersebut diharapkan akan berdampak pada kemampuan ibu dalam pengolahan makanan. Ibu merupakan pendidik pertama dalam keluarga, untuk itu ibu perlu menguasai berbagai pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan ibu di samping merupakan modal utama dalam menunjang perekonomian rumah tangga juga berperan dalam pola penyusunan makanan untuk rumah tangga.

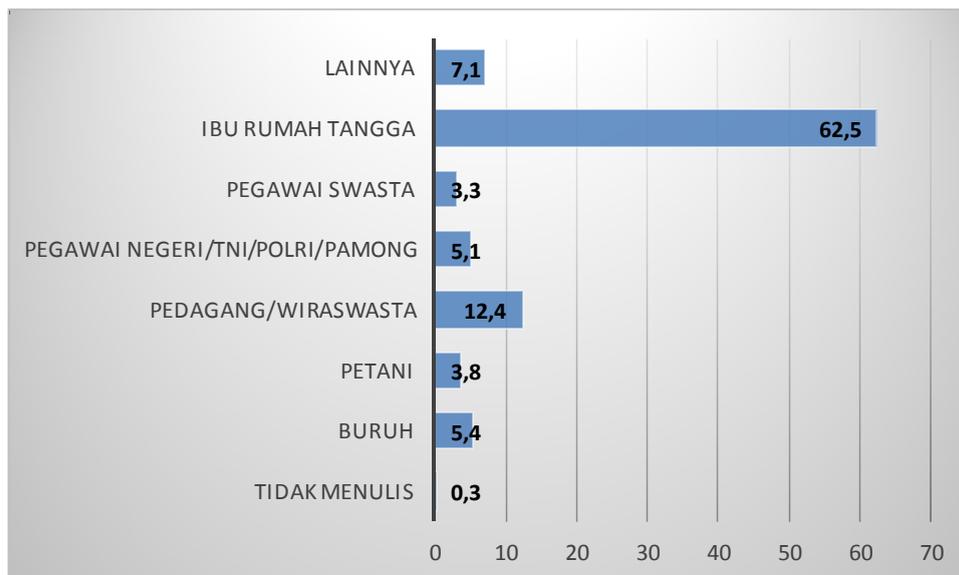
Tingkat pendidikan akan mempengaruhi konsumsi melalui pemilihan bahan pangan. Orang yang berpendidikan lebih tinggi cenderung memilih makanan yang lebih baik dalam jumlah dan mutunya dibandingkan mereka yang berpendidikan lebih rendah Tetapi hasil penelitian lain menyatakan bahwa tingkat pendidikan umum yang lebih tinggi tanpa disertai dengan pengetahuan di bidang gizi terutama ibu, ternyata tidak berpengaruh terhadap pemilihan makanan untuk keluarga (Sediaoetama, 1996). Sedangkan pekerjaan suami istri keluarga dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 5.4 a. dan 5.4b, menggambarkan bahwa sebagian besar kepala keluarga pedagang/wirasasta, yaitu asing sebesar 23,2 %, dan 16,7% sebagai buruh, petani dan pegawai swasta masing-masing 15,1% . sedangkan istri responden yang banyak sebagai ibu rumah tangga yaitu 62,5 %.



Grafik 5.4a.

Distribusi Jenis Pekerjaan KK pada Survey Konsumsi Pangan Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2023

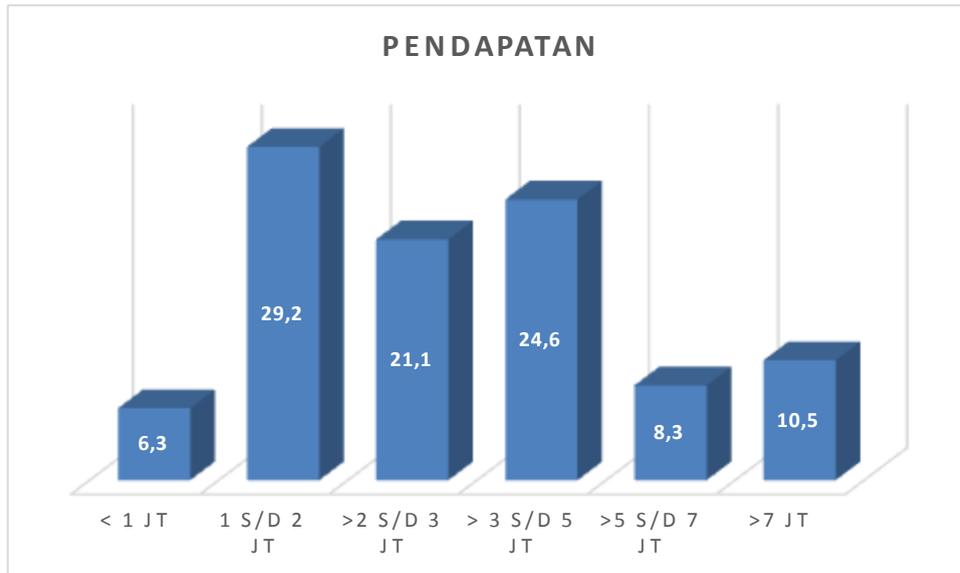


Grafik 5.4b.

Distribusi Jenis Pekerjaan Istri Responden pada Survey Konsumsi Pangan Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2023

Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa lebih dari separuh responden tepatnya 76,7% yang menjadi sampel dalam survey konsumsi pangan berbasis PPH di Kabupaten Jombang pada Tahun 2023 mempunyai pendapatan 1 - 2 juta (29,2%), pendapatan 3 - 5 juta

( 24,6 % ) tetapi ada juga masyarakat yang mempunyai pendapatan cukup tinggi (>7 juta perbulan) sebesar 10,5 %.

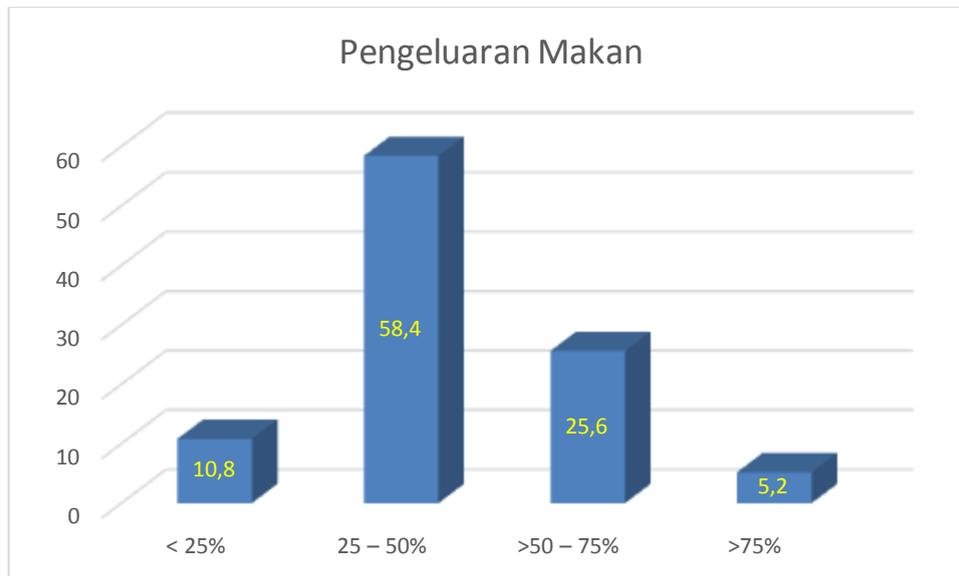


Grafik 5.5.  
Pendapatan Keluarga Berdasarkan Survey Konsumsi Pangan Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2023.

Pendapatan keluarga adalah jumlah semua hasil perolehan yang didapat oleh anggota keluarga dalam bentuk uang sebagai hasil pekerjaannya. Sajogjo (1994) menyatakan bahwa pendapatan keluarga meliputi penghasilan ditambah dengan hasil lain. Pendapatan keluarga mempunyai peran yang penting terutama dalam memberikan efek terhadap taraf hidup mereka. Efek disini lebih berorientasi pada kesejahteraan dan kesehatan, dimana perbaikan pendapatan akan meningkatkan tingkat gizi masyarakat. Pendapatan akan menentukan daya beli terhadap pangan dan fasilitaslain (pendidikan, perumahan, kesehatan, dll) yang dapat mempengaruhi status gizi.

Pendapatan keluarga adalah jumlah semua hasil perolehan yang didapat oleh anggota keluarga dalam bentuk uang sebagai hasil pekerjaannya. Sajogjo (1994) menyatakan bahwa pendapatan keluarga meliputi penghasilan ditambah dengan hasil lain. Pendapatan keluarga mempunyai peran yang penting terutama dalam memberikan efek terhadap

taraf hidup mereka. Efek disini lebih berorientasi pada kesejahteraan dan kesehatan, dimana perbaikan pendapatan akan meningkatkan tingkat gizi masyarakat. Pendapatan akan menentukan daya beli terhadap pangan dan fasilitas lain (pendidikan, perumahan, kesehatan, dll) yang dapat mempengaruhi status gizi.



Grafik 5.6.

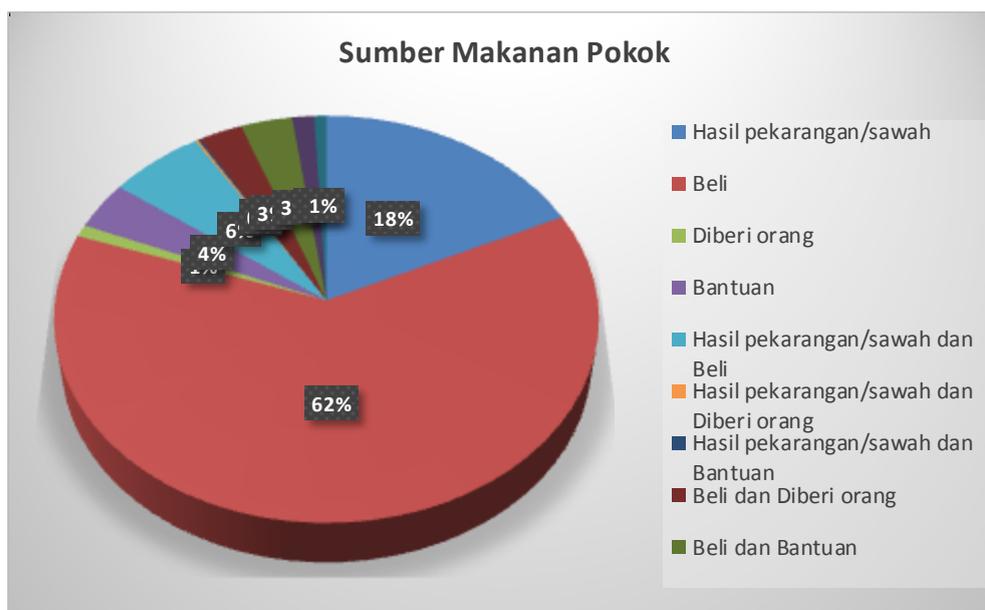
Pengeluaran Keluarga untuk Pangan Berdasarkan Survey Konsumsi Pangan Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2023

Berdasarkan nilai grafik tersebut diatas tampak bahwa proporsi pengeluaran untuk makan bagi keluarga di Kabupaten Jombang Sebagian besar (58,4%) antara 25-50% dibandingkan dengan total pengeluaran sebulan keluarga. Pada masyarakat miskin, sebagian besar pengeluaran keluarga digunakan untuk keperluan makan dibandingkan dengan pengeluaran yang lain.

Ernest Engel (1857 dalam BPS, 2014) bahwa persentase pengeluaran untuk makan akan menurun sejalan dengan meningkatnya pendapatan. Oleh karena itu komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan sebagai indikator untuk kesejahteraan penduduk. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, maka

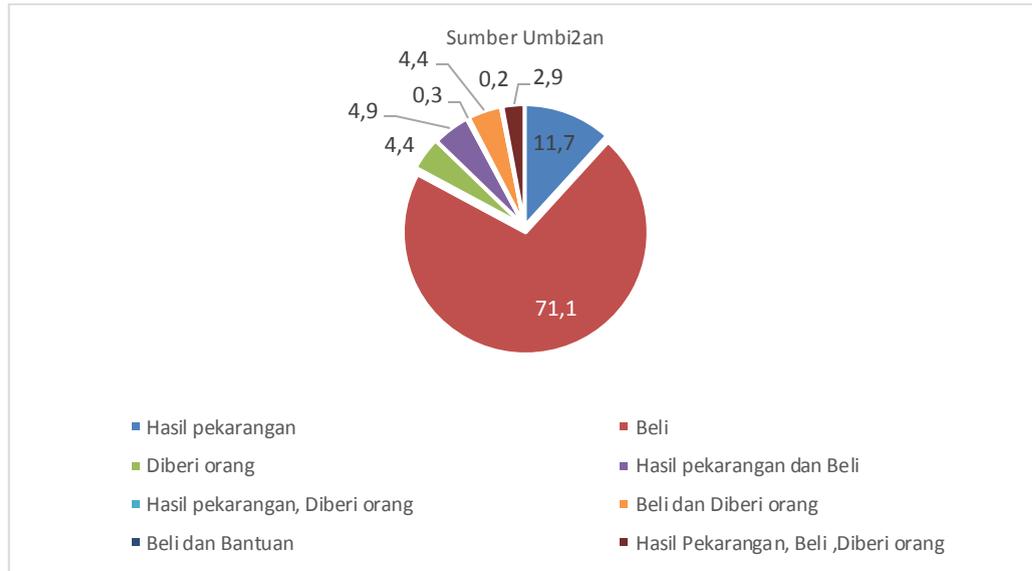
semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Teori konsumsi Keynes dalam bukunya yang berjudul *The General Theory of Employment, Interest and Money* menjelaskan adanya hubungan antara pendapatan yang diterima saat ini (pendapatan disposable) dengan konsumsi yang dilakukan saat ini juga. Dengan kata lain pendapatan yang dimiliki dalam suatu waktu tertentu akan mempengaruhi konsumsi yang dilakukan oleh manusia dalam waktu itu juga. Apabila pendapatan meningkat maka konsumsi yang dilakukan juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya (Pujoharso, 2013).

Berdasarkan sumber makanan yang dikonsumsi keluarga adalah sebagai berikut. Dari tabel 5.7a. menunjukkan bahwa mayoritas sumber makanan pokok dari pembelian 62% (tahun 2022 sebesar 67,5%), yang dari hasil pekarangan atau sawah hanya 18% (tahun 2022 sebesar 23,2%).



Grafik 5.7a.

Sumber Makanan Pokok yang Biasa Dikonsumsi Keluarga Berdasarkan Survey Konsumsi Pangan Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2023.

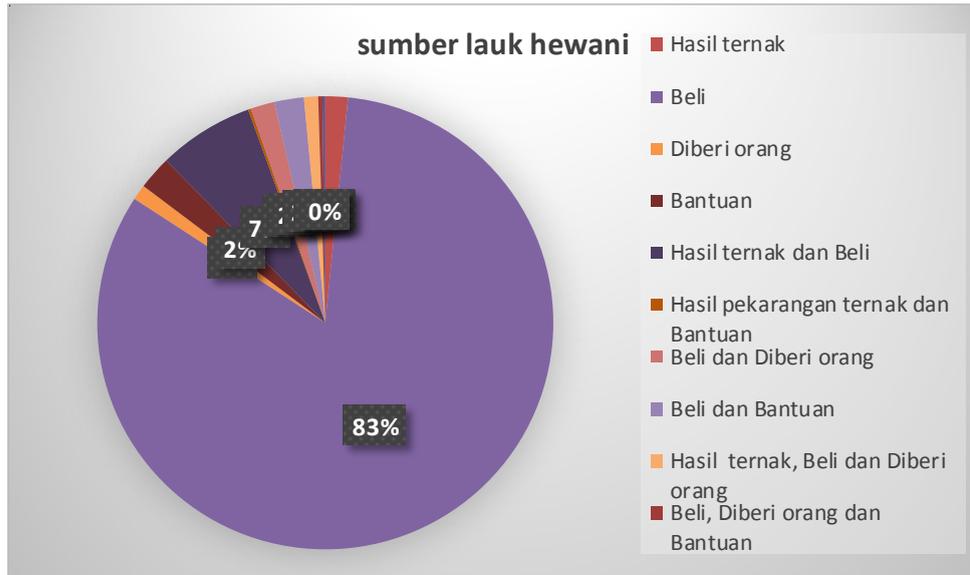


Grafik 5.7b.

Sumber Umbi-Umbian yang Biasa Dikonsumsi Keluarga Berdasarkan Survey Konsumsi Pangan Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2023.

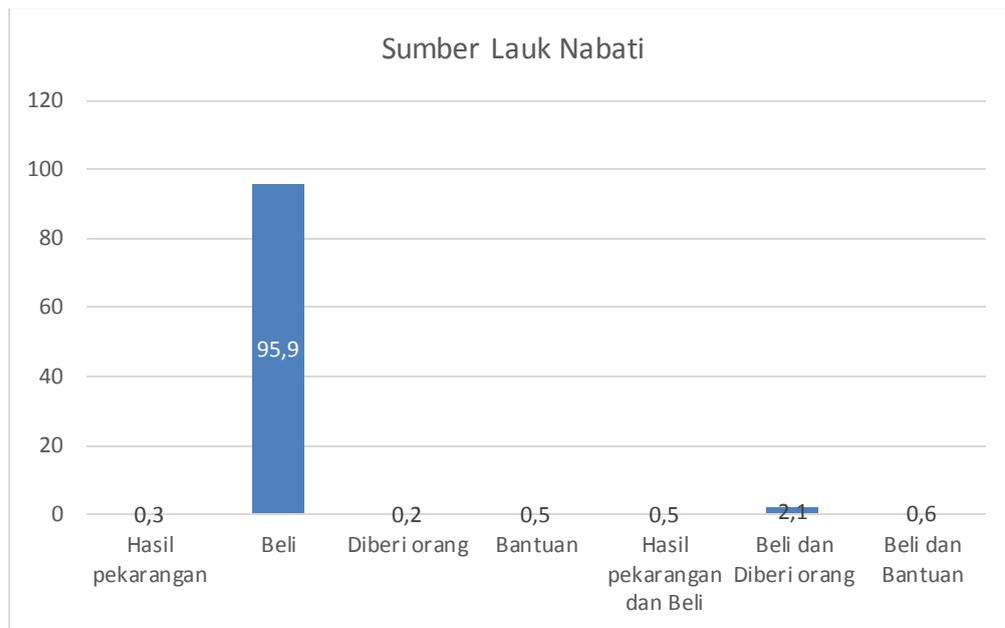
Sedangkan tabel 5.7.b, menunjukkan bahwa mayoritas umbi-umbian berasal dari pembelian yaitu 71,1% (85,1% pada tahun 2022), sedangkan yang berasal dari sawah/pekarangan hanya 11,7 % (9,5% pada tahun 2022). Fenomena ini menunjukkan bahwa lahan pertanian yang cukup luas belum mampu dioptimalkan untuk konsumsi keluarga atau hasil panennya cenderung dijual dibanding untuk konsumsi sendiri.

Dari grafik 5.7c. menunjukkan lauk hewani yang dikonsumsi oleh masyarakat Jombang mayoritas dari membeli yaitu 94% (tahun 2023 sebesar 94%), sedang yang dari hasil ternak hanya 1,1% (tahun lalu 2,5 %), dan dari bantuan 0,5%. Hal ini menunjukkan belum banyak masyarakat yang mengoptimalkan hasil ternaknya untuk konsumsi sendiri, atau banyak masyarakat yang tidak menekuni bidang peternakan bahkan mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu.



Grafik 5.7c.

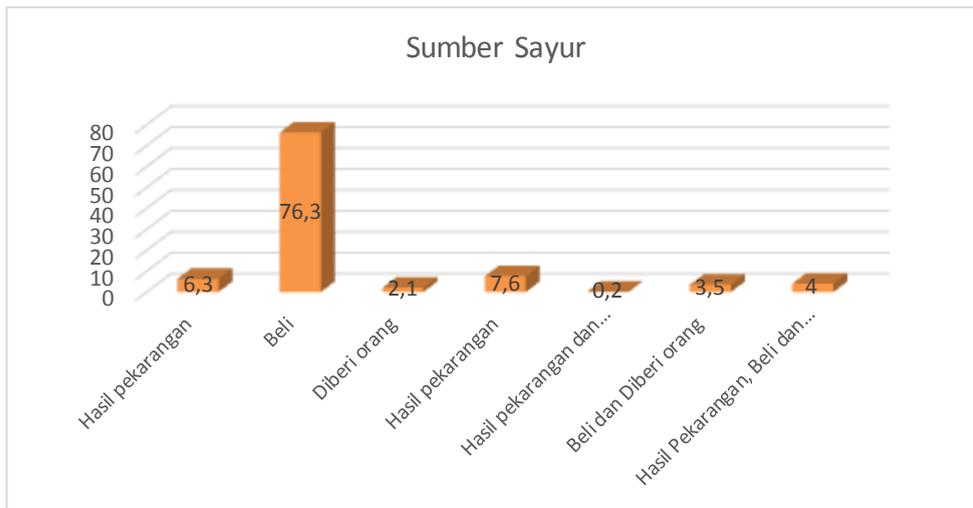
Sumber Lauk Hewani yang Biasa Dikonsumsi Keluarga Berdasarkan Survey Konsumsi Pangan Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2023.



Grafik 5.7d.

Sumber Lauk Nabati yang Biasa Dikonsumsi Keluarga Berdasarkan Survey Konsumsi Pangan Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2023.

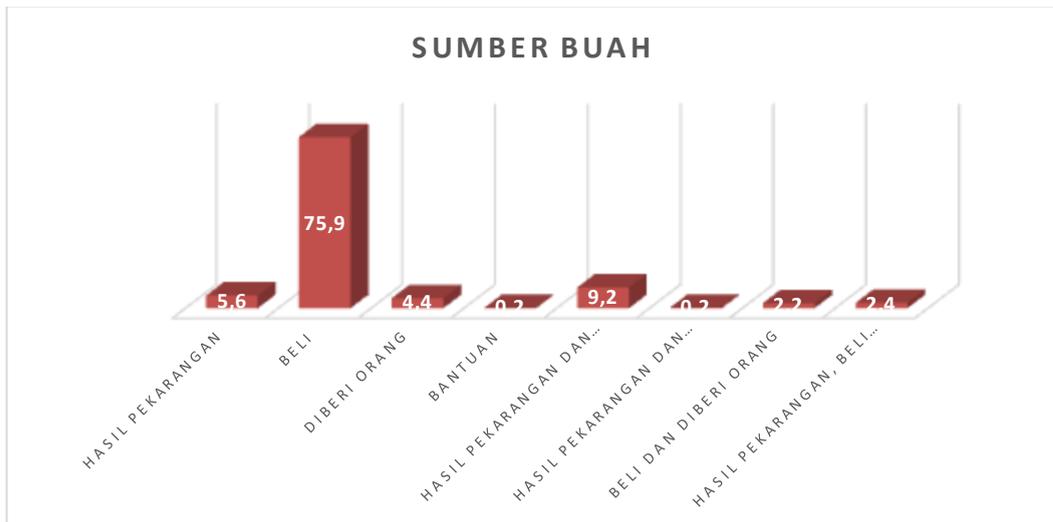
Dari grafik 5.7d, menunjukkan mayoritas lauk nabati yang dikonsumsi oleh masyarakat Jombang berasal dari membeli (95,9%). Lauk nabati yang umum dikonsumsi adalah Tempe dan Tahu.



Grafik 5.7e.

Sumber Sayur -Sayuran yang Biasa Dikonsumsi Keluarga Berdasarkan Survey Konsumsi Pangan Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2023.

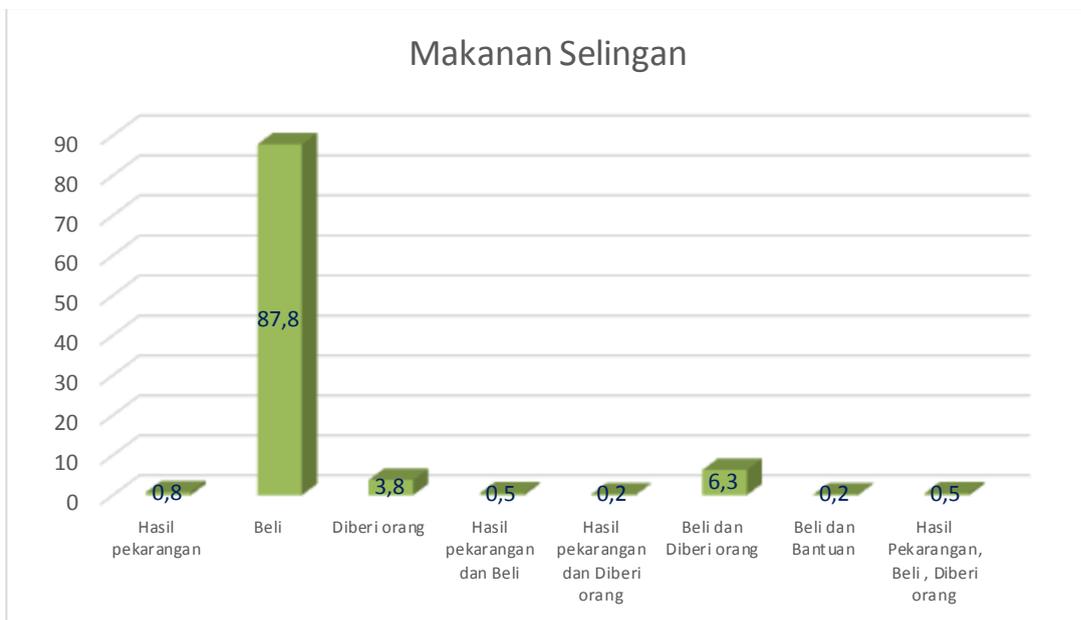
Dari grafik 5.7e, menunjukkan bahwa sayuran yang dikonsumsi oleh masyarakat Jombang mayoritas dari membeli (76,3 %), sedangkan yang berasal dari pekarangan hanya 6,3%. Hal ini menunjukkan kurang dioptimalkan lahan sekitar rumah untuk menanam sayur yang dapat dikonsumsi oleh keluarga. Perlu peningkatan sosialisasi KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) di tingkat rumah tangga.



Grafik 5.7f.

Sumber Buah-Buahan yang Biasa Dikonsumsi Keluarga Berdasarkan Survey Konsumsi Pangan Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2023.

Dari grafik 5.7f, menunjukkan bahwa buah-buahan yang dikonsumsi oleh masyarakat Jombang mayoritas dari membeli (75,9%), sedangkan yang berasal dari pekarangan hanya 5,6%. Hal ini menunjukkan kurang dioptimalkan lahan sekitar rumah untuk menanam buah-buahan yang dapat dikonsumsi oleh keluarga. Perlu peningkatan kegiatan peningkatan sosialisasi KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) di tingkat rumah tangga, sehingga konsumsi buah dan sayur dapat ditingkatkan.

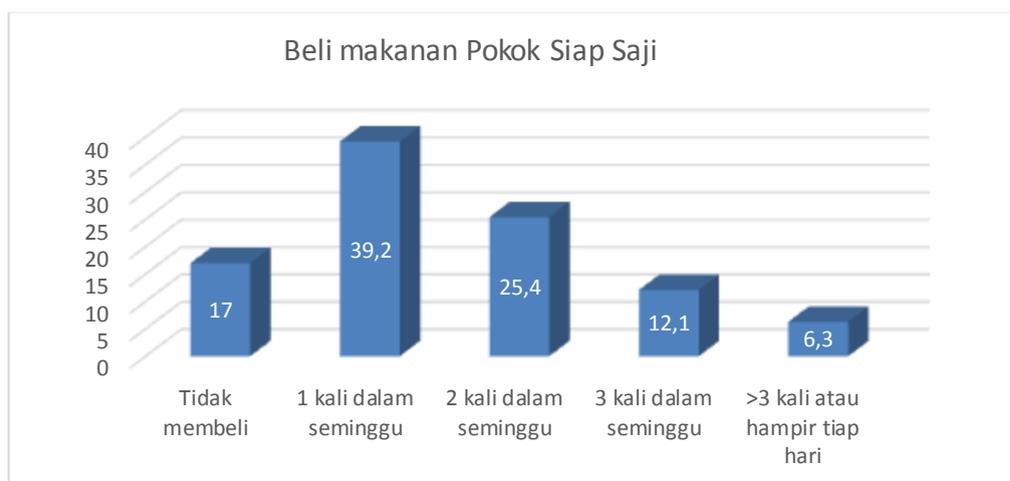


Grafik 5.7g.  
Sumber Makanan Selingan yang Biasa Dikonsumsi Keluarga Berdasarkan Survey Konsumsi Pangan Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2023.

Dari Grafik 5.7g, menunjukkan bahwa makanan selingan yang dikonsumsi masyarakat Jombang mayoritas (87,8%) dari membeli, dan hanya 0,8 % dari hasil sendiri. Dari data ini menunjukkan mayoritas masyarakat suka membeli makanan selingan di tempat-tempat penjual jajanan dibandingkan dengan membuatnya sendiri.

Pada keluarga yang memiliki cukup akses secara ekonomi dan pemenuhan kebutuhan pangan dengan cara membeli, pengetahuan gizi orang tua yang baik akan berpengaruh terhadap semakin baiknya keragaman konsumsi pangan anggota keluarganya, yang merupakan cerminan dari perilaku gizi yang baik. Secara umum, di negara berkembang, ibu memainkan peranan penting dalam memilih dan mempersiapkan pangan untuk dikonsumsi anggota keluarganya. Walaupun seringkali para ibu bekerja di luar, mereka tetap mempunyai andil besar dalam kegiatan pemilihan dan penyajian makanan (Iwao, 1993). Pola yang umum dalam pengambilan keputusan pemilihan pangan di Indonesia adalah pola istri dominan (keputusan dibuat oleh istri) dan pola sinkretik (keputusan dibuat bersama oleh suami dan istri).

Seiring dengan perkembangan jaman, dan semakin banyaknya Masyarakat yang bekerja di luar rumah maka kebiasaan membeli makanan siap saji semakin meningkat. Jika jaman dahulu semua keluarga makan dari menu makanan yang dimasak di rumah, sekarang banyak keluarga yang memanfaatkan warung, resto, pedagang kaki lima untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Data dibawah ini menjelaskan kebiasaan Masyarakat Kabupaten Jombang dalam membeli makanan siap saji.



Gambar 5.8.a  
 Frekuensi membeli Makanan Pokok Siap Saji Berdasarkan Survey  
 52

### Konsumsi Pangan Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2023.

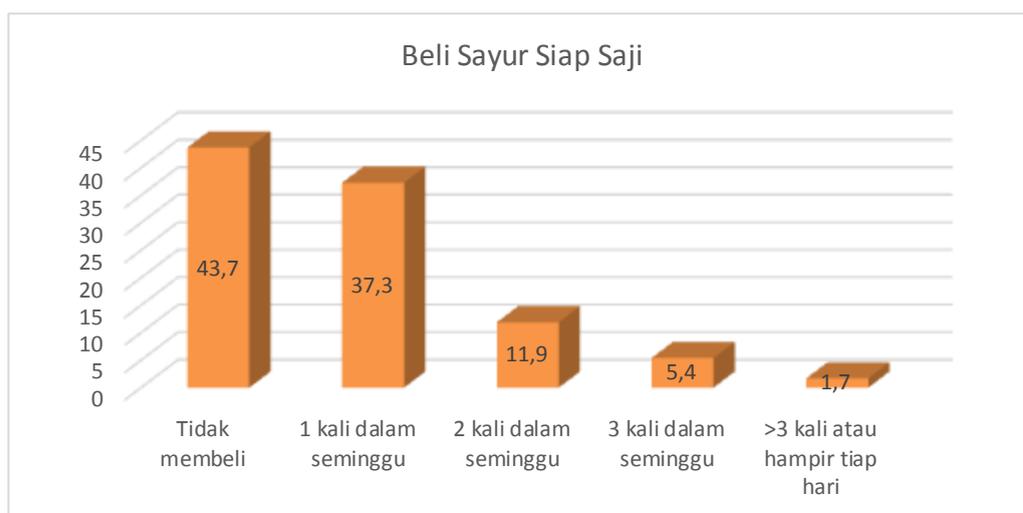
Dari gambar 5.8.a. dapat dijelaskan bahwa mayoritas keluarga di Kabupaten Jombang membeli makanan pokok siap saji 1x/minggu (39,2%), dan yang biasa membeli makanan pokok 2x/minggu 25,4%. Dari data menunjukkan mayoritas Masyarakat masih terbiasa memasak sendiri.



Gambar 5.8.b

Frekuensi membeli Lauk Pauk Siap Saji Berdasarkan Survey Konsumsi Pangan Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2023.

Dari tabel 5.8.b. menyebutkan mayoritas masyarakat 37,6% membeli lauk pauk siap saji 1x/minggu, dan 30,8% tidak membeli lauk. Artinya Masyarakat terbiasa memasak lauk pauk sendiri.



Gambar 5.8.c  
 Frekuensi Membeli Sayuran Siap Saji Berdasarkan Survey Konsumsi Pangan Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2023.

Dari grafik 5.8c dapat menunjukkan bahwa mayoritas Masyarakat 43,7% tidak membeli sayuran siap saji, sedangkan yang membeli 1x/minggu sebesar 37,3%. Hal ini menunjukkan mayoritas Masyarakat memasak sendiri sayuran yang dikonsumsi oleh keluarga.



Gambar 5.8.d  
 Frekuensi Membeli Jajanan Siap Saji Berdasarkan Survey Konsumsi Pangan Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2023.

Dari gambar 5.8e. menunjukkan bahwa mayoritas Masyarakat 31,7 % terbiasa beli jajanan 1x/minggu, dan 24,9% beli 2x/minggu.



Gambar 5.8.e  
 Frekuensi Membeli Minuman Siap Saji Berdasarkan Survey Konsumsi Pangan Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2023.

Dari gambar 5.8e. menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat terbiasa membeli minuman siap saji 1x/minggu yaitu 35%, dan yang membeli 2x/minggu sebanyak 20%, yang hampir setiap hari membeli minuman siap saji sebanyak 10%, dan masih ada yang tidak terbiasa membeli yaitu 21%.

### 5.3 Analisis Tingkat Konsumsi dan Keragaman Pangan Masyarakat

#### 5.3.1. Gambaran Konsumsi Energi, Protein dan PPH

Berdasarkan hasil recall 2 x 24 jam terhadap seluruh anggota keluarga yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dijelaskan gambaran tingkat konsumsi energi, protein masyarakat di Kabupaten Jombang pada Tahun 2023 dibandingkan dengan angka kecukupan gizi (AKG), konsumsi tiap orang tiap hari berdasarkan rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke-XI tahun 2018 adalah sebesar 2.100Kkal untuk energy dan 57 gram untuk protein.

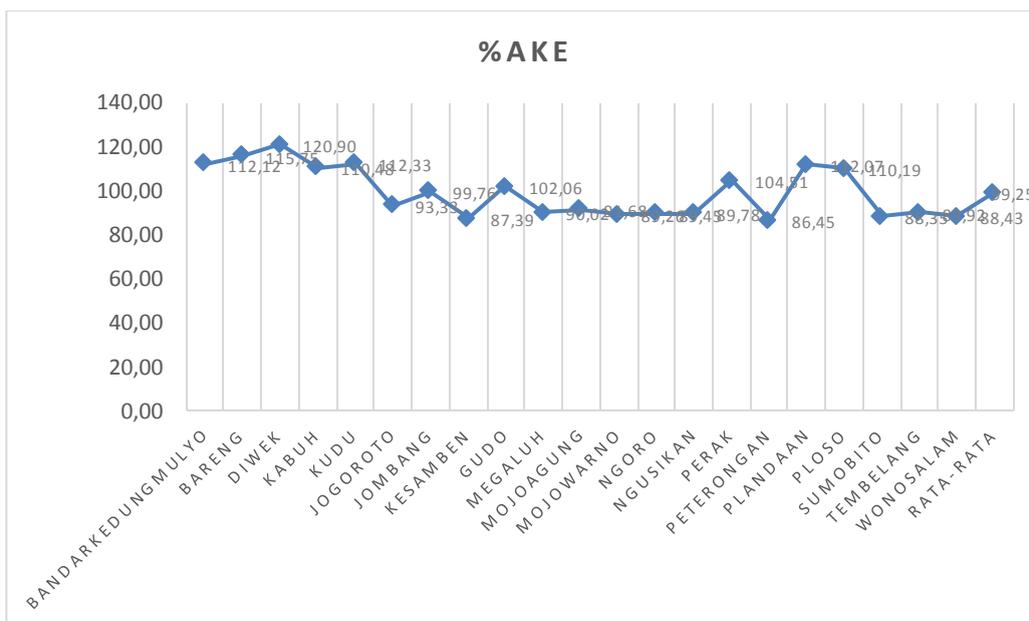
Tabel 5.3. Tingkat Konsumsi Energi Berdasarkan Survey Konsumsi Pangan Tahun 2023 Kabupaten Jombang

No	Kecamatan	Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/hari)	Tingkat Konsumsi Energi (%AKE)*
1	Bandarkedungmulyo	2354,5	112,12
2	Bareng	2430,8	115,75
3	Diwek	2539	120,90
4	Kabuh	2320,1	110,48
5	Kudu	2358,9	112,33
6	Jogoroto	1960	93,33
7	Jombang	2095	99,76
8	Kesamben	1835,2	87,39
9	Gudo	2143,3	102,06
10	Megaluh	1890,4	90,02
11	Mojoagung	1925,3	91,68
12	Mojowarno	1874,5	89,26

13	Ngoro	1878,5	89,45
14	Ngusikan	1885,4	89,78
15	Perak	2194,8	104,51
16	Peterongan	1815,5	86,45
17	Plandaan	2353,4	112,07
18	Ploso	2313,9	110,19
19	Sumobito	1855,3	88,35
20	Tembelang	1888,4	89,92
21	Wonosalam	1857,1	88,43
	Rata-Rata	2084,25	99,25

\*)Keterangan : Angka Kecukupan Energy (AKE) = 2.100 KKal/Kap/Hari

Tabel 5.3. berikut menjelaskan bahwa rata-rata jumlah konsumsi energi rata-rata di Kabupaten Jombang pada Tahun 2023 adalah sebesar 2084,25 KKal/Kap/hr, dan tingkat konsumsi energi dibandingkan kebutuhan sehari sebesar 99,25 %.



Gambar 5.9. Tingkat Konsumsi Energi Berdasarkan Survey Konsumsi Pangan Tahun 2023

Gambar 5.8, memperlihatkan bahwa tingkat konsumsi energi masyarakat di Kabupaten Jombang bervariasi antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Pada 9 kecamatan tingkat konsumsinya lebih tinggi dari 100%, sedangkan 12 kecamatan masih dibawah 100%.

Konsumsi energi tertinggi Kecamatan Diwek yaitu 120,9 %AKE dan yang terendah Kecamatan Peterongan 86,45 %AKE.

Rata-rata konsumsi masyarakat Jombang 2084,25 Kkal atau mencapai 99,25 %, artinya angka kecukupan sudah mendekati anjuran konsumsi yaitu

2.100 Kkal/kapita/hari. Angka ini turun sedikit dibandingkan dengan hasil survey pangan pada tahun 2022, yaitu 2091,43 Kkal (99,24%).

Bagi masyarakat yang belum mencapai angka kecukupan energi yang dianjurkan sebesar 2.100 Kkal/hari, hal ini dikarenakan beberapa hal, antara lain: 1) adanya beberapa masyarakat yang tidak membiasakan sarapan/makan pagi terutama pada anak usia sekolah, 2). Masyarakat perkotaan cenderung mengurangi makanan sumber karbohidrat, 3) masih kurang memasyarakatnya umbi-umbian, dan 4) masih jarang nya konsumsi kudapan/makanan selingan terutama yang dibuat dari bahan makanan lokal. Kedua orang tua dalam keluarga memegang peranan penting dalam pemilihan dan penyediaan pangan untuk anggota keluarganya, maka pengetahuan gizi keduanya akan mempengaruhi jenis pangan dan dan mutu gizi makanan yang dikonsumsi anggota keluarga. Oleh karena itu, tingkat pengetahuan gizi yang baik dapat mewujudkan perilaku atau kebiasaan makan yang baik pula. Kapka Schutt dan Mitchell (1992) mengungkapkan bahwa tingkat pengetahuan gizi yang baik secara konsisten terwujud menjadi perilaku makan yang baik. Beberapa peneliti berpendapat bahwa tingkat pengetahuan gizi yang baik tidak selalu terwujud dalam perilaku makan yang baik karena adanya faktor daya beli pangan yang rendah dan keterbatasan waktu untuk mengolah makanan atau menyiapkan makanan. Masyarakat miskin bisa jadi tidak dapat mengonsumsi aneka ragam pangan yang baik meskipun berada dekat dari pasar yang menjual aneka ragam pangan dan memiliki pengetahuan gizi yang baik (Lang, 1992; Schafer et al., 1993).

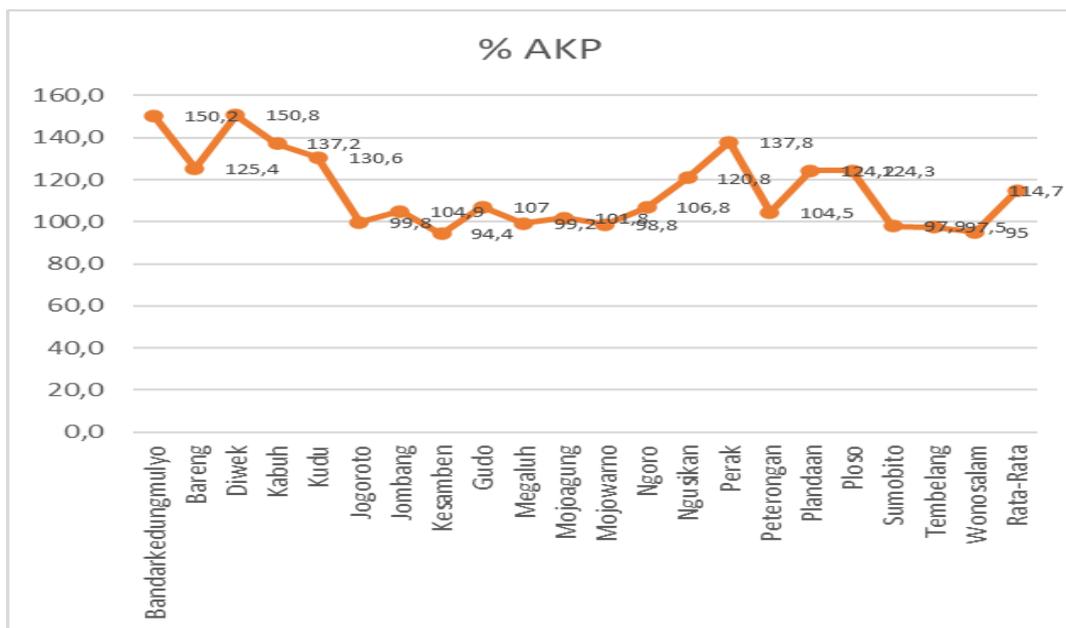
Tabel 5.4. Tingkat Konsumsi Protein Berdasarkan Survey Konsumsi Pangan Tahun 2023 Kabupaten Jombang

No	Kecamatan	Konsumsi Protein (g/Kapita/hari)	Tingkat Konsumsi Protein (%AKP)*
1	Bandarkedungmulyo	85,6	150,2
2	Bareng	71,5	125,4
3	Diwek	86	150,9
4	Kabuh	78,2	137,2
5	Kudu	74,5	130,7
6	Jogoroto	57,8	101,4
7	Jombang	59,8	104,9
8	Kesamben	54,8	96,1
9	Gudo	60,4	106,0
10	Megaluh	56,8	99,6
11	Mojoagung	58	101,8
12	Mojowarno	56,9	99,8
13	Ngoro	60,4	106,0
14	Ngusikan	66,6	116,8
15	Perak	78	136,8
16	Peterongan	58,4	102,5
17	Plandaan	70,8	124,2
18	Ploso	70,9	124,4
19	Sumobito	56,3	98,8
20	Tembelang	55,8	97,9
21	Wonosalam	55,6	97,5
	Rata - rata	65,4	114,7

\*)Keterangan : Angka Kecukupan Protein (AKP) = 57 Gram/Kap/Hari

Dari tabel 5.10. menunjukkan bahwa konsumsi protein rata-rata perkapita/perhari masyarakat Kabupaten Jombang mencapai 65,4 g/kapita/hari dan jika dibandingkan dengan angka kecukupannya mencapai 114,7%, Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan hasil

survey tahun 2022 sebesar 58,45 g/kapita/hari dan AKP 103,25%. Konsumsi protein tertinggi adalah Kecamatan Diwek (86 gram/kapita/hari atau 150,8 %AKP) dan yang terendah Kecamatan Kesamben (54,8 gram/kapita/hari atau 96,1 %AKP). Kenaikan konsumsi protein disebabkan beberapa hal antara lain :1) Keberhasilan program sosialisasi B2SA sehingga meningkatkan pengetahuan gizi masyarakat; 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam meningkatkan gizi dan kesehatan.



Gambar 5.10. Tingkat Konsumsi Protein Berdasarkan Survey Konsumsi Pangan Tahun 2022

Dari gambar 5.10, menunjukkan terdapat 12 kecamatan mempunyai tingkat konsumsi protein melebihi angka yang dianjurkan yaitu 57 g/kapita/hari. Sedangkan 6 kecamatan masih kurang dari tingkat konsumsi yang dianjurkan, tetapi angkanya meningkat dibanding dengan tahun lalu.

Penelitian yang dilakukan oleh Schafer et al. (1993) mengungkap bahwa alasan ekonomi merupakan pertimbangan pertama dalam pemilihan pangan, sedangkan yang menjadi pertimbangan kedua adalah kandungan gizi dari bahan pangan tersebut dimana hal itu mencerminkan variabel pengetahuan gizi. Selain itu peningkatan alokasi waktu wanita

pada kegiatan ekonomi telah mengurangi frekuensi mereka dalam memasak dan semakin berkurangnya jenis bahan pangan yang dimasak walaupun mereka telah dilibatkan dalam program pendidikan gizi (FAO, 1987). Keluarga dengan ibu yang bekerja di bidang profesional lebih memilih untuk mengonsumsi buah dan makanan yang telah siap santap dibandingkan dengan keluarga dengan ibu tidak bekerja. Hal ini terjadi karena makin terbatasnya waktu yang tersedia untuk penyiapan makanan, sehingga cukup beralasan jika pengetahuan gizi, pendapatan dan alokasi waktu ibu berpengaruh terhadap keragaman konsumsi pangan.

Protein merupakan bahan utama dalam pembentukan jaringan, baik jaringan tubuh tumbuh-tumbuhan maupun tubuh manusia dan hewan. Karena itu protein disebut unsur pembangun. Protein sama halnya dengan karbohidrat, asam amino juga merupakan senyawa organik yang tersusun dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Protein terdapat dalam berbagai bentuk dan ukuran, serta tersusun atas berbagai macam asam amino yang menyatu dalam berbagai proprosi dan rangkaian

Protein memiliki fungsi sebagai bagian kunci semua pembentukan jaringan tubuh, yaitu dengan mensintesisnya dari makanan. Pertumbuhan dan pertahanan hidup manusia dapat terjadi bila konsumsi protein cukup. Protein merupakan zat gizi yang paling banyak terdapat dalam tubuh. Protein merupakan bagian dari semua sel-sel hidup, hampir setengah jumlah protein terdapat di otot, 1/5 terdapat di tulang, 1/10 terdapat di kulit, sisanya terdapat dalam jaringan lain dan cairan tubuh

Tabel 5.5. Rata-rata Skor PPH Keluarga Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Jombang Tahun 2023.

No	KECAMATAN	SKOR PPH TH 2023
1	Bandarkedungmulyo	96,1
2	Bareng	91,5
3	Diwek	97,7
4	Kabuh	93,2
5	Kudu	98,7

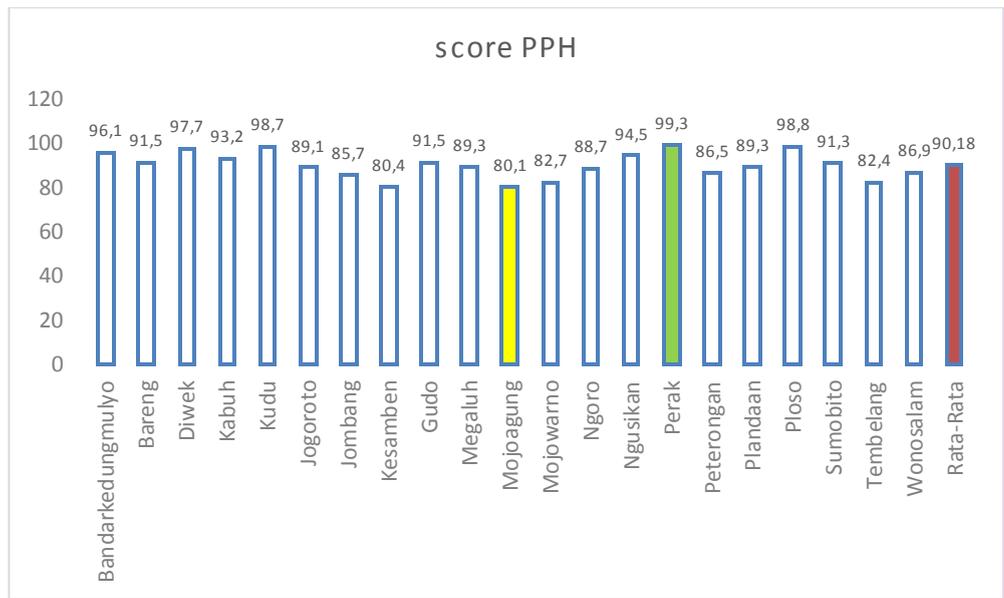
6	Jogoroto	89,1
7	Jombang	85,7
8	Kesamben	80,4
9	Gudo	91,5
10	Megaluh	89,3
11	Mojoagung	80,1
12	Mojowarno	82,7
13	Ngoro	88,7
14	Ngusikan	94,5
15	Perak	99,3
16	Peterongan	86,5
17	Plandaan	89,3
18	Ploso	98,8
19	Sumobito	91,3
20	Tembelang	82,4
21	Wonosalam	86,9
	Rata-Rata	90,18

Dari tabel 5.5 dan gambar 5.11, menunjukkan semua kecamatan mempunyai skor PPH yang baik yaitu > 80. Skor PPH tahun 2023 mengalami peningkatan dari 87,43 tahun 2022 menjadi 90,18 (tahun 2023) Hal ini disebabkan banyak hal antara lain keberhasilan program yang sudah dilakukan sehingga pengetahuan masyarakat tentang pentingnya makanan bergizi meningkat, dan juga dampak dari media sosial masyarakat semakin peduli dalam menjaga Kesehatan, imunitas melalui perbaikan konsumsi makanan.

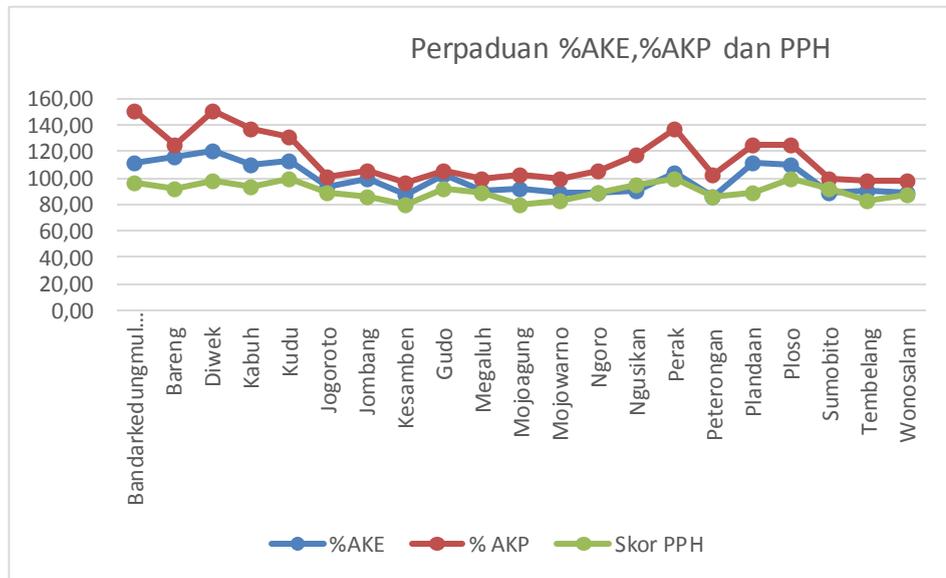
PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang.

Jika skor PPH baik atau tinggi artinya keragaman konsumsi pangan

di suatu wilayah tersebut sudah cukup baik.



**Grafik 5.11**  
Skor PPH Berdasarkan Survey Konsumsi Pangan Tahun 2023



**Grafik 5.12**  
Perpaduan %AKE, %AKE dan Skor PPH Berdasarkan Survey Konsumsi Pangan Tahun 2023

Berdasarkan perpaduan ketiga nilai rata-rata asupan energy, proteindan skor PPH secara bersama-sama, maka dapat dijelaskan bahwa

kecamatan yang tingkat konsumsi relatif berimbang terjadi di Kecamatan Jogoroto, Kesamben, Sumobito, Tembelang dan Wonosalam, karena pada grafik tersebut tergambar bahwa di kecamatan tersebut, rata-rata konsumsi energy, protein maupun skor PPH pada nilai yang hampir berhimpitan. Sedangkan pada Kecamatan Bandarkedungmulyo, Bareng, Diwek, Kabuh dan Perak terlihat bahwa rata-rata tingkat konsumsi energi dan protein keluarga sudah cukup tinggi, namun tidak seiring dengan rata-rata skor PPH. Hal ini menggambarkan bahwa tingginya konsumsi energy protein tidak selalu berdampak pada skor PPH yang tinggi pula. Keadaan tersebut terjadi jika tingginya konsumsi protein tersebut banyak disumbangkan oleh jenis protein nabati seperti tahu, tempe ataupun jenis kacang yang lain, tanpa diimbangi dengan konsumsi jenis protein hewani yang cukup seperti telur, ikan maupun jenis ayam atau daging, atau bisa juga karena konsumsi sayur dan buah yang masih sangat rendah.

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Sebagai kebutuhan dasar, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Pertanian sebagai kegiatan pemenuhan kebutuhan manusia yang paling krusial memiliki tantangan untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat selama pandemi. Padahal sector pertanian sendiri terkena dampak ekonomi kurang baik.

Menurunnya pendapatan rumah tangga mengakibatkan menurun pula daya belinya. Masyarakat menjadi lebih selektif dalam membelanjakan uangnya dengan lebih memprioritaskan membeli kebutuhan pangan yang bersifat primer (pokok). Saat ini makanan merupakan prtioritas utama untukmeningkatkan imunitas.

Konsumsi pangan dapat diukur dari segi jumlah yang dicerminkan oleh terpenuhinya angka kecukupan energi dan juga dari segi kualitas

yang

dicerminakan oleh keanekaragaman konsumsi pangan. Hal ini sangat penting karena tidak ada satupun jenis pangan yang memiliki kandungan zat gizi lengkap. Oleh karena itu, konsumsi pangan menyangkut upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mempunyai pemahaman atas pangan, gizi dan kesehatan yang baik, sehingga dapat mengelola konsumsinya secara optimal.

Tabel 5.6. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Jombang Berdasarkan Survey Konsumsi Tahun 2023

No	Kelompok Pangan	Skor PPH	Skor Maksimal	Prosentase (%)
1.	Padi-padian	24,8	25	99,2
2.	Umbi-umbian	1,2	2,5	48
3.	Pangan Hewani	21,7	24	90,42
4.	Minyak dan Lemak	5	5	100
5.	Buah/Biji Berminyak	1	1	100
6.	Kacang-kacangan	10	10	100
7.	Gula	1,2	2,5	48
8.	Sayur dan Buah	25,2	30	84
9.	Lain-lain	0	0	0
TOTAL		90,1	100	

Jika dilihat dari Tabel 5.6. Tingkat konsumsi berdasarkan skor PPH, yang menyumbangkan energi terbesar (100%) adalah kelompok minyak dan lemak, biji berminyak dan kacang-kacangan, Masyarakat jombang dalam pemilihan menu makanan lebih banyak olahan yang digoreng, dan bersantan atau menggunakan kemiri/kacang tanah, sedangkan konsumsi umbi-umbian dan sayur/buah tingkat konsumsinya masih kurang dari ideal baru mencapai 48.0 % dan konsumsi sayur mencapai 84%. Angka ini lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan hasil Riskesdas Tahun 2013 bahwa 95% masyarakat Indonesia kekurangan konsumsi sayur dan buah. Jenis sayur yang banyak dikonsumsi masyarakat adalah kacang panjang, bayam, kangkung, wortel, kol dan nangka muda. Sedangkan buah yang banyak dikonsumsi adalah jeruk manis, papaya, pisang, karena bahan makanan tersebut yang

tersedia di pasaran dan harga relatif terjangkau. Masyarakat masih mengandalkan beras sebagai bahan pangan pokok, walaupun jumlah konsumsinya belum mencapai batas maksimal 25.

Lemak memiliki banyak fungsi, antara lain menjadi sumber energi, membentuk hormon, membantu penyerapan vitamin, dan mendukung fungsi otak. Kandungan lemak dalam makanan juga memberikan rasa lezat yang menggugah nafsu makan. Namun, sesuai dengan anjuran konsumsi GGL, asupan lemak harian Anda sebaiknya tidak lebih dari 30% asupan energi total. Ini setara dengan 67 gram lemak per hari (jika kebutuhan kalori 2000 kkal per hari) atau 5-6 sendok makan minyak per hari.

Guna mempermudah masyarakat Indonesia dalam membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak, Kemenkes RI mengeluarkan rekomendasi yang dikenal sebagai G4G1L5.

G4G1L5 merupakan batasan konsumsi gula sebanyak 4 sendok makan per hari, garam sebanyak 1 sendok teh per hari, dan lemak sebanyak 5 sendok makan per hari.

Anjuran G4G1L5 bertujuan untuk mencegah Penyakit Tidak Menular (PTM) pada orang dewasa.

Tabel 5.7. Perbandingan Skor PPH Kabupaten Jombang Tahun 2022 dan 2023

No	Kelompok Pangan	Skor Maksimal	Skor PPH Th. 2022	Skor PPH Th. 2023
1.	Padi-padian	25	24.66	24,8
2.	Umbi-umbian	2.5	1.25	1,2
3.	Pangan Hewani	24	21.11	21,7
4.	Minyak dan Lemak	5	4.96	5
5.	Buah/Biji Berminyak	1	0.82	1
6.	Kacang-kacangan	10	10.19	10
7.	Gula	2.5	1.93	1,2
8.	Sayur dan Buah	30	22.52	25,2
9.	Lain-lain	0.0	0.0	0,0
	Total	100	87.43	90,1

Dari Tabel 5.7, ada peningkatan skor PPH dari 87,43 menjadi 90,1.

Hal yang positif adalah terjadi penurunan konsumsi gula serta terjadi peningkatan konsumsi sayur/buah. Konsumsi minyak dan lemak masih tinggi. Dari hasil recall mayoritas menu lauk pauk baik hewani maupun nabati memilih olahan yang digoreng. Konsumsi minyak dan lemak yang berlebihan dan dalam jangka waktu lama beresiko terhadap munculnya penyakit tidak menular. Lemak dalam tubuh yaitu lipoprotein (mengandung trigiserida, fosfolipid, dan kolestereol) yang berhubungan dengan protein. Lemak akan menghasilkan kalori tertinggi dibandingkan dengan zat gizi makro lainnya yaitu sebesar 9 kalori didalam makanan. Sumber utama lemak adalah minyak tumbuh-tumbuhan (minyak kelapa, kelapa sawit, kacang tanah, kacang kedelai, jagung dan sebagainya) (Doloksaribu, 2017). Lemak lebih banyak menghasilkan energi dibandingkan dengan karbohidrat atau protein. Setelah makan, lemak dikirim ke jaringan adiposa untuk disimpan sampai dibutuhkan kembali sebagai energi. Oleh karena itu konsumsi lemak berlebih akan lebih mudah menambah berat badan (Kharismawati, 2010).

Konsumsi Sayur dan buah masih perlu ditingkatkan , sebab sayur buah sangat bermanfaat bagi Kesehatan, perkembangan dan pertumbuhan. Nutrisi dalam buah sayur sangat dibutuhkan dalam proses metabolisme (Andika,2015). Sayur dan buah merupakan makanan

yang mengandung vitamin dan berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi tubuh dari reaksi oksidatif (Padmiari,2010).

Konsumsi protein hewani masih perlu ditingkatkan , untuk konsumsi protein nabati sudah memadai bahkan berlebih. Protein hewani mempunyai nilai biologis yang lebih tinggi dibandingkan dengan protein nabati. Konsumsi protein hewani yang memadai dapat mencegah stunting mulai dari cantin (calon pengantn) dan 1000 HPK (Hari pertama kehidupan).

Konsumsi umbi-umbian masih perlu ditingkatkan. Umbi-umbian

merupakan salah satu bahan pangan lokal yang tak hanya mudah ditemukan di Indonesia, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Umbi-umbian biasanya terbentuk di bawah tanah (pada bagian akar), serta memiliki kandungan utama berupa karbohidrat atau pati. Umbi-umbian banyak sekali macamnya. Sebut saja kentang, talas, ubi jalar, singkong, uwi, cantel, ganyong, gembili, sente, hingga suweg. Umbi-umbian tersebut masing-masing memiliki rasa yang khas dan bisa diolah menjadi berbagai macam sajian, umbi-umbian sangat cocok digunakan sebagai sumber karbohidrat pengganti nasi yang selama ini jadi makanan pokok masyarakat Indonesia.

### 5.3.2. Analisis Pola Konsumsi Berdasarkan Karakteristik Responden

Beberapa analisis yang dapat dijelaskan terkait dengan rata-rata tingkat konsumsi energy dan protein masyarakat di Kabupaten Jombang pada Tahun 2023 tampak nyata bahwa ada keterkaitan antara beberapa variable/karakteristik responden dengan konsumsi energi, konsumsi protein maupun skor PPH. Adapun rinciannya cross tabulasi adalah sebagai berikut :

Tabel 5.8. Hubungan Karakteristik Responden dengan Kecukupan Konsumsi Energi/Protein dan skor PPH

No	Karakteristik Responden	Hubungan dengan Kecukupan Konsumsi Energi	Hubungan dengan kecukupan proteini	Hubungan dengan skor PPH
1	Umur suami	0,00 (signifikan)	0,00 (signifikan)	0,00 (signifikan)
2	Umur Istri	0,00 (signifikan)	0,00 (signifikan)	0,002 (signifikan)
3	Pendidikan Suami	0,00 (signifikan)	0,00 (signifikan)	0,00 (signifikan)
4	Pendidikan Istri	0,00 (signifikan)	0,00 (signifikan)	0,01 (signifikan)
5	Pekerjaan Suami	0,04 (signifikan)	0,023 (signifikan)	0,013 (signifikan)

6	Pekerjaan Istri	0,17 (tidak signifikan)	0,209(tidak signifikan)	0,586(tidak signifikan)
7	Pendapatan Keluarga	0,04 (signifikan)	0,324(tidak signifikan)	0,868(tidak signifikan)
8	Rerata pengeluaran Makanan	0,139(tidak signifikan)	0,114(tidak signifikan)	0,039 (signifikan)
9	Jumlah anggota keluarga	0,00 (signifikan)	0,00 (signifikan)	0,00 (signifikan)

Dari tabel 5.8 menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara karakteristik responden (umur suami, umur istri, Pendidikan suami, Pendidikan istri, dan jumlah anggota keluarga dengan kecukupan konsumsi energi, kecukupan konsumsi protein dan skor pola pangan harapan, sedangkan pekerjaan istri dan rerata pengeluaran makan tidak ada hubungan. Khusus pendapatan berhubungan dengan konsumsi energi tetapi tidak berhubungan dengan konsumsi protein dan skor PPH.

Semakin rendah jumlah anggota keluarga maka semakin tinggi skor PPH. Tingkat jumlah anggota keluarga, semakin sedikit anggota keluarga berarti semakin sedikit pula kebutuhan yang harus dipenuhi keluarga, begitu pula sebaliknya. Sehingga dalam keluarga yang jumlah anggotanya banyak, akan diikuti oleh banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi (Murjana Yasa, I G. W., 2008).

Keadaan tersebut terjadi karena dengan jumlah anggota keluarga yang semakin besar tanpa diimbangi dengan meningkatnya pendapatan dan ketersediaan pangan akan menyebabkan pendistribusian konsumsi pangan akan semakin tidak merata. Pangan yang tersedia untuk suatu keluarga besar mungkin hanya cukup untuk keluarga yang besarnya setengah dari keluarga tersebut sehingga menyebabkan tingkat konsumsi energi dan protein yang rendah. Keadaan yang demikian tidak cukup untuk mencegah timbulnya gangguan gizi pada keluarga besar. Menurut Berg (1986) bahwa anak yang mengalami gizi kurang pada keluarga

beranggota banyak, lima kali lebih besar dibandingkan dengan keluarga beranggota sedikit.

Pendidikan merupakan salah satu faktor dalam penyediaan pangan, tetapi yang paling berpengaruh adalah pengetahuan gizi. Pendidikan yang tinggi belum tentu mempunyai pengetahuan gizi yang tinggi begitu pula sebaliknya. Pengetahuan gizi dapat ditingkatkan melalui penyuluhan, sosialisasi, media masa, PKK dan kegiatan lainnya. Sedangkan tingkat Pendidikan istri tidak ada hubungan yang signifikan dengan kecukupan energi dan protein.

Pendidikan pada hakekatnya adalah proses pematangan kualitas hidup. Melalui proses tersebut diharapkan manusia dapat memahami apa hakikat hidup, serta untuk apa dan bagaimana menjalankan tugas hidup dan kehidupan secara benar (Mulyasana, 2011:2). Pendidikan membawa dampak pada perubahan tingkah laku seseorang seperti mudah menerima hal baru serta kemampuan mengambil sikap atas kebijakan yang dibuat pemerintah dalam upaya pembangunan. Sehingga idealnya, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula kesadarannya terhadap

Kesehatan.

Tingkat pendidikan formal umumnya mencerminkan kemampuan seseorang untuk memahami berbagai aspek pengetahuan, termasuk pengetahuan gizi. Di seluruh negara, termasuk Indonesia, pengetahuan gizi secara formal (dari tingkat SD sampai SMU) diajarkan sebagai pendidikan gizi, bagian dari pelajaran Ekonomi Rumah tangga (Syarif et al., 1988). Di Indonesia, pengetahuan gizi juga diajarkan sebagai bagian dari pendidikan nonformal, terutama yang melibatkan wanita dalam organisasi atau kelompok sosial seperti dalam PKK, Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) dan organisasi Dharma Wanita. Jadi, partisipasi wanita dalam berbagai kegiatan sosial (PKK, Dharma Wanita) akan dapat

mempengaruhi pengetahuan gizi mereka (jadi lebih baik) karena mereka mendapat pendidikan gizi sebagai bagian dari pendidikan nonformal.

Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka aksesnya terhadap media massa (koran, majalah, media elektronik) juga makin tinggi yang juga berarti aksesnya terhadap informasi yang berkaitan dengan gizi juga semakin tinggi. Wanita terpelajar cenderung untuk tertarik terhadap informasi gizi dan banyak di antara mereka yang memperoleh informasi tersebut dari media cetak, khususnya majalah dan koran. Tingkat pendidikan orang tua, pendapatan rumahtangga dan wilayah tempat tinggal (desa atau kota) diasumsikan mempengaruhi kondisi seseorang/rumahtangga untuk terpapar media massa.

Hal ini terjadi karena perkembangan ilmu gizi dan berbagai promosi produk gizi dan kesehatan. Pengalaman dalam menderita penyakit karena kekurangan/kelebihan zat gizi tertentu dapat meningkatkan pengetahuan gizi. Orang yang menderita penyakit tersebut biasanya mendapat berbagai saran dari ahli gizi dan kesehatan atau bahkan dari temannya untuk memasukkan bahan pangan yang mengandung zat gizi tertentu dalam susunan dietnya. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa

kelompok orang dengan pendapatan yang lebih tinggi kemungkinan memiliki pengalaman di bidang gizi yang lebih baik jika dibandingkan dengan kelompok dengan pendapatan rendah. Selain itu, kelompok orang yang tinggal di daerah perkotaan atau wilayah dengan berbagai fasilitas penunjang lengkap memiliki pengalaman di bidang gizi yang lebih baik dibandingkan kelompok yang tinggal di wilayah pedesaan.

Model analisis yang umum pada determinan konsumsi pangan biasanya menggunakan ukuran rumahtangga, pendapatan atau pengeluaran dan harga sebagai faktor determinan yang mungkin (Buce, 1987). Umumnya, pada rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang sama, total konsumsi pangan rumah tangga meningkat seiring dengan

peningkatan jumlah anggota rumah tangganya (Worsley, 1991). Pendapatan yang terbatas pada rumah tangga berukuran besar akan mengakibatkan jenis pangan yang dikonsumsi jadi kurang bervariasi dan memiliki kualitas gizi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan rumah tangga yang berukuran lebih kecil (Dewey, 1981).

Preferensi pangan pada anak berbeda dengan kelompok orang dewasa dan kelompok usia lanjut (Buse & Salathe 1978). Konsumsi pangan pada kelompok anak-anak umumnya bergantung dari apa yang diberikan oleh ibu atau orangtuanya (Abraham 1988) yang tentunya berbeda dengan yang diberikan untuk kelompok remaja atau dewasa. Kelompok remaja dan dewasa lebih suka untuk memilih pangan yang dikonsumsinya sendiri dan

pada kelompok remaja biasanya kurang begitu peduli dengan kandungan gizi yang tinggi pada pangan dan mereka cenderung lebih menyukai pangan yang sedang populer (Rappoport et al. 1992).

Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan penduduk tidak terlepas dari tingkat pengetahuan tentang pangan dan gizi. Masalah bahwa kekurangan maupun kelebihan gizi akan menimbulkan masalah kesehatan. Bagi penduduk berpendapatan rendah dan akses terhadap pangan rendah, pengetahuan pangan dan gizi penduduk sangat diperlukan untuk peningkatan pemahaman mereka terhadap pentingnya upaya yang mengarah pemenuhan konsumsi sesuai anjuran yang ideal dari sisi kuantitas maupun kualitas (penganekaragaman) konsumsi pangan.

Sementara itu, bagi penduduk dengan tingkat pendapatan tinggi dan akses terhadap pangan relatif baik, peningkatan pengetahuan pangan dan gizi diperlukan untuk peningkatan pemahaman bahwa keseimbangan konsumsi dan penganekaragaman pangan sesuai anjuran agar terhindar dari masalah gizi lebih perlu mendapat prioritas.

Beberapa kegiatan yang perlu dilaksanakan, yaitu : 1) Kampanye

nasional diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumberdaya pangan lokal baik untuk aparat pemerintahan tingkat pusat dan daerah, individu, kelompok masyarakat maupun industri; 2) Pendidikan diversifikasi konsumsi pangan secara sistematis sejak usia dini; 3) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak memproduksi, menyediakan/ memperdagangkan, dan mengkonsumsi pangan yang tidak aman dan;4) Fasilitasi pengembangan bisnis pangan melalui fasilitasi pengembangan aneka pangan segar, industri pangan olahan dan pangan siap saji berbasis sumberdaya lokal.

Akses makanan mengacu pada keterjangkauan dan alokasi makanan, serta preferensi individu dan rumah tangga. Komite PBB untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mencatat bahwa penyebab kelaparan dan kekurangan gizi seringkali bukan karena kelangkaan makanan tetapi ketidakmampuan untuk mengakses makanan yang tersedia, biasanya karena kemiskinan. Kemiskinan karena banyak PHK dalam masa pandemi ini terjadi, sehingga dapat membatasi akses pada makanan dan juga dapat meningkatkan seberapa rentan seseorang atau rumah tangga terhadap lonjakan harga pangan. Akses tergantung pada apakah rumah tangga memiliki pendapatan yang cukup untuk membeli makanan dengan harga yang berlaku atau memiliki cukup lahan dan sumber daya lainnya untuk menanam makanannya sendiri. Rumah tangga dengan sumber daya yang cukup dapat mengatasi panen yang tidak stabil dan kekurangan pangan lokal dan mempertahankan akses mereka ke makanan. Oleh karena itu program integratif dan upaya bersama baik secara politik, ekonomi, mobilisasi sosial dengan penyadaran akan pentingnya ketersediaan pangan dan akses yang terjangkau dengan sistem informasi yang akurat dalam menyediakan informasi pangan yang tepat dan tepat waktu tentunya akan membantu mengatasi masalah pangan.

Jenis pekerjaan Kepala Keluarga tidak terlalu berpengaruh pada PPH. Yang banyak mempengaruhi adalah pekerjaan ibu. Horton dan Campbell (1991) menyatakan bahwa jika ibu bekerja di luar rumah, maka akan ada dua dampak terhadap pola konsumsi rumahtangganya. Dampak yang pertama yaitu adanya peningkatan terhadap pangan yang dikonsumsi rumahtangga. Kualitas pangan yang dikonsumsi akan tetap normal atau bahkan jadi lebih baik. Dampak yang kedua yaitu terjadinya perubahan dalam waktu untuk kegiatan konsumsi dan kegiatan rumahtangga lainnya yang menjadi lebih singkat. Berdasarkan pola pikir tersebut, maka faktor yang diduga berpengaruh terhadap ketersediaan waktu ibu adalah status dan jenis pekerjaan ibu, kehadiran ibu di rumah, ketersediaan berbagai peralatan masak modern dan ketersediaan pangan yang praktis (siap saji/siap santap).

Keterlibatan ibu tersebut akan berpengaruh terhadap keragaman konsumsi pangan dan asupan gizi rumahtangganya karena mereka berperan penting dalam kegiatan pengelolaan pangan untuk anggota rumahtangganya (Campbell & Sanjur, 1992). Besarnya pengaruh dari berbagai faktor yang disebutkan sebelumnya juga bergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan ibu (di dalam atau di luar rumah).

Di Indonesia, beragam jenis pangan yang dikelola rumahtangga tersedia baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Harga dari pangan tersebut berbeda antara di wilayah perkotaan dengan di pedesaan. Di daerah perkotaan, sekalipun ibu rumahtangga tidak bekerja di luar rumah biasanya tetap memiliki pembantu karena keinginan anggota rumahtangga, termasuk ibu untuk memiliki waktu luang yang lebih banyak. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui efek dari status dan jenis pekerjaan ibu terhadap asupan gizi dan makanan rumahtangga di negara berkembang. Huffman (1987) mencatat bahwa permintaan yang tinggi terhadap alokasi waktu wanita untuk kegiatan ekonomi dan

kegiatan rumah tangga pada rumah tangga menengah ke bawah dapat mempengaruhi variasi pangan yang dikonsumsi.

Wanita memegang peranan penting dalam pengelolaan pangan rumah tangga. Saat wanita dari rumah tangga menengah ke bawah lebih banyak mengalokasikan waktunya untuk kegiatan ekonomi atau bekerja diluar rumah, biasanya mereka akan mengurangi waktu untuk mengelola makanan di rumah tangga dengan cara mengurangi frekuensi memasak atau mengurangi jenis makanan yang dimasak yang pada akhirnya akan mengurangi kualitas gizi pada menu makanannya (Food and Agriculture Organization, 1997).

Oleh karena itu, status dan jenis pekerjaan ibu, kehadiran pembantu dalam rumah tangga, ketersediaan berbagai peralatan masak modern dan bahan pangan praktis, yang seluruhnya mempengaruhi ketersediaan waktu ibu untuk mengelola pangan cenderung untuk menjadi determinan keragaman konsumsi pangan di rumah tangga. Tetapi belum ada penelitian yang secara sistematis menganalisis dampak dari berbagai faktor yang diduga sebagai determinan tersebut yang dilakukan di Indonesia, dimana jumlah wanita yang terlibat di pasar tenaga kerja.

Pendapatan merupakan determinan yang dikenal luas dalam model perilaku konsumen, dan juga termasuk dalam model penawaran pangan. Rumah tangga sebagai satuan/unit primer penghasil pendapatan juga merupakan unit primer konsumsi pangan. Semakin tinggi pendapatan

rumah tangga maka akan semakin tinggi pula pendapatan yang dialokasikan untuk pangan (biaya pangan) (Goungetas et al., 1993). Bahwa semakin tinggi alokasi pendapatan untuk pangan maka akan semakin tinggi daya belipangan yang pada akhirnya akan meningkatkan keragaman konsumsi pangan (Lee & Brown, 1989).

Pandangan umum mengenai hubungan antara pendapatan dan keragaman konsumsi pangan berasal dari bukti empiris umum bahwa ada

perbedaan pola konsumsi pangan pada kelompok masyarakat menengah ke atas dan menengah ke bawah. Umumnya pola konsumsi pangan kelompok menengah ke bawah lebih sederhana dimana mereka lebih mengutamakan mengonsumsi sumber kalori yang murah (bahan pangan pokok), sedangkan pada kelompok menengah ke atas pola konsumsi pangannya lebih beragam dengan lebih banyak mengonsumsi pangan sumber protein dan vitamin (Bouis, 1990). Pendapatan rumahtangga berhubungan dengan asupan total kalori dan asupan kalori dari kelompok pangan utama. Semakin tinggi pendapatan rumahtangga maka semakin tinggi asupan kalori dari kelompok pangan hewani, sayur dan buah. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi kemungkinan untuk mengonsumsi beragam pangan.

Para ahli ekonomi berpendapat bahwa di negara berkembang, meskipun arus pendapatan dapat diukur dengan tepat, pengeluaran total kemungkinan tetap lebih tepat sebagai determinan konsumsi karena pengeluaran total lebih mewakili besarnya pendapatan tetap atau yang biasa disebut sebagai pendapatan dan aset rumahtangga. Perubahan sesaat pada pendapatan rumahtangga akan berpengaruh kecil terhadap pengeluaran rumahtangga. Oleh karena itu, pengeluaran rumahtangga yang mewakili pendapatan tetap lebih tepat digunakan untuk analisis konsumsi pangan, khususnya di Indonesia (Megawangi, 1991).

Besarnya rasio pengeluaran untuk makan dibandingkan total pengeluaran menggambarkan tentang kondisi kemiskinan keluarga,

semakin tinggi nilai rasio pengeluaran pangan dibandingkan dengan total pengeluaran semakin miskin kondisi keluarga responden. Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa ada keterkaitan antara skor PPH keluarga dengan besarnya rasio pengeluaran untuk pangan keluarga, semakin tinggi nilai rasio pengeluaran pangan, maka akan semakin

rendah skor PPH konsumsi pangan keluarga. Hal ini karena pada keluarga yang rasio pengeluaran pangannya tinggi, tingkat kemiskinannya semakin tinggi, sehingga jumlah uang yang digunakan untuk membeli makanan yang beragam juga terbatas. Dan biasanya digunakan untuk memenuhi prioritas kebutuhan pangan seperti makanan pokok dan lauk nabati, sedangkan pemenuhan lauk hewani yang secara ekonomi lebih mahal menjadi pertimbangan terakhir jika masih tersisa uang belanja termasuk halnya dengan buah. Hal menjadikan pemenuhan pangan dan keragaman konsumsi menjadi rendah.

Faktor penting yang diduga sebagai determinan dalam keragaman konsumsi pangan adalah daya beli pangan. Daya beli pangan biasanya didefinisikan sebagai kemampuan ekonomi rumahtangga untuk memperoleh bahan pangan yang ditentukan oleh besarnya alokasi pendapatan untuk pangan, harga bahan pangan yang dikonsumsi, dan jumlah anggota rumahtangga. Besarnya biaya pangan untuk pembelian beragam pangan tidak hanya bergantung pada besarnya pendapatan rumah tangga, tapi juga bergantung pada pengetahuan gizi penentu (kepala rumah tangga/ibu rumah tangga) pembelian pangan dan komposisi anggota rumah tangga.

Teori mikroekonomi menyebutkan bahwa harga pada beberapa komoditi tertentu berpotensi untuk mempengaruhi jumlah dan/atau jenis komoditi yang dibeli. Berdasarkan teori umumnya, hubungan antara harga pangan dan keragaman konsumsi pangan dapat dijelaskan bahwa harga beras merupakan faktor yang secara signifikan menentukan asupan kalori/energi pada rumahtangga di Indonesia (Ravallion, 1992). Pitt dan

Rosenzweig (1985) menganalisis hubungan antara agregat/total harga kelompok pangan dan asupan gizi, hasil bahwa peningkatan harga pangan akan mengakibatkan penurunan sebagian besar asupan zat gizi dari pangan. Contohnya jika harga daging, susu dan ikan meningkat,

maka asupan protein akan menurun; begitu juga dengan konsumsi vitamin A dan C jika harga sayuran dan buah-buahan meningkat.

Teori harga menyatakan bahwa harga pangan di daerah tertentu dipengaruhi oleh ketersediaan dan permintaan komoditi pangan tersebut. Perbedaan kualitas di antara bahan pangan yang serupa, seperti perbedaan rasa dan karakteristik gizi serta pengemasan akan dapat mengakibatkan perbedaan harga. Hasil dari beberapa penelitian menyatakan bahwa harga pangan dapat dianggap sebagai salah satu determinan dalam konsumsi pangan di Indonesia. Oleh karena itu, biaya pangan dan harga pangan adalah dua faktor penting, sebagai komponen daya beli pangan, yang diduga menjadi determinan keragaman konsumsi pangan di Indonesia.

Tingginya tingkat konsumsi energi hanya mencerminkan kuantitas konsumsi pangan keluarga, sedangkan tingginya skor PPH mencerminkan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan keluarga. Berdasarkan hasil analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada keluarga yang secara kuantitas jumlah konsumsi energinya tinggi, maka akan selalu diiringi dengan pola konsumsi yang lebih beragam dari pada keluarga yang tingkat konsumsi energinya rendah.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dijelaskan bahwa konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Jombang masih perlu ditingkatkan kuantitas dan keragamannya. Keragaman dari aspek kelompok pangan dan juga komoditas di dalam kelompok tersebut disesuaikan dengan konsep pola pangan harapan (PPH) dan potensi sumberdaya lokal, dalam hal ini dikaitkan dengan tingkat penyediaan pangan. Konsumsi beras dan terigu harus diturunkan, sebaliknya konsumsi pangan lokal seperti jagung dan umbi ditingkatkan dan peningkatannya harus secara signifikan. Demikian pula untuk konsumsi pangan hewani dan sayur buah juga masih harus ditingkatkan secara signifikan untuk mencapai diversifikasi konsumsi

pangan sesuai PPH.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa pola konsumsi masyarakat Kabupaten Jombang masih perlu ditingkatkan keragamannya baik mencakup pangan pokok maupun untuk jenis pangan lainnya. Diversifikasi pangan juga menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan. Apalagi mengacu pada konsep gizi bahwa tidak ada satu jenis panganpun yang lengkap zat gizinya sesuai dengan kebutuhan manusia untuk hidup sehat. Dari segi fisiologis, manusia untuk dapat hidup aktif dan sehat memerlukan lebih 40 jenis zat gizi yang terdapat pada berbagai jenis makanan. Tidak ada satupun jenis pangan yang lengkap gizinya kecuali ASI.

Program diversifikasi konsumsi pangan telah ada sejak dahulu, namun dalam perjalannya menghadapi berbagai kendala baik dalam konsep maupun pelaksanaannya. Beberapa kelemahan diversifikasi konsumsi pangan masa lalu adalah: 1) Distorsi konsep ke aplikasi, diversifikasi konsumsi pangan bias pada aspek produksi/penyediaan, 2) Penyempitan arti, diversifikasi konsumsi pangan bias pada pangan pokok dan energi politik untuk komoditas beras sangat dominan, 3) Koordinasi kurang optimum, tidak ada lembaga yang menangani secara khusus dan berkelanjutan, 4) Kebijakan antara satu departemen dengan departemen lainnya kontra produktif terhadap perwujudan diversifikasi konsumsi pangan, 5) Kebijakan yang sentralistik dan penyeragaman, mengabaikan aspek budaya dan potensi pangan lokal, 6) Riset diversifikasi konsumsi pangan masih lemah, bias pada beras, terpusat di Jawa-Bali, Fokus pada on-farm, dana hanya dari pemerintah pusat, 7) Ketiadaan alat ukur keberhasilan program, program bersifat partial tidak berkelanjutan dan tidak memiliki target kuantitatif yang disepakati bersama 8) Kurangnya kemitraan dengan swasta/industri dan Lembaga Swadaya Masyarakat, 9)

Ketidakseimbangan perbandingan antara biaya pengembangan dan harga produk alternatif dengan beras.

Dalam rangka mendorong mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pelestarian sumberdaya alam maka diterbitkan Perpres No. 22 tahun 2009 tentang Kebijakan percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya Lokal, dibawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. Sasaran dari peraturan tersebut adalah tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang dicerminkan oleh tercapainya skor PPH rata-rata nasional 95. Sasaran skor di setiap provinsi dan kabupaten/kota mengacu pada sasaran nasional dengan tetap memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan potensi sumberdaya pangan lokal.

Untuk menindak lanjuti Perpres No. 22, 2009 dan mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsipangan yang berbasis potensi sumberdaya lokal, Kementerian Pertanian menetapkan Gerakan percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber daya Lokal yang dituangkan dalam Permentan No.43/Permentan/OT.140/10/2009.

#### **5.4. Analisis Capaian Konsumsi Pangan**

Proyeksi konsumsi pangan yang dapat dijelaskan pada bab ini antara lain tentang analisis capaian konsumsi 2023 menuju konsumsi ideal 2025 dengan skor PPH sebesar 100, hal ini dapat dilihat pada tabel berikutini.

Tabel 5.8. Deskripsi Capaian Konsumsi 2023 Menuju Konsumsi Ideal(PPH 100).

Kelompok Jenis Pangan	Kecukupan Energi (Kkal/Kapita/Hari)	Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari) Th 2023	Gap Kecukupan Energi (Kkal)
Kab. Jombang	2100	2084,26	15,74
1. Padi-padian	1050	1059,3	(9,3)
2. Umbi-umbian	126	78,4	47,6
3. Pangan Hewani	252	248,8	3,2
4. Minyak dan Lemak	210	279,8	(69,8)
5. Buah/Biji Berminyak	63	78,5	(15,5)
6. Kacang-kacangan	105	168,6	(62,6)
7. Gula	105	78,3	26,7
8. Sayur dan Buah	126	118,56	7,44
9. Lain-Lain	63	3	60

Dari tabel 5.8. dapat dijelaskan bahwa konsumsi Masyarakat Jombang pada tahun 2023 antara kecukupan dan kebutuhan hampir sama ,hanya ada beberapa yang harus dikurangi dan ditingkatkan, untuk mencapai konsumsi yang ideal maka perlu:

1. Menambah konsumsi umbi-umbian sebanyak 47,6 kalori atau atau 1buah sedang ubi jalar /orang/hari.
2. Menambah konsumsi buah/biji berminyak sebanyak 15,5 kalori atau 1,5biji kemiri /orang/hari .
3. Mengurangi konsumsi minyak/lemak 69,8 kalori atau  $\frac{3}{4}$  sdm/orang/hari.
4. Mengurangi konsumsi kacang-kacangan 62,6 kalori atau 1 porsi tempe goreng/orang/hari
5. Menambah konsumsi gula sebanyak 26,7 kalori atau atau  $\frac{3}{4}$  sendok makan gula pasir /orang/ hari.
6. Meningkatkan konsumsi sayur dan buah sebanyak 7,44 kalori atau wortel  $\frac{1}{2}$  buah ( $\frac{1}{3}$  gelas)/orang/hari, serta meningkatkan keberagaman konsumsi jenis sayur agar energy lebih tercukupi .

Penganekaragaman adalah suatu cara untuk mengadakan lebih dari satu jenis barang/komoditi yang dikonsumsi. Diversifikasi di bidang pangan memiliki dua makna, yaitu diversifikasi tanaman pangan dan diversifikasi konsumsi pangan. Kedua bentuk diversifikasi tersebut masih berkaitan dengan upaya untuk mencapai ketahanan pangan. Diversifikasi tanaman pangan berkaitan dengan teknis pengaturan pola bercocok tanam, maka diversifikasi konsumsi pangan akan mengatur atau mengelola pola konsumsi masyarakat dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan. Menurut Riyadi (2003), penganekaragaman pangan merupakan suatu proses pemilihan pangan yang tidak hanya tergantung pada satu jenis pangan, akan tetapi memiliki beragam pilihan (alternatif) terhadap berbagai bahan pangan. Pertimbangan rumah tangga untuk memilih bahan makanan pokok keluarga di dasarkan pada aspek produksi, aspek pengolahan, dan aspek konsumsi pangan. Penganekaragaman pangan ditujukan tidak hanya untuk mengurangi ketergantungan akan jenis pangan tertentu, akan tetapi dimaksudkan pula untuk mencapai keberagaman komposisi gizi sehingga mampu menjamin peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Adapun rincian bahan makanan yang dikonsumsi dan sumbangan energinya adalah sebagai berikut :

Tabel 5.9. Variasi kelompok pangan yang dikonsumsi Masyarakat Kabupaten Jombang (Kalori/orang/hari)

Kelompok Pangan	Kalori bahan pangan/orang/hari
1. Padi-padian	1059,3
Beras giling	977,7
Jagung Pipilan	20,7
Tepung Terigu	60,9
2. Umbi-umbian	78,4
Ketela Pohon	18,6
Ubi Jalar	19,4
Sagu	0,3
Kentang	19,7
Talas	0,4

3. Pangan Hewani	248,8
Daging Ruminansia	32,4
Daging Unggas	68,4
Telur	34,3
Susu	30,0
Ikan	83,8
4. Minyak dan Lemak	279,8
Minyak Kelapa	57,9
Minyak Sawit	221,5
Lemak	0,3
Minyak Lain	0,0
5. Buah/Biji Berminyak	49,5
Kelapa	39,9
Kemiri	9,4
Biji Jambu Mete	0,0
Melinjo	0,2
6. Kacang-kacangan	168,6
Kacang Tanah	13,1
Kacang Kedelai	147,8
Kacang Hijau	5,6
Kacang Merah	2,1
7. Gula	78,3
Gula Pasir	78,2
Gula Aren	0,1
Gula Kelapa	0,0
8. Sayur dan Buah	118,56
Sayur-Sayuran	34,3
Buah-Buahan	84,26
9. Lain-Lain	0,0

Dari tabel 5.9. dapat dijelaskan untuk kelompok padi-padian yang paling banyak dikonsumsi adalah beras giling (menyumbangkan 977,7 kalori), ketela pohon terbanyak yang dikonsumsi dari kelompok umbi-umbian (menyumbang 29,6 kalori), Ikan merupakan pangan hewani yang paling banyak dikonsumsi (83,8 kalori), minyak kelapa sawit (menyumbang 221,5 kalori), gula pasir 78,2 kalori dan buah-buahan 84,26 kalori. Dari rincian ini yang sangat perlu diperbaiki komposisi buah dan sayur. Dengan merujuk isi piringku sayur mempunyai proporsi yang lebih besar (2/3 dari 50% piring) sedangkan buah 1/3 porsi dari 50% piring. Serta mengurangi menu gorengan sehingga dapat mengurangi

konsumsi minyak.

Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi akan mengupayakan diversifikasi sumber karbohidrat lokal dengan menekan konsumsi beras. Saat ini angka konsumsi beras jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sumber karbohidrat lain. Besaran konsumsi beras di tahun 2019 mencapai 94,9 kilogram (kg) per kapita per tahun. Dibandingkan dengan ubi kayu, yang jumlahnya 8,6 kg per kapita per tahun dan sumber karbohidrat lainnya yang angkanya di bawah itu. Indonesia terdapat kurang lebih 77 tanaman sumber karbohidrat yang sangat mungkin untuk dimaksimalkan tingkat produksinya. Demi mengoptimalkan diversifikasi sumber karbohidrat lokal tersebut, Kementan akan berusaha menekan konsumsi beras.

Konsumsi beras ditargetkan 85 kilogram per kapita per tahun pada 2024 dan konsumsi sumber karbohidrat yang lain (akan) ditingkatkan," paparnya. Strategi utama antara lain meningkatkan ketersediaan pangan lokal, meningkatkan akses terhadap pangan lokal, dan mendorong peningkatan konsumsi pangan lokal.

Menurut praktisi medis Karin Wiradarma, konsumsi nasi berlebihan memiliki risiko peningkatan kadar gula darah dalam tubuh, karena nasi memiliki indeks glikemik yang cukup tinggi. Sementara itu, sumber karbohidrat lain, misalnya sagu, kentang, singkong, talas, jagung, atau pisang, memiliki indeks glikemik yang lebih rendah daripada nasi. Nutrisinya (sumber karbohidrat nonberas) juga lebih kaya, (terdapat) serat, kalium, vitamin B, vitamin C, zink, dan kalsium.

Keragaman konsumsi pangan hewani Masyarakat Jombang sudah cukup baik, dan pangan hewani konsumsi tertinggi ikan, kemudian unggas, telur daging dan susu. Protein pada ikan tersusun dari asam-asam amino yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan. Selain itu, protein ikan amat mudah dicerna dan diabsorpsi oleh tubuh. Daging ikan

mempunyai serat-serat protein lebih pendek daripada serat-serat protein hewani lainnya seperti sapi atau ayam. Disamping itu pada ikan mengandung omega 3 yang baik untuk pertumbuhan otak anak-anak dan menyehatkan pembuluh darah bagi orang dewasa.

Proporsi konsumsi sayur dibandingkan dengan buah pada Masyarakat Jombang masih kurang. Secara umum sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan. Sebagian vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayuran dan buah-buahan berperan untuk membantu proses-proses metabolisme di dalam tubuh, sedangkan antioksidan mampu menangkal senyawa-senyawa hasil oksidasi, radikal bebas, yang mampu menurunkan kondisi kesehatan tubuh. Sayuran hijau maupun berwarna selain sebagai sumber vitamin, mineral juga sebagai sumber serat dan senyawa bioaktif yang tergolong sebagai antioksidan. Sayuran berwarna seperti bayam merah, kobis ungu, terong ungu, wortel, tomat juga merupakan sumber antioksidan. Buah-buahan selain sebagai sumber vitamin, mineral, serat juga antioksidan terutama buah yang berwarna hitam, ungu, merah. Buah berwarna, baik berwarna kuning, merah, merah jingga, orange, biru, ungu, dan lainnya, pada umumnya banyak mengandung vitamin, khususnya vitamin A, dan antioksidan.

Masyarakat Indonesia terutama balita dan anak usia sekolah dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300-400 gram per orang per hari dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400-600 gram per orang per hari. Sekitar dua-pertiga dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Anjuran konsumsi sayuran lebih banyak daripada buah karena buah juga mengandung gula, ada yang sangat tinggi ada pula yang jumlahnya cukup. Semakin matang buah yang mengandung karbohidrat semakin tinggi kandungan fruktosa dan glukosanya, yang dicirikan oleh rasa yang semakin manis. Konsumsi buah

yang sangat manis dan rendah serat agar dibatasi, karena buah yang sangat manis mengandung fruktosa dan glukosa yang tinggi. Asupan fruktosa dan glukosa yang sangat tinggi dapat berisiko meningkatkan kadar gula darah.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup turut berperan dalam menjaga kenormalan tekanan darah, kadar gula dan kolesterol darah. Konsumsi sayur dan buah yang cukup juga menurunkan risiko sulit buang air besar (BAB/sembelit) dan kegemukan. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup turut berperan dalam pencegahan penyakit tidak menular kronik. Konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup merupakan salah satu indikator sederhana gizi seimbang.

#### **5.5. Analisis Kecamatan Kudu ( Demapan = Desa Mandiri Pangan)**

Kecamatan Kudu khususnya Desa Made merupakan salah satu Desa di Kabupaten Jombang yang menjadi pilot project desa mandiri pangan.

Kemandirian pangan adalah kemampuan suatu wilayah dalam memproduksi Pangan yang beranekaragam yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Desa mandiri pangan adalah Desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.

Tujuan dibentuknya desa mandiri pangan adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin pedesaan dalam

mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dan dikuasainya secara optimal, dalam mencapai kemandirian pangan rumah tangga.

Dampak yang diharapkan dari desa mandiri pangan adalah :1) Peningkatan Skor PPH; 2) Peningkatan Status Gizi Masyarakat dan :3)Terwujudkan Ketahanan dan Kemandirian Pangan Masyarakat.

Berdasarkan hasil survey konsumsi tahun 2023 karakteristik Masyarakat Desa Made adalah sebagai berikut:

Tabel 5.10. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Suami di

Kecamatan Kudu tahun 2023

Pendidikan Suami	Jumlah (n)	Persen (%)
Tidak tamat SD/MI	10	25
Tamat SD/MI	9	22,5
Tamat SLTP/Sederajat	11	27,5
Tamat SLTA/Sederajat	8	20
Tamat Akademi/PT	2	5
Total	40	100

Dari Tabel 5.10. menunjukkan bahwa mayoritas Tingkat Pendidikan suami di Kecamatan Kudu tamat SLTP/ sederajat (27,5%), sedangkan Pendidikan istri mayoritas (30%) adalah tamat SD/MI. Pendidikan tidak selalu berpengaruh pada perilaku Kesehatan/perilaku makan. Meskipun Pendidikan formal tidak tinggi tetapi sering mengikuti penyuluhan atau Pendidikan non formal dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan.

Tabel 5.11. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Istri di Kecamatan Kudu tahun 2023

Pendidikan Istri	Jumlah (n)	Persen (%)
Tidak tamat SD/MI	7	17,5
Tamat SD/MI	12	30
Tamat SLTP/Sederajat	11	27,5
Tamat SLTA/Sederajat	7	17,5
Tamat Akademi/PT	3	7,5
Total	40	100

Pada umumnya Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang dalam melakukan kegiatan konsumsi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, secara umum juga akan semakin tinggi tingkat konsumsinya, begitu juga sebaliknya. Tetapi di Desa Made yang mayoritas Tingkat Pendidikan tamat SLTP/SMP untuk para suami dan tamat SD/MI untuk para istri mempunyai perilaku konsumsi yang baik. Hal ini bisa dipengaruhi intesnya kegiatan penyuluhan atau edukasi yang dilakukan sehingga meningkatkan pengetahuan dan mampu merubah perilaku yang baik.

Tabel 5.12. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat jenis Pekerjaan Suami di Kecamatan Kudu tahun 2023

Pekerjaan Suami	jumlah (n)	Persen (%)
Buruh	9	22,5
Petani	18	45
Pedagang/Wiraswasta	4	10
Pegawai Negeri/TNI/Polri/Pamong	2	5
Pegawai Swasta	4	10
Lainnya, sebutkan!	3	7,5
Total	40	100

Dari Tabel 5.12. Mayoritas jenis Pekerjaan suami adalah petani (45%), Karena factor inilah Kecamatan Kudu dipilih sebagai Kecamatan tempat dikembangkan desa mandiri pangan.

Tabel 5.13. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Jenis Pekerjaan Istri di Kecamatan Kudu tahun 2023

Pekerjaan Istri	jumlah (n)	Persen (%)
Buruh	3	7,5
Petani	4	10
Pedagang/Wiraswasta	3	7,5
Pegawai Negeri/TNI/Polri/Pamong	1	2,5
Pegawai Swasta	0	0

Ibu Rumah Tangga	26	65
Lainnya, sebutkan!	3	7,5
Total	40	100

Pada tabel 5.13, mayoritas pekerjaan isitri adalah ibu rumah tangga (65%). Ibu yang tidak bekerja di luar atau menjadi ibu rumah tangga, mempunyai peluang yang lebih banyak mempersiapkan makanan yang baik untuk anggota keluarganya.

Tabel 5.14. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan Keluarga di Kecamatan Kudu tahun 2023

Pendapatan	Jumlah (n)	Persen (%)
< 1 jt	0	0
1 s/d 2 jt	15	37,5
>2 s/d 3 jt	8	20
> 3 s/d 5 jt	13	32,5
>5 s/d 7 jt	3	7,5
>7 jt	1	2,5
Total	40	100

Dari tabel 5.14. menunjukkan bahwa mayoritas (37,5%) Masyarakat Kecamatan Kudu berpenghasilan 1 sampai 2 juta per bulan , dan 32,5 % berpenghasilan 3 sampai 5 juta.

Faktor penting yang diduga sebagai determinan dalam keragaman konsumsi pangan adalah daya beli pangan. Daya beli pangan biasanya didefinisikan sebagai kemampuan ekonomi rumahtangga untuk memperoleh bahan pangan yang ditentukan oleh besarnya alokasi pendapatan untuk pangan, harga bahan pangan yang dikonsumsi, dan jumlah anggota rumahtangga. Besarnya biaya pangan untuk pembelian beragam pangan tidak hanya bergantung pada besarnya pendapatan rumah tangga, tapi juga bergantung pada pengetahuan gizi penentu (kepala rumah tangga/ibu rumah tangga) pembelian pangan dan komposisi anggota rumah tangga.

Tabel 5.15. Distribusi Responden berdasarkan Jumlah anggota keluarga di Kecamatan Kudu tahun 2023

Jumlah Anggota keluarga	Jumlah	Persen (%)
2 orang	10	25
3 orang	17	42,5
4 orang	11	27,5
5 orang	1	2,5
6 0rang	1	2,5
Total	40	100

Dari tabel 5.15. dapat dijelaskan bahwa mayoritas jumlah anggota keluarga Masyarakat Kecamatan Kudu 3 orang (42%). Jumlah keluarga yang cukup kecil cenderung tidak membebani bagi keluarga termasuk penyediaan makanannya. Jumlah anggota keluarga yang semakin besar tanpa diimbangi dengan meningkatnya pendapatan akan menyebabkan pendistribusian konsumsi pangan akan semakin tidak merata. Pangan yang tersedia untuk suatu keluarga besar mungkin hanya cukup untuk keluarga yang besarnya setengah dari keluarga tersebut. Keadaan yang demikian tidak cukup untuk mencegah timbulnya gangguan gizi pada keluarga besar. Menurut Berg (1986) bahwa anak yang mengalami gizi kurang pada keluarga beranggota banyak, lima kali lebih besar dibandingkan dengan keluarga beranggota sedikit.

Tabel 5.16. Distribusi Responden berdasarkan Rerata Pengeluaran Pangan di Kecamatan Kudu tahun 2023

Rerata pengeluaran Pangan	Jumlah (n)	Persen (%)
< 25%	5	12,5
25 – 50%	35	87,5
>50 – 75%	0	0
>75%	0	0
Total	40	100

Dari 5.16. dapat dijelaskan bahwa rerata pengeluaran makan Masyarakat Kecamatan Kudu antar 25-50% ( sebanyak 87% atau 35 responden).

Persentase pengeluaran untuk makan akan menurun sejalan dengan meningkatnya pendapatan. Oleh karena itu komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan sebagai indikator untuk kesejahteraan penduduk. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Pendapatan yang dimiliki dalam suatu waktu tertentu akan mempengaruhi konsumsi yang dilakukan oleh manusia dalam waktu itu juga. Apabila pendapatan meningkat maka konsumsi yang dilakukan juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya (Pujoharso, 2013). Perbedaan tingkat pendapatan akan mengakibatkan perbedaan pola distribusi pendapatan termasuk pola konsumsi rumah tangga. Dalam kondisi terbatas (pendapatan kecil), maka seseorang akan mendahulukan pemenuhan kebutuhan makanan dan sebagian besar pendapatan tersebut dibelanjakan untuk konsumsi makanan. Semakin rendah pangsa pengeluaran pangan, berarti tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik (Ariani et al., 2007).

Tabel 5.17. Rerata Konsumsi Energi (kcal), Protein (g) dan Kecukupan Konsumsi Energi dan Protein Responden Masyarakat Kecamatan Kudu Tahun 2023.

Nama Desa	Energi/Kapita/hari (Kkal)	Protein/Kapita/hari (g)	%AKE	%AKP
Waru	2795,1	85,1	133,1	149,30
Ngembak	2811,8	88,1	133,90	154,56
Tawang	2116	58,1	100,76	101,93
Kedungwatu	2112,9	59,5	100,61	104,39
Kecamatan Kudu	2458,95	72,7	117,09	127,54

Dari tabel 5.17. dapat dijelaskan bahwa rata-rata konsumsi Energi Masyarakat Kecamatan Kudu 2.458,95 Kkal/kapita/hari , jika dibandingkan dengan kecukupan pada AKG tahun 2019 yang 2100 kkal sudah mencapai 117,09%. Sedangkan Konsumsi protein rata-rata 72,7 g/kapita/hari dan mencapai 127,54 % AKP (Angka Kecukupan protein

yang dianjurkan 57 g/kapita/hari).

Hardinsyah dan Martianto (1989) mendefinisikan kebutuhan gizi sebagai kebutuhan minimal zat gizi agar dapat hidup sehat sedangkan kecukupan gizi adalah jumlah masing-masing zat gizi yang sebaiknya dipenuhi seseorang agar hampir semua orang (minimal 97,5% populasi) hidup sehat. Angka kecukupan energi dan protein berguna untuk mengukur tingkat dan perencanaan konsumsi. Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (2018), Angka Kecukupan Energi (AKE) rata-rata orang Indonesia adalah sebesar 2100 kkal/kapita/hari sedangkan Angka Kecukupan Protein (AKP) adalah sebesar 57 gr/kapita/hari. Jumlah konsumsi pangan dikelompokkan menurut kriteria yang diadaptasi dari Departemen Kesehatan tahun 1996 adalah sebagai berikut:

- a) Kurang dari 70% : Kurang
- b) 70-100%: Sedang
- c) 100-130%: Normal
- d) 130% ke atas : berlebih

Jika merujuk pada Pustaka tersebut Tingkat konsumsi energi dan protein Masyarakat Kecamatan Kudu dalam kategori Normal antara 100-130%.

Tabel 5.18. Skor PPH Kecamatan Kudu Tahun 2023

Nama Desa	Skor PPH
Waru	99,5
Ngembak	99,8
Tawang	98,7
Kedungwatu	96,8
Kecamatan Kudu	98,7

Dari tabel 5.18. Skor keempat desa di Kecamatan Kudu sudah kategori baik semua, dan skor PPH kecamatan 98,7 (sudah mendekati 100). Program di Kecamatan Kudu dapat dijadikan contoh praktik baik bagi desa dan kecamatan lain di Kabupaten Jombang.

Konsumsi pangan tidak hanya diukur dari segi jumlah yang dicerminkan oleh terpenuhinya AKE, tetapi juga dari segi kualitas yang dicerminkan oleh keanekaragaman konsumsi pangan. Konsumsi yang beranekaragam sangat penting karena tidak ada satupun jenis pangan yang memiliki kandungan zat gizi lengkap. Oleh karena itu, konsumsi pangan menyangkut upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mempunyai pemahaman atas pangan, gizi dan kesehatan yang baik, sehingga dapat mengelola pangan secara optimal. Kinerja konsumsi pangan wilayah tercermin dalam pola konsumsi masyarakat di tingkat rumah tangga. Kondisi konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kondisi ekonomi, sosial, dan budaya setempat. Ukuran rumah tangga, tingkat pendidikan, dan pendapatan merupakan faktor yang mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga (Baliwati, 2007).

Penilaian kualitas konsumsi pangan berdasarkan keragaman dan keseimbangan komposisi energi dapat dilakukan dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH). PPH merupakan kumpulan beragam jenis dan jumlah kelompok pangan utama yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi pada komposisi yang seimbang (Hardinsyah et al, 2001). Selanjutnya dijelaskan bahwa dengan terpenuhinya kebutuhan energi dari berbagai kelompok pangan sesuai PPH, secara implisit kebutuhan zat gizi juga terpenuhi kecuali untuk zat gizi yang sangat defisit dalam suatu kelompok pangan.

Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Jika skor konsumsi pangan mencapai 100, maka wilayah tersebut dikatakan tahan pangan.

Di Kecamatan Kudu skor PPH rata-rata mencapai 98,7. Angka ini masuk dalam kategori baik dan mendekati skor maksimal 100.

Hal ini menunjukkan keberhasilan program-program yang sudah

dilakukan. Khusus di Desa Made dilakukan berbagai kegiatan antara lain pendampingan warung B2SA, edukasi gizi seimbang pada anak usia dini ,dan kegiatan lain yang dapat meningkatkan pengetahuan Masyarakat tentang pentingnya gizi dan Kesehatan sehingga mampu merubah perilaku positif.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data hasil survey konsumsi pangan wilayah berbasis PPH Kabupaten Jombang Tahun 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Karakteristik Responden : Jumlah anggota keluarga mayoritas (35,1%) 4 orang, Umur KK 33,8% antara 40 – 49 tahun, Umur Ibu 36,2% antara 40 – 49 tahun, Tingkat Pendidikan KK 41,6 % lulus SLTA/Sederajat, Tingkat Pendidikan istri 39,5% lulus SLTA/Sederajat, jenis pekerjaan KK yang banyak adalah pedagang/wiraswasta dan buruh sebesar 23,2%, sedangkan istri mayoritas sebagai ibu rumah tangga (62,5%), pendapatan keluarga Rp 1-2 juta/bulan (29,2%) dan antara 3-5 juta/bulan sebanyak 24,6%, pengeluaran untuk pangan 58,4n% antara 25-50%.
2. Berdasarkan sumber makanan yang dikonsumsi keluarga, mayoritas dari hasil pembelian baik makanan pokok, umbi-umbian, lauk hewani, lauk nabati, sayur/buah-buahan, makanan selingan. Sedangkan dari hasil pertanian, pemanfaatan lahan dan pemberian masih relatif sedikit.
3. Konsumsi energy masyarakat Kabupaten Jombang sebanyak 2084,26 kkal/kap/hari atau tingkat konsumsi energy sebesar 99.25%, dibandingkan konsumsi ideal sebesar 2.100 kkal/kapita/hari.
4. Konsumsi protein masyarakat Kabupaten Jombang sebanyak 65,4 gram/kap/hari, atau tingkat konsumsi protein 114,7% dengan konsumsi protein ideal 57 gram/kap/hari.
5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) kabupaten Jombang sebesar 90,18 dengan skor PPH terendah sebesar 80,1 dan skor PPH tertinggi mencapai 98,8.

6. Berdasarkan PPH kelompok pangan, makan bahan pangan yang masih kurang dikonsumsi serta perlu ditingkatkan adalah umbi-umbian, sayur dan buah-buahan. Sedangkan bahan makanan yang perlu dikurangi adalah konsumsi Minyak/lemak dan kacang-kacangan.
7. Ada hubungan yang signifikan antara karakteristik responden (umur suami, umur istri, Pendidikan suami, Pendidikan istri, dan jumlah anggota keluarga dengan kecukupan konsumsi energi, kecukupan konsumsi protein dan skor pola pangan harapan, sedangkan pekerjaan istri dan rerata pengeluaran makan tidak ada hubungan. Khusus pendapatan berhubungan dengan konsumsi energi tetapi tidak berhubungan dengan konsumsi protein dan skor PPH.
8. Untuk mencapai target skor PPH 100 (ideal), maka perlu adanya penambahan konsumsi pada kelompok pangan: umbi-umbian, buah/biji berminyak, gula dan konsumsi sayur dan buah, sedangkan konsumsi yang dikurangi adalah kelompok pangan minyak/lemak dan kacang-kacangan.
9. Kecamatan Kudu sebagai pilot project Desa Mandiri Pangan, Konsumsi energi 2.458,95 Kkal/kapita/hari (117,09 % AKE). Konsumsi protein rata-rata 72,7 g/kapita/hari (127,54 % AKP).

## **6.2 Rekomendasi**

1. Pengembangan komoditas sayuran dan buah hendaknya diarahkan pada pola jenis buah dan sayuran yang berbasis sumberdaya lokal seperti pisang, belimbing, pepaya serta sayuran hijau dan kacang-kacangan serta kelompok sayuran yang relatif tidak tergantung musim, mudah dibudidayakan dan daya terima masyarakat cukup tinggi terhadap komoditas tersebut. Peningkatan pemanfaatan pekarangan perlu dibudayakan kembali, sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi buah dan sayur dari pekarangan tanpa membeli.

2. Perlu pengurangan konsumsi lemak/minyak terutama untuk orang dewasa. Lemak/minyak yang berlebih dapat memicu munculnya PTM (penyakit tidak menular) melalui sosialisasi menu gizi seimbang.
3. Sosialisasi dan promosi tentang Pedoman Gizi Seimbang (PGS) kepada masyarakat dilakukan secara terus menerus, khususnya pentingnya konsumsi makanan yang beragam melalui posyandu dan sekolah mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai dengan SMA
4. Sosialisasi pengembangan konsumsi pangan B2SA melalui KIE (penyusunan KIT dan Modul Penyuluhan di tingkat lapangan, Lomba Cipta Menu, Gemarikan serta penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik) perlu tetap dilaksanakan
5. Pada kegiatan kemasyarakatan (rapat-rapat kegiatan) mulai dibiasakan snack berupa umbi-umbian dan buah-buahan
6. Diversifikasi konsumsi pangan perlu diiringi dengan pengembangan produk pangan non beras dengan teknologi pengolahan untuk meningkatkan cita rasa dan citra pangan lokal, agar mempunyai daya saing dengan pangan yang telah merasuk dalam pola konsumsi masyarakat. Sehingga masyarakat tertarik untuk mensubstitusi beras dengan sumber karbohidrat lokal lainnya.
7. Melaksanakan Sosialisasi Optimalisasi pemanfaatan pekarangan untuk menunjang kebutuhan pangan keluarga (baik sayuran, buah maupun lauk pauk)
8. Melaksanakan klas-klas ibu tentang cara Menyusun menu keluarga yang baik, cooking class pangan lokal sehingga mampu menyajikan menu yang memenuhi kebutuhan gizi keluarga
9. Analisa situasi dan kebutuhan konsumsi pangan perlu dilaksanakan setiap tahun guna mengetahui perkembangan konsumsi pangan

penduduk sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pengembangan konsumsi pangan, untuk itu perlu dukungan dana dari BAPPEDA Kabupaten Mojokerto untuk mendukung pelaksanaan kegiatan survey konsumsi pangan di tingkat rumah tangga sebagai data dasar dalam usulan perencanaan kebutuhan konsumsi pangan (PPH) pada masing-masing wilayah.

10. Diversifikasi konsumsi pangan perlu diiringi dengan pengembangan produk pangan non beras dengan teknologi pengolahan untuk meningkatkan cita rasa dan citra pangan lokal, agar mempunyai daya saing dengan pangan yang telah merasuk dalam pola konsumsi masyarakat. Sehingga masyarakat tertarik untuk mensubstitusi beras dengan sumber karbohidrat lokal lainnya.
11. Perlu dikembangkan lagi desa mandiri pangan di kecamatan lainnya, yang mengoptimalkan teristik warga dan potensi wilayah, sehingga keragaman pangan di Kabupaten Jombang semakin baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Sirojuddin. 2020. Tinjauan strategis Ketahanan Pangan & Gizi di Indonesia. Informasi Terkini 2019-2010. Laporan Penelitian SMERU. Wordl Food Programme.
- Almatsier S. 2001. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Jakarta (ID) : Gramedia Pustaka Utama.
- Anwar K dan Hardinsyah. 2014. Konsumsi pangan dan gizi serta skor pola pangan harapan (PPH) pada dewasa usia 19-49 tahun di Indonesia. Jurnal Gizi dan Pangan, Maret 2014, 9(1) : 51-58.
- BBKP – PSKPG – IPB, 2001. Kajian Strategi Pengembangan Konsumsi Pangan dengan Pendekatan PPH
- Badan Ketahanan Pangan. 2010. Pedoman Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH).
- Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian RI. 2005. Pedoman Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM). Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian RI.
- Bambang JS, Nabiu M dan Sugiarti S. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kecukupan gizi mandiri pangan di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu. Jurnal Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, Januari 2012 4(1).
- BPS Kabupaten Jombang, 2019, Statistik Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019.
- Cahyani. 2008. Analisis faktor sosial ekonomi keluarga terhadap keanekaragaman konsumsi pangan berbasis agribisnis di Kab. Banyumas [tesis]. Semarang (ID). Program Magister Agribisnis Program Pascasarjana Undip Semarang.
- Damanik R, Ekayanti I, Hariyadi D. 2010. Analisis pengaruh pendidikan ibu terhadap status gizi balita di Propinsi Kalimantan Barat. Jurnal Gizi dan Pangan, Juli 2010 5(2) : 69- 77.
- Departemen Pertanian. 2011. Pedoman Umum Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2011.

- Dewantoro, Arif. Pola Konsumsi Masyarakat Indonesia selama Pandemi. Wibiz Media network. 2021.
- Eusebio, J.S; R.G. Corcolon. 1999. Course Syllabus on Food and Nutrition Planning and Management Institute of Human Nutrition and Food College of Human Ecology. UPLB.
- Gibson R. 1990. Principle of Nutrition Assesment.
- Hamid et al. 2013. Analisis pola konsumsi pangan rumah tangga (studi kasus di Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur). Jurnal AGRISE, Agustus 2013XIII (3) : 1412 - 1425.
- Hardinsyah, Baliwati. Y.B., Martianto, D., Rachman, H. S., Widodo, A., Subiyakto. 2001. Pengembangan Konsumsi Pangan dengan Pendekatan Pola Pangan Harapan. Kerjasama PSKPG IPB dengan PPKP BKP Departemen Pertanian
- Hardinsyah et al. 2002. Analisis Kebutuhan Konsumsi Pangan. Jakarta (ID): Pusat Studi Kebijakan Pangan dan Gizi IPB dan Pusat Pengembangan Konsumsi Pangan, Badan BIMAS Ketahanan Pangan, DEPTAN.
- Hardinsyah, Baliwati Y, Martianto D, Rachman HS, Widodo A, Subiyakto. 2001. Pengembangan Konsumsi Pangan Dengan Pendekatan Pola Pangan Harapan. Jakarta (ID): Badan BIMAS Ketahanan Pangan.
- Hardinsyah. 2007. Review faktor determinan keragaman konsumsi pangan. Jurnal Gizi dan Pangan, Juli 2007 2(2): 55-74.
- Jellife and Jellife. 1989. Community Nutritional Assessment. Oxford University Press. New York.
- LIPI. 2012. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X Tahun 2012
- Peraturan Menteri Pertanian No. 25/Permentan/OT.140/2/2010. Tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan 2010.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- Sanjur D., Rodrigues M. 1997. Assessing Food Consumption. Selected Issues in Data Collection and Analisis. Cornell University.

Purwanto. 2020. Pusat Penelitian Ekonomi. LIPI Jakarta.

Nurwidyanti, Miko. 2020. Upaya Mewujudkan Ketahanan Pangan & Ekonomi di Masa Pandemi. Wartatransparansi.com. 19 Oktober 2020.

Saragih, Bernatu. 2020. Hubungan Berbagai Faktor dan Kebiasaan Makan Pada masa Pandemi Covid-19. Universitas Mulawarman. April 2020.

Lampiran. 1

## Daftar Responden/Sampel

Kecamatan : \_\_\_\_\_

Desa/Kel : \_\_\_\_\_

No	NAMA RESPONDEN	ALAMAT	NO.HP	KETERANGAN
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				

# K U E S I O N E R

## SURVEY KONSUMSI PANGAN BERBASIS PPH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

### RESPONDEN : IBU RUMAH TANGGA

I. KETERANGAN WAWANCARA			
Tanggal Wawancara : Pewawancara : No Hp pewawancara :	_____ _____ _____	Tgl/bln/th :	<input type="text"/>
II IDENTITAS RESPONDEN			
1	Kecamatan	_____	<input type="text"/> <input type="text"/>
2	Desa/Kelurahan	_____	<input type="text"/>
3	RT / RW	_____ / _____	
	Alamat	Jl. _____ _____	
4	Nama dan No. Urut Responden	_____	<input type="text"/> <input type="text"/>
5	No. ID (Kode Responden)		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
6	Nama Suami/Istri a. Suami b. Istri	_____ _____	
7	Umur a. Suami b. Istri	a. ----- tahun b. ----- tahun	a. <input type="text"/> <input type="text"/> b. <input type="text"/> <input type="text"/>
8	Pendidikan a. Suami b. Istri	1. Tidak tamat SD/MI 2. Tamat SD/MI 3. Tamat SLTP/ sederajat 4. Tamat SLTA/ sederajat 5. Tamat Akademi/PT	a. <input type="checkbox"/> b. <input type="checkbox"/>
9	Jenis Pekerjaan 1. Suami  2. Istri	1. Buruh 2. Petani 3. Pedagang/Wiraswasta 4. Pegawai Negeri/TNI/Polri/Pamong 5. Pegawai Swasta 6. Ibu Rumah Tangga 7. Lainnya, sebutkan !	1. _____ <input type="checkbox"/>  2. _____ <input type="checkbox"/>
10	Rata-rata Pendapatan keluarga perbulan	Suami : Rp _____ Istri : Rp _____ _____ Lainnya : Rp _____	Jumlah Total Rp : _____
11	Rata-rata Pengeluaran keluarga perbulan	Makanan : _____ Non Makanan : _____	Rp _____ Rp _____
12	Jumlah Balita dalam keluarga	_____ orang	<input type="text"/> <input type="text"/>
13	Jumlah Anggota keluarga <b>(Anggota Keluarga yang makannya jadi satu dengan responden)</b>	_____ orang	<input type="text"/> <input type="text"/>
14	Sumber makanan yang biasa dikonsumsi keluarga	1. Hasil	a. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

	<p>a. Makanan Pokok (beras, jagung, dll)  b. Umbi-umbian  c. Lauk hewani (ayam, daging, ikan, telur, dll)  d. Lauk nabati (tahu, tempe, kacang ijo, dll)  e. Sayur  f. Buah  g. Makanan selingan/jajanan</p>	<p><i>pekarangan/sawah/ternak</i>  2. <i>Beli</i>  3. <i>Diberi orang</i>  4. <i>Bantuan..... (jelaskan)</i></p>	<p>b.  c.  d.  e.  f.  g.</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div>
15	<p>Berapa kali membeli makanan matang atau siap saji dalam 1 minggu :</p> <p>a. Makanan Pokok (nasi/mie goreng, nasi bungkus, dll)  b. Lauk pauk (soto, rawon, sate dan lauk lainnya)  c. Sayuran (sop, sayur bening, sayur asem dll.)  d. Jajanan (bakso, cilok, kue, gorengan dll)  e. Minuman (es campur, es bobba, jus dll)</p>	<p>1. <i>1 kali dalam seminggu</i>  2. <i>2 kali dalam seminggu</i>  3. <i>3 kali dalam seminggu</i>  4. <i>&gt;3 kali atau hamper tiap hari</i>  <b>sebutkan menu yang sering dibeli.....</b></p>	<p>a.  b.  c.  d.  e.</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div>
16	<p>Apakah ibu pernah memanfaatkan hasil tanaman pangan lestari yang dibantu oleh Dinas Pangan dan Perikanan</p>	<p><b>Ya / Tidak</b>  <i>Jika ya,</i>  <b>Sebutkan.....</b>  <i>Bayam / sawi/ pokcoy /labu siyam / terong / kacang panjang/ kangkung /kol / wortel dll</i>  <b>Berapa sering ibu memanfaatkan hasil tanaman tersebut.....</b></p>	<p>-----  .....  .....  .....  .....</p>
17	<p>Apakah ada makanan yang tidak habis / terbuang (<i>dalam 1 minggu teakhir</i>)</p> <p>a. Makanan pokok  b. Lauk pauk  c. Sayuran / buah-buahan  d. Jajanan</p>	<p><b>Ada / Tidak</b>  <i>Jika ada</i>  <b>Sebutkan berapa banyak / porsi yang terbuah :</b></p>	<p>.....  <b>a. ....</b>  <b>b. ....</b>  <b>c. ....</b>  <b>d. ....</b></p>







